



PEMERINTAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW

BERAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LPPD



Ir. LIMI MOKODOMPIT, M.M.
Pj. Bupati Bolaang Mongondow

**LAPORAN
PENYELENGGARAN
PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan segala rahmat dan karunia-nya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 dapat terselesaikan untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Utara. Hal ini merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif dari hasil kerja yang dapat diukur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang ditentukan. Dalam penyajiannya LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri dari capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sepenuhnya sempurna baik secara penyajian maupun substansi yang disajikan. Oleh karenanya, kami tetap mengharapkan saran dan masukan serta koreksi untuk menyempurnakan laporan ini, bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow serta menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow agar meningkatkan kinerja kedepannya untuk lebih optimal.

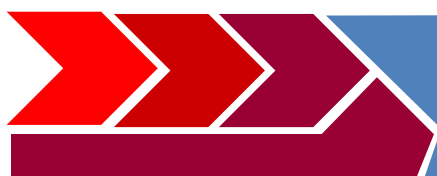
Lolak, 22 Maret 2024
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW

Ir. LIMI MOKODOMPIT, MM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Bab I : Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.1.1 Undang-undang Pembentukan Daerah	1
1.1.1.2 Data Geografis Wilayah	1
1.1.1.3 Jumlah Penduduk	11
1.1.1.4 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	13
1.1.1.5 Jumlah Perangkat Daerah, Unit Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	18
1.1.1.6 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	27
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	29
1.1.2.1 Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah-	29
1.1.2.1.1 Permasalahan Pembangunan	29
1.1.2.1.2 Visi Misi Kepala Daerah	39
1.1.2.1.3 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	45
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	161
1.1.3.1.1 SPM Pendidikan.....	165
1.1.3.1.2 SPM Kesehatan	172
1.1.3.1.3 SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	185
1.1.3.1.4 SPM Perumahan dan Kawasan Permukiman	188
1.1.3.1.5 SPM Trantibum, Linmas	190
1.1.3.1.6 SPM Sosial	193
Bab II : Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	199
2.1 Capaian Kinerja Makro	199
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	200
2.1.2 Angka Kemiskinan	203
2.1.3 Angka Pengangguran	206
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	206
2.1.5 Pertumbuhan Per Kapita	210
2.1.6 Ketimpangan Pendapatan	212
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	214
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	214
2.3.1 Pengukuran Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2023.....	214
2.3.2 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Tahun 2023	217
2.3.3 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya	256

2.3.4 Analisis Capaian IKU dan Program Pendukung Sasaran Strategis -----	258
Bab III : Capaian Kinerja Tugas Pembantuan -----	263
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan daerah -----	264
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan daerah -----	264
3.2.1 Target Kinerja -----	265
3.2.2 Realisasi -----	266
Bab IV : Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal -----	271
4.1 Urusan Pendidikan -----	272
4.2 Urusan Kesehatan -----	274
4.3 Urusan Pekerjaan Umum -----	280
4.4 Urusan Perumahan Rakyat -----	282
4.5 Urusan Trantibum dan Linmas -----	286
4.6 Urusan Sosial -----	292
Bab V : Penutup -----	306



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

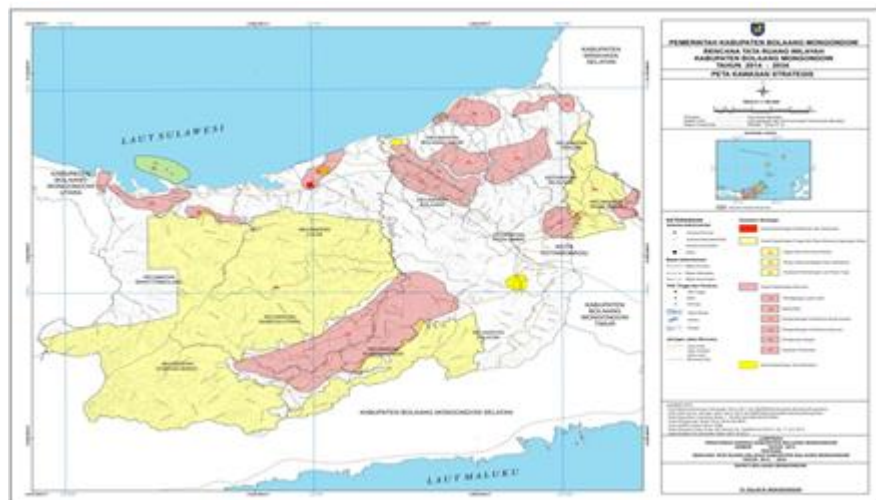
1.1.1.1 Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan salah satu daerah otonom dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).

1.1.1.2 Data Geografis Wilayah

Gambar 1.1

Peta Administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow



Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Ibukota Lolak, secara Astronomis terletak pada posisi $123^{\circ} - 124^{\circ}$ Bujur Timur dan $00^{\circ} 15'46'' - 01^{\circ} 15'46''$ Lintang Utara, dengan posisi:

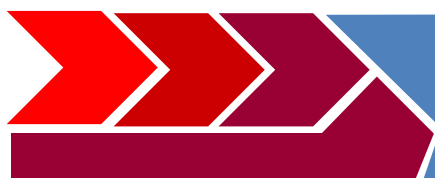
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Kabupaten Bolaang Mongondow secara administratif terbagi kedalam 12 Kecamatan, kemudian diresmikannya 3 (tiga) Kecamatan baru pada akhir Tahun 2012 sehingga menjadi 15 (lima belas) Kecamatan dan 200 desa definitif, serta 2 Kelurahan hingga saat ini. Adapun luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai data Badan Pusat Statistik pada Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Angka Tahun 2023 mencapai 2.871,65 km², dan dari data jumlah penduduk Tahun 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow mencapai ± 254.945 jiwa.

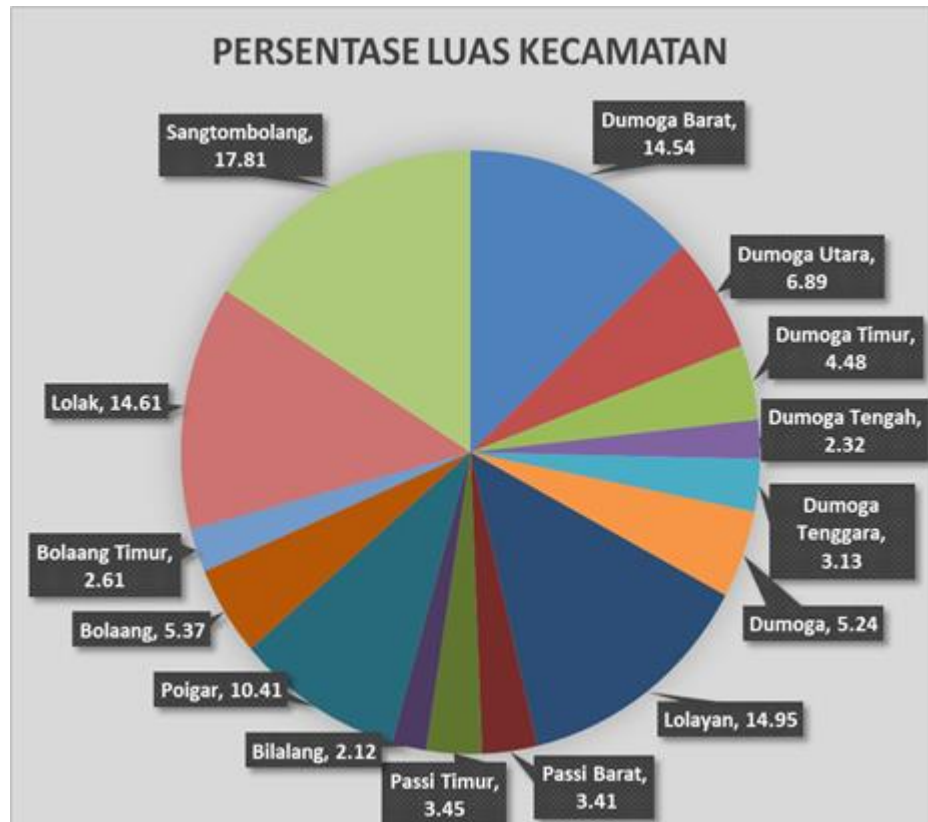
Tabel 1.1
Kecamatan dan Luas Wilayah

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ² /sq.km)
Dumoga Barat	Doloduo	417,53
Dumoga Utara	Mopuya Utara	197,74
Dumoga Timur	Modomang	128,76
Dumoga Tengah	Ibolian	66,57
Dumoga Tenggara	Konarom	89,83
Dumoga	Pusian	150,58
Lolayan	Tungoi	429,37
Passi Barat	Passi	97,99
Passi Timur	Pangian	99,14
Bilalang	Bilalang IV	60,93
Poigar	Poigar	298,96
Bolaang	Kelurahan Inobonto	154,24
Bolaang Timur	Tadoy	74,96
Lolak	Lolak	419,41
Sangtombolang	Maelang	511,46

Sumber : BPS 2024



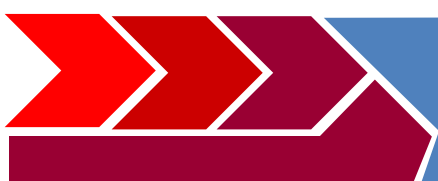
Gambar 1.2
Persentase Luas Wilayah Per Kecamatan



Sumber: BPS 2024

➤ **Kondisi Topografi**

Keadaan topografi Kabupaten Bolaang Mongondow cukup bervariasi dari daerah yang dataran rendah, bergelombang, berbukit serta bergunung dengan tingkat kemiringan antara 0% - 45% serta mempunyai ketinggian bervariasi pula antara 0 – 650 meter di atas permukaan laut. Sementara yang terendah atau ketinggiannya 0 - 2 meter dari permukaan laut umumnya terdapat pada kecamatan yang terletak disepanjang pesisir pantai utara Kabupaten Bolaang Mongondow. Jalur gunung membentang dari timur ke barat pada bagian utara yang mengapit Dataran Dumoga dan Dataran Mongondow. Terdapat 5 gunung di Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana yang tertinggi adalah gunung Kabela terletak di Kecamatan Lolak dengan ketinggian 1.732 meter, sedangkan yang terendah adalah gunung Kapaya terletak di Kecamatan Bolaang dengan ketinggian 1.331 meter.



Tabel 1.2
Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow

KECAMATAN	TINGGI WILAYAH (mdpl)	JARAK IBUKOTA KABUPATEN
Dumoga Barat	152	110
Dumoga Utara	147	87
Dumoga Timur	125	100
Dumoga Tengah	144	88
Dumoga Tenggara	148	89
Dumoga	152	79
Lolayan	182	62
Passi Barat	340	64
Passi Timur	547	67
Bilalang	387	69
Poigar	6	49
Bolaang	5	19
Bolaang Timur	3	21
Lolak	8	3
Sangtombolang	5	34

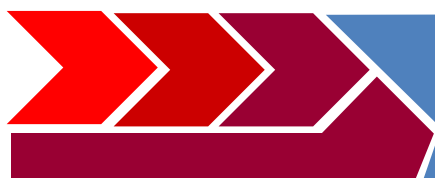
Sumber : Bolaang Mongondow Dalam Angka 2023

➤ **Kondisi Klimatologi**

Kabupaten Bolaang Mongondow terletak pada lintasan garis Katulistiwa, sehingga hanya mengenal dua musim saja yaitu musim kemarau dan musim hujan yang selalu basah dan banyak hujan sebagaimana umumnya wilayah tropis. Curah hujan di daerah ini cukup tinggi per tahun dan suhu bervariasi antara 20°C – 32°C. Curah hujan tertinggi umumnya terjadi dari pada Bulan Januari mencapai 524 mm dan terendah pada Bulan Juli yaitu 5 mm, kondisi ini berbeda dengan kondisi tahun 2018 yang mempunyai curah hujan yang cukup tinggi hingga mencapai 680 mm dan kondisi terendah hingga mencapai 81 mm.

➤ **Kondisi Geologi**

Menurut hasil penelitian Kementerian ESDM (2004), bagian dari kawasan Indonesia Timur termasuk Bolaang Mongondow, secara geologi memiliki karakteristik yang lebih kompleks dan rumit bila dibandingkan dengan



kawasan Indonesia Barat. Ini dikarenakan kawasan timur Indonesia merupakan pertemuan dari lempeng-lempeng litosfera : Eurasia yang relatif stabil di bagian barat laut, Lempeng Indo-Australia di bagian barat dan barat daya yang bergerak relatif ke timur laut, Lempeng Pasifik di bagian timur yang bergerak ke barat laut dan Lempeng Filipina Barat di bagian timur laut yang bergerak ke arah barat.

Gambar 1.3
Peta Geologi Kabupaten Bolaang Mongondow

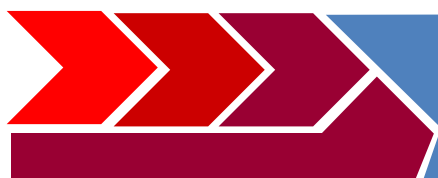


Sumber: RTRW Bolaang Mongondow, 2014-2034

Bagian timur laut Sulawesi merupakan akibat perputaran searah jarum jam dari lempeng kecil bagian barat daya Sulawesi dan Kalimantan pada masa lalu yang diikat pada bagian barat daya oleh sistem busur pada sesar-sesar mendatar mengiris, dan penolakan dasar laut Sulawesi di utara oleh adanya penunjangan di Parit Sulawesi Utara.

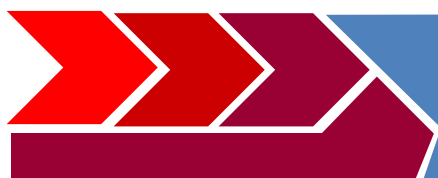
Berdasarkan peta Geologi di atas Formasi Geologi yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari :

- Qal : Aluvium dan Endapan Pantai terdiri dari material berupa pasir, lempung, lumpur, kerikil dan kerakal.
- Qav : Batuan Gunung Api Ambang yang terdiri dari material tuf; aglomerat, lahar lava dan endapan belerang didalam kawah, tuf berwarna kelabu muda, lava pejal, bersusunan hipersenten-hornblenda dan

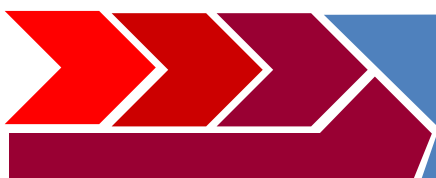


andesit hornblende. Gunung Api Ambang masih aktif, berbentuk strato dengan lima lapangan fumarola.

- Ql : Batu gamping Terumbu; Batu gamping terumbu terangkat dan batu gamping klastik dengan komponen utama koral, setempat berlapis.
- Qpl : Endapan Danau; satuan ini dikuasai oleh batu lempung kelabu, setempat mengandung sisa tumbuhan dan lignit. Batu pasir berbutir halus sampai kasar serta kerikil dijumpai di beberapa tempat. Satuan ini termampatkan lemah tebalnya menurut data bor mencapai 94 m.
- TQpv : Batuan Gunung api Pinogu; satuan ini terdiri atas Tuf, tuf lapili, breksi dan lava. Breksi gunung api di Pegunungan Bone, G. Mongadalia dan Pusian bersusunan andesit piroksin dan dasit. Tuf yang tersingkap di G. Lemimbut dan G. Lolombulan umumnya berbatu apung, kuning muda berbutir sedang sampai kasar, diselingi oleh lava bersusunan menengah sampai basa. Tuf dan Tuf Lapili di sekitar S. Bone bersusunan dasitan, Lava berwarna kelabu muda hingga kelabu tua, umumnya bersusun andesit piroksin. Satuan ini secara umum termampatkan lemah sampai sedang, umumnya diduga berumur Pliosen hingga Plistosen.
- QTs : Molasa Selebes merupakan endapan pasca orogen yang terbentuk di cekungan-cekungan kecil, terdiri atas konglomerat, breksi serta batupasir, umumnya termampatkan lemah. Konglomerat dan breksi tersusun oleh beranekan bahan komponen berupa kepingan andesit, basal, granit, granodiorit, batu gamping, batu pasir maupun kuarsa. Satuan ini menunjukkan kemiringan landai hingga 30°, tebalnya mencapai beberapa puluh meter, dan berumur sekitar Pliosen-Plistosen.



- Tpwv : BREKSI WOBUDU : Breksi gunung api, aglomerat, tuf, tuf lapili, dan lava. Breksi gunung api berwarna kelabu, tersusun oleh kepingan andesit dan basal berukuran kerikil sampai bongkah. Tuf dan tuf lapili berwarna kuning kecoklatan, berbutir halus sampai kerikil, umumnya lunak dan berlapis. Lava berwarna kelabu. bersusunan andesit sampai basal. Satuan ini menindih tak selaras Formasi Dolokapa yang berumur Miosen Tengah hingga Plistosen Akhir. Tebal satuan sekitar 1000 - 1500 meter.
- Tmts : Formasi Tapadaka terdiri dari Batupasir, grewake, batu pasir terkarsikan dan serpih. Batu pasir berwarna kelabu muda hingga tua dan hijau, berbutir halus sampai kasar, mengandung batuan gunungapi hijau dan serpih merah, setempat-setempat gampingan. Batu pasir yang tersingkap di S. Tapadaka mengandung urat kalsit 0,5 – 1 m. Grewake berbutir halus sampai kasar, bersudut sampai membulat tanggung, pejal, tersusun oleh plagioklas, augit, kuarsa, dan sedikit hematit dan magnetit. Batu pasir yang tersingkap di sebelah selatan Macia terkarsikan, hijau, kompak, mengandung feldspar, sedikit pirit dan kalkopirit.
- Tmtl : Anggota Batugamping Formasi Tapadaka: Batu gamping kelabu terang, pejal, mengandung pecahan batuan gunung api hijau. Batugamping ini sebagian membentuk lensa-lensa di dalam Formasi Tapadaka dan sebagian terlihat berganti fasies ke arah samping menjadi batupasir. Fosil-fosil yang dikandungnya adalah *Lepidocyclina* (*Eulepidina*) sp. Umur satuan ini diperkirakan Miosen Awal hingga Miosen Akhir.
- Tmbl : Anggota Batu gamping Batuan Gunungapi Bilungala Batu gamping Tmbl kelabu mengandung fosil *Lepidocyclina sumatransis* (BRADY). Kumpulan fosil tersebut menunjukkan umur Miosen Awal - Miosen



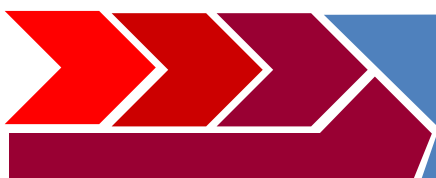
Akhir (Kadar. D.C. hubungan tertulis, 1972).
Tets : Formasi Tinombo Fasies Sedimen (Ahlburg. 1913) : Satuan ini mengandung Serpih dan batupasir dengan sisipan batu gamping dan rijang. Serpih kelabu dan merah, getas, sebagian gampingan; rijang mengandung radiobria. Batu pasir berupa greiwake dan batupasir kuarsa. kelabu dan hijau. pejal. berbutir halus sampai sedang. sebagian mengandung, pirit. Sisipan batugamping di S. Mayambak berwarna merah, pejal, berlapis baik. Satuan batuan ini diterobos oleh granit, diorit dan trakit seperti yang terlihat di S. Bayau. Satuan ini mempunyai hubungan menjemari dengan Formasi Tinombo fasies gunung api.

➤ **Kondisi Hidrologi**

Deretan gunung-gunung yang berada di kawasan Bolaang Mongondow membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS). Wilayah Sungai yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Wilayah sungai lintas provinsi Dumoga-Sangkub yang meliputi DAS Dumoga, Sangkub, Buyat, Lomboit, Andagile, Bulawa, dan Tuliawa; dan Wilayah sungai lintas kabupaten berupa rencana pengembangan WS Poigar - Ranoyapo yang meliputi DAS Poigar dan DAS Ranoyapo.

Cekungan Air Tanah (CAT) yang terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow adalah CAT Lolak dan CAT Dumoga – Kosio yang merupakan CAT dalam 1 kabupaten dan CAT Sidate – Poigar yang merupakan CAT Lintas Propinsi. Jaringan terdiri atas:

- a. Bendungan, meliputi: Bendungan Torout dengan kapasitas 11,70 m³/dtk untuk pelayanan 7.803 ha, Bendung Kosinggolan dengan kapasitas 8,07 m³/dtk untuk pelayanan 5.381 ha, Bendungan Ayong – Maelang untuk pelayanan kurang lebih 2.293 ha, Bendungan Pusian – Molong untuk pelayanan kurang lebih 1.171 ha, Bendungan Lolak – Pinogaluman untuk pelayanan kurang lebih 2.040 ha, Bendungan Katulidan – Sinantakan di Bolaang Mongondow dan Kotamobagu untuk pelayanan kurang lebih 650 ha



dan Bendungan Poigar untuk pelayanan kurang lebih 1.000 ha dan rencana pengembangan Bendungan Lolak dengan kapasitas kurang lebih 12.400.000 m³ untuk pelayanan kurang lebih 2.500 ha;

- b. Daerah irigasi, meliputi: DI kewenangan nasional dan DI kewenangan propinsi yang ada di kabupaten, Saluran irigasi nasional, yaitu Saluran Irigasi Primer yang terdiri atas: Saluran Irigasi Primer Torout Kiri sepanjang kurang lebih 29,32 km; Saluran Irigasi Primer Torout Kanan sepanjang kurang lebih 4,56 km; dan Saluran Irigasi Primer Kosinggolan sepanjang kurang lebih 33,22 km.
- c. Saluran irigasi propinsi, meliputi:
 1. Saluran Irigasi Primer, meliputi: Saluran Irigasi Primer Torout Kanan sepanjang kurang lebih 4,56 km, Saluran Irigasi Primer Ayong – Maelang sepanjang kurang lebih 1,85 km, Saluran Irigasi Primer Pusian sepanjang kurang lebih 1,92 km, Saluran Irigasi Primer Lolak – Pinogaluman sepanjang kurang lebih 5,76 km, Saluran Irigasi Primer Katulidan – Sinantakan di Kotamobagu dan Bolaang Mongondow sepanjang kurang lebih 0,768 km dan Saluran Irigasi Primer Poigar sepanjang kurang lebih 1,35 km; dan
 2. Saluran irigasi sekunder, meliputi: Saluran Irigasi Sekunder Ayong - Maelang sepanjang kurang lebih 15,62 km, Saluran Irigasi Sekunder Pusian-Molong sepanjang kurang lebih 19,55 km, Saluran Irigasi Sekunder Lolak-Pinogaluman sepanjang kurang lebih 6,54 km, Saluran Irigasi Sekunder Katulidan-Sinantakan di Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu sepanjang kurang lebih 3,47 km, Saluran Irigasi Sekunder Poigar sepanjang kurang lebih 6,85 km, Saluran Irigasi Sekunder Torout sepanjang kurang lebih 37,405 km dan Saluran Irigasi Sekunder Kosinggolan sepanjang kurang lebih 14,594 km.

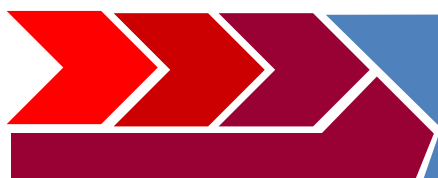
Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki 6 sungai, dengan sungai terpanjang yaitu sungai Dumoga, mengalir sepanjang 87,2 Km dan yang terpendek adalah sungai Moyosiboi dengan panjang 11,2 Km. Selain sungai, terdapat 3 Danau dimana yang terluas adalah danau



liloi sebesar 52 Ha dan yang terkecil adalah danau Paya-paya sebesar 15 Ha.

➤ **Kondisi Geografis Lainnya**

Posisi Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan pintu masuk dan keluar dari wilayah Bolaang Mongondow bersatu menuju ibukota propinsi Sulawesi Utara. Ini merupakan posisi yang sangat strategis bagi pelaku bisnis dan investor. Selain berada tepat dijalur darat Koridor Sulawesi yang memiliki potensi dan mobilitas ekonomi yang tinggi, Kabupaten Bolaang Mongondow juga mempunyai jalur laut yang sedang berkembang dan akan terus ditingkatkan. Pelabuhan Laut Labuan Uki adalah Jalur Laut baru, ini adalah pintu masuk dan keluarnya barang ke wilayah Bolaang Mongondow Bersatu, yang lebih dekat dibandingkan dengan Pelabuhan Laut Bitung. Demikian juga keberadaan Bandar Udara yang tahapan pembangunannya terus dilakukan hingga tahun 2024. Dalam mendukung kedua bidang transportasi tersebut Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow juga membangun Terminal transportasi darat tipe A yang berfungsi mengumpulkan atau mendistribusikan arus transformasi dari dan kedua bidang transportasi tersebut diatas, maupun ke antar Kabupaten dan propinsi lainnya. Tinggi wilayah diatas permukaan laut (DPL) antar kecamatan sangat bervariasi. Kecamatan Poigar, Bolaang, Bolaang timur, Lolak dan Sang Tombolang rata-rata relatif hanya 0-20 meter diatas permukaan laut. Kecamatan Passi Timur adalah kecamatan yang DPL-nya relative paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu setinggi 630 meter, diikuti dengan Kecamatan Bilalang dengan tinggi 500 meter diatas permukaan laut. Tinggi wilayah diatas permukaan laut setiap kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow menurut kecamatan ditunjukkan pada gambar dibawah ini. Kecamatan Passi Barat dan Kecamatan Lolayan memiliki rata-rata dpl masing-masing 450 dan 350 meter diatas permukaan laut. Untuk Kecamatan Dumoga Barat, Kecamatan Dumoga Timur, Kecamatan Dumoga Utara rata-rata mencapai 150 meter diatas permukaan laut. Ketiga wilayah kecamatan tersebut dikenal sebagai



wilayah penghasil beras atau lumbung beras di Kabupaten Bolaang Mongondow.

1.1.1.3 Jumlah Penduduk

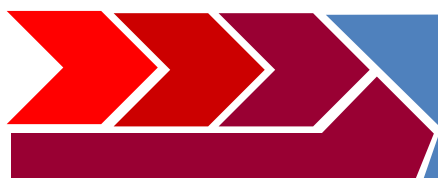
Berdasarkan rilis data yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, laju perkembangan penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 Sebesar 275.676 jiwa dan pada tahun 2018 ada penurunan jumlah penduduk menjadi 246,766 jiwa, kemudian terjadi kenaikan jumlah penduduk rentang tahun 2019 hingga tahun 2021 menjadi sebesar 252.011 jiwa. Kondisi tersebut terus meningkat meskipun tidak terlalu signifikan dimana tahun 2022 jumlah penduduk menjadi 252.808. 2023 254.945 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow terus melakukan pembersihan data ganda dan data anomaly pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Adapun komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan sex ratio di Kabupaten Bolaang Mongondow selang beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.3
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Dan Sex Ratio di Kabupaten Bolaang Mongondow
2017-2023

TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SEX RASIO
YEAR	MALE	FEMALE	TOTAL	SEX RATIO
2017	143.349	132.327	275.676	108,33
2018	128.435	118.331	246.766	108,54
2019	130.620	120.163	250.783	108,70
2020	131.097	120.438	251.535	108,85
2021	131.335	120.676	252.011	108,83
2022	131.654	121.154	252.808	108,67
2023	132.717	122.228	254.945	108,58

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024



Rata-rata pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Jika dibandingkan dengan Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2020 pertumbuhan penduduk mencapai 0,38 dan Pertumbuhan penduduk selang 2021 naik menjadi sebesar 0,69. Sementara Tahun 2022 bertumbuh sebesar 0,87. Dan ditahun 2023 pertumbuhan sedikit menurun hingga mencapai 0,84 persen. Secara umum bisa disimpulkan bahwa program terkait dengan pengendalian jumlah penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow terus dioptimalkan. Kondisi ini juga menunjukkan adanya perpindahan penduduk dari wilayah Bolaang Mongondow ke daerah lainnya karena dipengaruhi oleh faktor kelahiran anak, kedatangan penduduk dan pekerjaan.

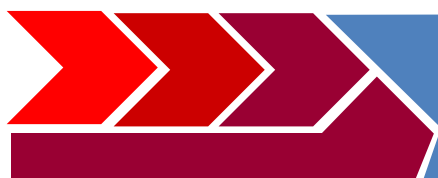
Laju pertumbuhan penduduk selang 6 (enam) tahun terakhir di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.4
Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2018-2023

PERIODE	PERTUMBUHAN
1	2
2018	1.53
2019	1,48
2020	0,38
2021	0,69
2022	0,87
2023	0,84

Sumber: Data Olahan Bappeda 2024

Usia penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 yang terbagi kedalam kelompok umur, dapat dijelaskan bahwa Kelompok umur yang mendominasi jumlah penduduk yaitu 15 – 19 tahun yang mencapai 9,26 % diikuti kelompok umur 20 – 24 tahun yaitu 9,12% kemudian disusul kelompok umur 25 – 29 tahun dengan capaian 8,28%. Sementara Kelompok Umur terendah pada usia 70 – 74 tahun yaitu mencapai 2,01%.



Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Menurut
Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Kelompok Umur	Jumlah		
	L	P	Total
0 - 4	7.041	6.766	13.807
05-09	10.203	9.564	19.767
10-14	10.727	9.857	20.584
15 - 19	12.277	11.334	23.611
20 - 24	12.214	11.032	23.246
25 - 29	11.083	10.017	21.100
30 - 34	9.407	8.190	17.597
35-39	8408	7827	16.235
40-44	9983	9081	19.064

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil, Kab. Bol-Mong, 2024

1.1.1.4 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

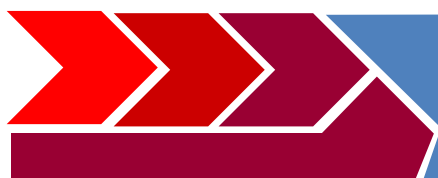
Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari 15 Kecamatan dan 200 Desa dan 2 Kelurahan. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.6
Jumlah Kecamatan dan Desa
Kabupaten Bolaang Mongondow

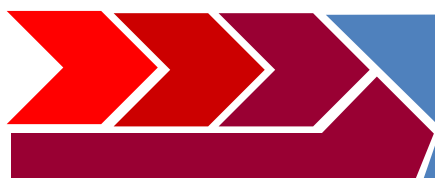
No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Bilalang	1. Bilalang III 2. Bilalang IV 3. Tudu Aog 4. Tudu Aog baru 5. Kolingangaan 6. Bilalang III Utara 7. Bilalang Baru 8. Apado
2.	Bolaang	1. Komangaan 2. Solimandungan Baru 3. Solimandungan Dua 4. Solimandungan I 5. Bangomolunow 6. Langagon II 7. Langagon I 8. Langagon



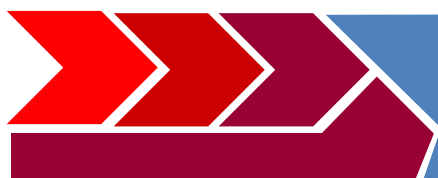
		<ul style="list-style-type: none"> 9. Inobonto I 10. Inobonto 11. Inobonto II
3.	Dumoga Utara	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tumokang Baru 2. Mopugad Utara 3. Mopugad Selatan 4. Mopuya Utara 5. Mopuya Selatan 6. Dondomon 7. Mopugad Utara I 8. Mopugad Utara II 9. Mopugad Selatan I 10. Mopuya Utara I 11. Mopuya Utara II 12. Mopuya Selatan I 13. Mopuya Selatan II 14. Dondomon Utara 15. Dondomon Selatan 16. Tumokang Timur
4.	Passi Barat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Muntoi 2. Poyuyanan 3. Lobong 4. Passi 5. Bulud 6. Otam 7. Wangga 8. Inuai 9. Passi II 10. Muntoi Timur 11. Otam Barat 12. Wangga I 13. Bintau
5.	Dumoga Tenggara	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bonawang 2. Tapadaka I 3. Tapadaka Utara 4. Tapadaka Timur 5. Konarom 6. Konarom Barat 7. Konarom Utara 8. Osion 9. Ikuna 10. Dumara



6.	Dumoga Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tonom 2. Mogoyunggung 3. Modomang 4. Kembang Mertha 5. Dumoga 6. Pinonobatan 7. Dumoga II 8. Pinonobatan Barat 9. Amertha Sari 10. Kembang Sari 11. Amertha Buana 12. Mogoyunggung I 13. Moguyunggung II 14. Dumoga III 15. Dumoga IV
7.	Lolak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Totabuan 2. Pindol 3. Solog 4. Tandu 5. Lolak 6. Motabang 7. Mongkoinit 8. Labuan Uki 9. Pinogaluman 10. Sauk 11. Lalow 12. Buntalo 13. Bumbung 14. Baturapa 15. Tuyat 16. Pindolili 17. Lolak Tombolango 18. Lolak II 19. Buntalo Timur 20. Buntalo Selatan 21. Baturapa II 22. Diat 23. Pinogaluman Timur 24. Mongkoinit Barat 25. Dulangon 26. Padang Lalow



8.	Passi Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pangian 2. Poopo 3. Manembo 4. Insil 5. Mobuya 6. Insil Baru 7. Pangian Tengah 8. Pangian Barat 9. Poopo Barat 10. Poopo Selatan 11. Sinsingon Barat 12. Sinsingon Timur
9.	Lolayan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanoyan Selatan 2. Bombonan 3. Abak 4. Tapa Aog 5. Mopusi 6. Matali Baru 7. Bakan 8. Tungoi 9. Lolayan 10. Mopait 11. Kopandakan II 12. Tanoyan Utara 13. Tungoi 14. Mengkang
10.	Dumoga Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibolian 2. Ibolian II 3. Kinomaligan 4. Kosio 5. Kosio Timur 6. Kosio Barat 7. Werdhi Agung 8. Werdhi Agung Selatan 9. Werdhi Agung Utara 10. Werdhi Agung Timur
11.	Bolaang Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambang I 2. Ambang II 3. Tadoy 4. Bolaang 5. Bantik 6. Lolan



		<ol style="list-style-type: none"> 7. Tadoy I 8. Bolaang I 9. Lolan II
12.	Sang Tombolang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ayong 2. Babo 3. Bolangat 4. Maelang 5. Domisil Moonow 6. Pangi 7. Lolanan 8. Cempaka 9. Batu Merah 10. Pangi Timur 11. Bolangat Timur 12. Pasir Putih
13.	Dumoga Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matayangan 2. U'uan 3. Ikhwan 4. Doloduo 5. Wangga Baru 6. Toraut 7. Mekaruo 8. Toraut Utara 9. Doloduo I 10. Doloduo II 11. Doloduo III 12. Toraut Tengah
14.	Poigar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mariri Lama 2. Mariri Baru 3. Nonapan II 4. Nonapan I 5. Wineru 6. Gogaluman 7. Poigar I 8. Nanasi 9. Pomoman 10. Tiberias 11. Mondatong 12. Poigar II 13. Poigar III 14. Mariri II 15. Mariri I



		16. Nonapan Baru 17. Nanasi Timur 18. Nonapan 19. Tanjung Mariri 20. Mondatong Baru
15.	Dumoga	1. Serasi 2. Kanaan 3. Toruakat 4. Pusian 5. Ponompiaan 6. Mototabian 7. Bumbungon 8. Siniung 9. Siniung I 10. Dumoga I 11. Pusian Selatan 12. Pusian Barat

1.1.1.5 Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari 48 Perangkat Daerah dengan jumlah Aparatur Sipil Negara sebanyak 4.399 orang (terdiri dari 3.682 orang PNS dan 717 orang PPPK), dari keseluruhan Aparatur Sipil Negara yang ada 1 orang PNS diperbantukan di instansi vertikal yaitu pada Badan Narkotika Nasional. Untuk rincian pada perangkat daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.7
Jumlah Perangkat Daerah dan Jumlah Aparatur Sipil Negara
Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Jumlah PNS
1.	Sekretariat Daerah	114
	- Sekretaris Daerah	0
	- Staf Ahli Bupati	3
	- Asisten Sekda	3
	- Bagian Tata Pemerintahan	8
	- Bagian Kesejahteraan Rakyat	11



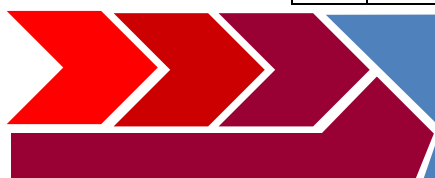
	- Bagian Hukum	11
	- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	9
	- Bagian Administrasi Pembangunan	9
	- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	13
	- Bagian Organisasi	7
	- Bagian Umum Setda	17
	- Bagian Perencanaan dan Keuangan	10
	- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	13
2.	Sekretariat DPRD	30
3.	Badan Keuangan Daerah	59
4.	Dinas Perhubungan	31
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika	21
6.	Dinas Sosial	22
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26
9.	Dinas Pertanian	122
	- Dinas Pertanian	51
	- BPP Kecamatan Poigar	5
	- BPP Kecamatan Bolaang Timur	4
	- BPP Kecamatan Bolaang	5
	- BPP Kecamatan Lolak	7
	- BPP Kecamatan Sang Tombolang	2
	- BPP Kecamatan Bilalang	5
	- BPP Kecamatan Passi Timur	4
	- BPP Kecamatan Passi Barat	4
	- BPP Kecamatan Lolayan	7
	- BPP Kecamatan Dumoga	7
	- BPP Kecamatan Dumoga Timur	5
	- BPP Kecamatan Dumoga Tengah	4
	- BPP Kecamatan Dumoga Barat	3
	- BPP Kecamatan Dumoga Utara	4
	- BPP Kecamatan Dumoga Tenggara	5
10.	Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral	24
11.	Dinas Koperasi dan UKM	16
12.	Dinas Perikanan	22



13.	Dinas Pemuda dan Olahraga	15
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	16
15.	Dinas Perkebunan	16
16.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	15
17.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	78
18.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	18
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21
20.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21
21.	Dinas Ketahanan Pangan	23
22.	Dinas Lingkungan Hidup	18
23.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28
26.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	35
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20
29.	Inspektorat Daerah	44
30.	Satuan Polisi Pamong Praja	20
31.	Dinas Kesehatan	575
	- Dinas Kesehatan	48
	- UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan	1
	- UPTD Gudang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	3
	- UPTD Unit Transfusi Darah PMI	4
	- Poliklinik Setda	0
	- UPTD Puskesmas Tungoi	37
	- UPTD Puskesmas Tanoyan	31
	- UPTD Puskesmas Pangian	37
	- UPTD Puskesmas Passi Barat	34
	- UPTD Puskesmas Bilalang	22
	- UPTD Puskesmas Inobonto	17
	- UPTD Puskesmas Tadoy	24



	- UPTD Puskesmas Komangaan	19
	- UPTD Puskesmas Poigar	34
	- UPTD Puskesmas Lolak	26
	- UPTD Puskesmas Buntalo	15
	- UPTD Puskesmas Maelang	23
	- UPTD Puskesmas Mopuya	51
	- UPTD Puskesmas Imandi	29
	- UPTD Puskesmas Pusian	26
	- UPTD Puskesmas Doloduo	34
	- UPTD Puskesmas Werdhi Agung	30
	- UPTD Puskesmas Konarom	30
32.	RSU Datoe Binangkang	301
33.	Kantor Camat Lolayan	35
34.	Kantor Camat Passi Timur	29
35.	Kantor Camat Passi Barat	33
36.	Kantor Camat Bilalang	22
37.	Kantor Camat Dumoga Barat	19
38.	Kantor Camat Dumoga Tengah	10
39.	Kantor Camat Dumoga Utara	17
40.	Kantor Camat Dumoga Tenggara	9
41.	Kantor Camat Dumoga Timur	10
	- Kantor Lurah Imandi	6
42.	Kantor Camat Dumoga	18
43.	Kantor Camat Poigar	21
44.	Kantor Camat Bolaang	18
	- Kantor Lurah Inobonto 1	6
45.	Kantor Camat Bolaang Timur	10
46.	Kantor Camat Lolak	13
47.	Kantor Camat Sang Tombolang	18
48.	Dinas Pendidikan	2.285
	- Dinas Pendidikan	72
	- Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	11
	- Satuan Pendidikan Kecamatan Lolayan	282
	- Satuan Pendidikan Kecamatan Passi Barat	175
	- Satuan Pendidikan Kecamatan Passi Timur	126
	- Satuan Pendidikan Kecamatan Bilalang	83
	- Satuan Pendidikan Kecamatan Dumoga	0

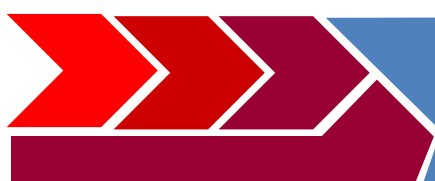


- Satuan Pendidikan Kecamatan Dumoga Timur	329
- Satuan Pendidikan Kecamatan Dumoga Tengah	4
- Satuan Pendidikan Kecamatan Dumoga Barat	233
- Satuan Pendidikan Kecamatan Dumoga Utara	190
- Satuan Pendidikan Kecamatan Dumoga Tenggara	4
- Satuan Pendidikan Kecamatan Bolaang	162
- Satuan Pendidikan Kecamatan Bolaang Timur	77
- Satuan Pendidikan Kecamatan Poigar	188
- Satuan Pendidikan Kecamatan Lolak	251
- Satuan Pendidikan Kecamatan Sang Tombolang	98

Jumlah Aparatur Sipil Negara seluruhnya 4.399 terdiri dari 369 orang pejabat struktural, 3.151 orang pejabat fungsional dan 879 orang staf pelaksana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.8
Jumlah Jabatan Struktural
Tahun 2023

No	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II A	0
2.	Eselon II B	37
3.	Eselon III A	51
4.	Eselon III B	105
5.	Eselon IV A	140
6.	Eselon IV B	36
TOTAL		369

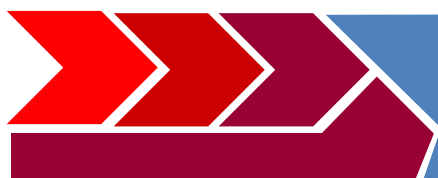


Tabel 1.9
Jumlah Jabatan Fungsional
Tahun 2023

NO	Jabatan	Jumlah
1.	Kesehatan :	781
	- Dokter Spesialis	15
	- Dokter Umum	37
	- Dokter Gigi	5
	- Perawat	320
	- Perawat Gigi	29
	- Bidan	197
	- Nutrisionis	47
	- Sanitarian	39
	- Penyuluh Kesehatan Masyarakat	19
	- Perekam Medis	1
	- Pembimbing Kesehatan Kerja	1
	- Epidemiolog Kesehatan	9
	- Administrator Kesehatan	8
	- Apoteker	16
	- Asisten Apoteker	10
	- Pranata Laboratorium Kesehatan	6
	- Radiografer/Radiolog	7
	- Fisioterapis	5
	- Teknisi Elektromedis	1
	- Teknisi Transfusi Darah	2
	- Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	2
	- Asisten Penata Anestesi	1
	- Terapis Gigi dan Mulut	4
2.	Pendidikan	2.104
	- Guru	2.064
	- Pengawas Sekolah	34
	- Penilik Sekolah	0
	- Pamong Belajar	6
3.	Lainnya :	266
	- Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi	2
	- Analis Data Ilmiah	1
	- Analis Kebijakan	30
	- Analis Kepegawaian	4



-	Analisis Ketahanan Pangan	7
-	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	3
-	Analisis Pasar Hasil Pertanian	1
-	Analisis Pemanfaatan IPTEK	1
-	Arsiparis	3
-	Asesor Manajemen Mutu Industri	4
-	Auditor	20
-	Inspektur Minyak dan Gas	0
-	Instruktur	2
-	Manggala Informatika	1
-	Mediator Hubungan Industrial	3
-	Pelatih Olahraga	4
-	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	10
-	Penata Ruang	3
-	Pengamat Tera	2
-	Pengantar Kerja	1
-	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	1
-	Pengawas Benih Tanaman	1
-	Pengawas Koperasi	3
-	Pengawas Lingkungan Hidup	4
-	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	2
-	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)	6
-	Pengelola Kesehatan Ikan	1
-	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	4
-	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	1
-	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	0
-	Penggerak Swadaya Masyarakat	12
-	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1
-	Penguji Mutu Barang	1
-	Penjamin Mutu Barang	1
-	Penyidik Bumi	0
-	Penyuluh Perikanan	6



- Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	1
- Penyuluh Pertanian	82
- Penyuluh Sosial	4
- Perancang Peraturan Perundang-undangan	3
- Perencana	17
- Pustakawan	2
- Sandiman	1
- Statistisi	1
- Teknik Jalan dan Jembatan	3
- Teknik Pengairan	1
- Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	5
TOTAL	3.151

Tabel 1.10
Jumlah Jabatan Pelaksana

No	Jabatan	Jumlah
1.	- Analis Bangunan dan Perumahan	1
	- Analis Ekonomi	1
	- Analis Intelijen Taktis	1
	- Analis Kelembagaan	1
	- Analis Kepemudaan	1
	- Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2
	- Analis Laporan Keuangan	1
	- Analis Pengembangan Kompetensi	3
	- Analis Pengembangan SDM Aparatur	1
	- Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	5
	- Analis Permasalahan Hukum	2
	- Analis Sistem Informasi	4
	- Calon Guru	49
	- Calon Teknik Jalan dan Jembatan	3
	- Calon Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	4
	- Operator Komputer	1
	- Pemelihara Peralatan	1
	- Penata Laporan Keuangan	1



- Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik	4
- Penjaga Sekolah	1
- Penyusun Bahan Kebijakan	1
- Penyusun Rancangan Perundang-undangan	2
- Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	1
- Pranata Alat Persandian	3
- Pengadministrasi Umum / Admistrasi / Teknis Lainnya / Pelaksana'	785
TOTAL	879

Tabel 1.11
Jumlah ASN Menurut Golongan
Tahun 2023

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	884
2.	Golongan III	2.955
3.	Golongan II	554
4.	Golongan I	6
TOTAL		4.399

Tabel 1.12
Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2023

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 3 / S3	3
2.	Strata 2 / S2	171
3.	Strata 1 / S1	2.783
4.	Diploma IV	117
5.	Diploma III	440
6.	Diploma II	109
7.	Diploma I	20
8.	SLTA / Sederajat	748
9.	SLTP / Sederajat	7
10.	SD / Sederajat	1
TOTAL		4.399



1.1.1.6 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.13
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
PENDAPATAN DAERAH	1.081.580.849.460,00	1.088.935.653.989,91	100,68	1.064.053.609.385,01
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58.546.186.131,00	69.847.019.829,91	119,30	59.384.735.438,01
Pajak Daerah	37.566.521.391,00	48.618.898.979,00	129,42	38.773.927.955,00
Retribusi Daerah	13.991.341.895,00	12.504.563.525,00	89,37	11.826.431.327,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.800.264.020,00	2.882.571.278,10	102,94	1.965.588.173,94
Lain-lain PAD yang Sah	4.188.058.825,00	5.840.986.047,81	139,47	6.818.787.982,07
PENDAPATAN TRANSFER	1.013.752.960.986,00	1.010.359.168.262,00	99,67	989.552.170.427,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	969.150.647.345,00	966.689.945.265,00	99,69	943.533.107.020,00
Dana Perimbangan	801.271.737.345,00	798.811.035.265,00	86,14	788.837.436.420,00
Dana Desa	152.964.788.000,00	152.964.788.000,00	100,00	149.500.968.600,00
Dana Insentif Fiskal	14.914.122.000,00	14.914.122.000,00	100,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.602.313.641,00	43.669.222.997,00	97,91	46.019.063.407,00
Pendapatan Bagi Hasil	44.602.313.641,00	43.669.222.997,00	97,91	46.019.063.407,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	5.194.702.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.281.702.343,00	8.729.465.898,00	94,05	15.116.703.520,00
Pendapatan Hibah	495.580.000,00	342.325.200,00	69,08	9.474.632.741,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.786.122.343,00	8.387.140.698,00	95,46	5.642.070.779,00

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
BELANJA DAERAH	1.175.821.783.648,00	1.099.597.450.263,00	92,06	1.031.824.125.387,00
BELANJA OPERASI	774.991.183.993,00	709.078.331.784,00	91,50	668.348.451.167,00
Belanja Pegawai	441.475.258.523,00	409.574.045.733,00	92,77	393.035.024.674,00
Belanja Barang dan Jasa	306.410.880.494,00	273.338.916.141,00	89,21	248.797.036.758,00
Belanja Subsidi	211.500.000,00	211.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah	25.515.769.726,00	25.058.344.460,00	98,21	17.814.259.850,00
Belanja Bantuan Sosial	1.377.775.250,00	895.525.450,00	65,00	8.702.129.885,00
BELANJA MODAL	175.668.930.555,00	165.619.436.669,00	94,28	149.012.960.494,00
Belanja Modal Tanah	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.134.114.644,00	41.255.703.219,00	97,92	39.590.112.604,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.944.541.695,00	69.553.872.247,00	96,68	53.149.042.945,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58.553.858.374,00	51.822.906.987,00	88,50	56.273.054.945,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.791.635.842,00	2.771.954.216,00	99,29	750.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	219.780.000,00	215.000.000,00	97,83	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	9.530.881.100,00	9.268.894.810,00	97,25	4.828.989.830,00
Belanja Tidak Terduga	9.530.881.100,00	9.268.894.810,00	97,25	4.828.989.830,00
BELANJA TRANSFER	215.630.788.000,00	215.630.787.000,00	100,00	209.633.723.896,00
Belanja Bagi Hasil	5.156.000.000,00	5.155.999.000,00	100,00	4.218.944.999,00
Belanja Bantuan Keuangan	210.474.788.000,00	210.474.788.000,00	100,00	205.414.778.897,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(94.240.934.188,00)	(10.661.796.273,09)	11,31	32.229.483.998,01
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	94.240.934.188,00	94.240.934.188,73	100,00	62.011.450.190,72
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	94.240.934.188,00	94.240.934.188,73	100,00	71.611.450.190,72
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	9.600.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	9.600.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	94.240.934.188,00	94.243.020.911,73	100,00	62.011.450.190,72
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	83.581.224.638,64	0,00	94.240.934.188,73



1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

1.1.2.1 Permasalahan Startegis Pemerintah Daerah

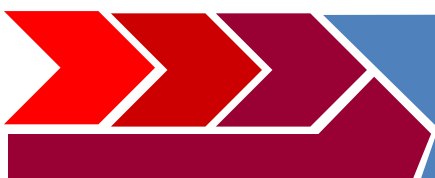
1.1.2.1.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang oleh Kabupaten Bolaang Mongondow pada masing-masing urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Urusan Wajib Berkaitan Dengan Aspek Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar. Pada aspek ini masyarakat berhak mendapatkan kebutuhan dasar dilayani dan difasilitasi Pemda agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Beberapa permasalahan pembangunan teridentifikasi dari aspek pelayanan dasar dan kesejahteraan:



a. Pendidikan

- Kualitas kelulusan pendidikan yang masih perlu ditingkatkan dilihat dari masih rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
- Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan bagi anak usia dini.
- Pelaksanaan pendidikan dasar masih belum optimal.
- Masih ditemukannya kasus putus sekolah pada anak.
- Masih ada tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi pendidik sesuai standar.

b. Kesehatan

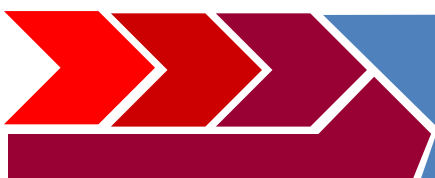
- Pelayanan Kesehatan bermutu belum sepenuhnya diperoleh masyarakat.
- Belum optimalnya komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan penurunan stunting dengan masih tingginya kasus stunting.
- Masih ditemukannya kasus kematian ibu.
- Masih Tingginya angka kematian bayi.
- Belum optimalnya implementasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga.
- Masih banyak penduduk yang belum memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan.
- Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi anak balita.
- Belum optimalnya pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang Kesehatan.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Belum optimalnya pengelolaan sistem irigasi.
- Masih rendahnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
- Belum optimalnya penyediaan air minum dan air limbah
- Belum optimalnya pengelolaan persampahan.
- Pengelolaan bangunan pemerintah masih perlu ditingkatkan.



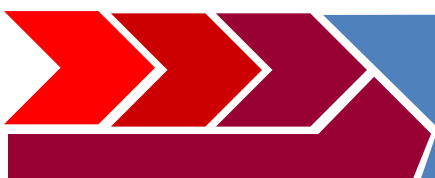
- Kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi masih perlu ditingkatkan.
 - Masih perlunya peningkatan penataan bangunan dan lingkungannya.
 - Belum semua wilayah bebas banjir.
 - Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang.
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Cakupan pelayanan air minum yang belum optimal.
 - Cakupan pelayanan sanitasi yang belum optimal.
 - Belum optimalnya pemenuhan Prasarana Sarana Utilitas umum, Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum.
 - Belum terpenuhinya cakupan ketersediaan rumah layak huni.
 - Belum terdapatnya capaian kinerja standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Belum optimalnya upaya penegakan perundang-undangan daerah.
 - Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 juga belum optimal.
 - Rendahnya tingkat sosialisasi kebencanaan yang dilakukan terhadap masyarakat.
- f. Sosial
- Belum optimalnya penanganan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
 - Pemberian bantuan sosial untuk kebutuhan dasar PMKS/PPKS masih rendah.
 - Rendahnya penyandang disabilitas baik fisik maupun mental, serta lanjut usia terlantar (LUT) tidak potensial yang memperoleh jaminan sosial.



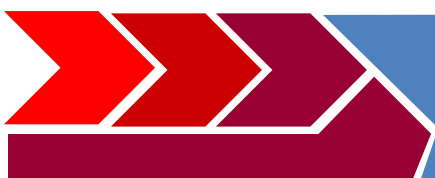
- Belum terintegrasi dan terimplementasikannya target-target pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja indikator SPM bidang sosial.
2. **Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**
- a. **Tenaga Kerja**
- Meningkatnya Tingkat pengangguran terbuka.
 - Belum optimalnya penempatan tenaga kerja
- b. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
- Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - Menurunnya partisipasi Perempuan di sektor pemerintahan.
 - Meningkatnya jumlah pernikahan anak.
 - Masih rendahnya Lembaga pelayanan kekerasan berbasis gender.
- c. **Pangan**
- Belum Optimalnya skor pola pangan harapan (PPH)
- d. **Pertanahan**
- Masih rendahnya luasan lahan yang bersertifikat
- e. **Lingkungan Hidup**
- Belum optimalnya capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup begitu juga dengan capaian Indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan yang hasilnya belum optimal.
 - Belum optimalnya pengurangan sampah di perkotaan .
 - Belum optimalnya cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.
- f. **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
- Belum semua penduduk umur 0-17 tahun mempunyai akta kelahiran



- Masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran.
 - Masih rendahnya kepemilikan akte nikah.
 - Belum semua penduduk wajib KTP memiliki KTP.
 - Belum optimalnya pengelolaan database kependudukan
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Rendahnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK.
 - Rendahnya LPM berprestasi.
 - Rendahnya Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD).
 - Kecilnya peningkatan status desa berkembang menjadi desa mandiri.
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam berKB
 - Rendahnya cakupan pria berKB.
- i. Perhubungan
- Rendahnya ketersediaan halte angkutan umum.
 - Belum optimalnya layanan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten.
 - Belum semua kendaraan umum laik jalan.
 - Belum optimalnya penyediaan fasilitas jalan.
- j. Komunikasi dan Informatika
- Belum optimalnya implementasi satu data dalam penyediaan data penunjang perencanaan Pembangunan.
- k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Belum optimalnya kemitraan yang dilakukan oleh UMKM.
 - Akses UMKM untuk mengikuti pameran promosi produk masih sangat kecil.
 - Menurunnya persentase koperasi aktif.



- Masih rendahnya jumlah KSP/USP yang masuk dalam kategori sehat.
 - Kurangnya daya saing produk UMKM dibanding produk pabrikan
- l. Penanaman Modal
- Rencana dan realisasi investasi belum tercapai.
 - Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan.
- m. Kepemudaan dan Olahraga
- Rendahnya keaktifan organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow, terlihat dari jumlah organisasi kepemudaan pada tahun 2020 hanya sebanyak 20.
 - Kurangnya peran aktif pemuda terutama dalam penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga.
 - Masih Minimnya wirausaha muda di Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - Masih rendahnya prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional, dipengaruhi oleh kurangnya pelatih yang bersertifikasi, kurangnya kualitas pengurus organisasi olah raga, serta kurangnya sarana prasarana olah raga sesuai standar.
- n. Statistik
- Belum optimalnya ketersediaan dan validitas data statistik sektoral
 - Belum optimalnya penerapan single data melalui aplikasi satu data Kabupaten Bolaang Mongondow
- o. Persandian
- Belum tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan persandian informasi.
- p. Kebudayaan
- Masih banyaknya budaya lokal yang belum dilestarikan, hingga kini .
 - Masih rendahnya jumlah upacara adat tradisional yang dilestarikan



q. Perpustakaan

- Tidak adanya fasilitas perpustakaan yang memadai.
- Jumlah koleksi buku perpustakaan daerah masih sangat rendah, bahkan tidak bertambah selang waktu 2016-2020.
- Belum adanya program/kegiatan yang mengakomodir kewenangan pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota.

r. Kearsipan

- Masih rendahnya pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan, dan tidak dilakukan secara terpadu.
- Belum ada pemanfaatan e-arsip dalam pengelolaan arsip oleh instansi pemerintah.

3. Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

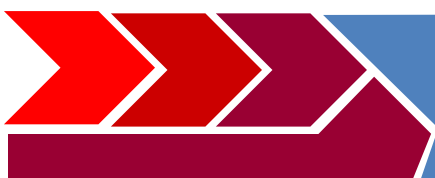
- Kurang optimalnya pemanfaatan potensi perikanan budidaya terlihat dari produksi baru mencapai 3.374 ton pada tahun 2020, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan mengenai cara budidaya ikan yang baik, ancaman hama dan penyakit ikan.
- Belum optimalnya pembinaan yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok masyarakat perikanan.

b. Pariwisata

- Kurangnya minat wisatawan mancanegara untuk berwisata ke Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah.
- Kurangnya kompetensi SDM pengelola pariwisata dan kurang optimalnya 3A (amenitas, atraksi, aksesibilitas).

c. Pertanian

- Belum optimalnya promosi komoditi pertanian dan hortikultura.



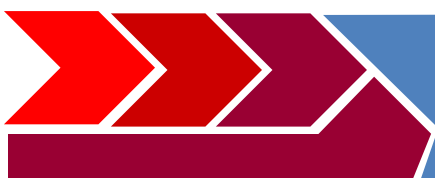
- Menurunnya produksi beberapa komoditas pertanian seperti kentang wortel dan cabe rawit dalam kurun waktu 5 tahun dari 22,488 ton di tahun 2015 menjadi 10.992 ton di tahun 2020.
- Rendahnya kualitas pasca panen, terlihat dari kualitas pasca panen komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura
- Stabilitas harga panen produksi pertanian yang belum terjaga, hal ini ditandai dengan anjloknya harga produksi pertanian saat panen raya tiba serta nilai NTP yang masih rendah
- Kurangnya sarana dan prasarana teknologi.
- Terus menurunnya populasi ternak sapi kurun waktu 2017-2019 dari 25,434 ekor/tahun turun -18 persen pada tahun 2019 sebanyak 20.119 ekor pertahun.
- Kontribusi PDRB bidang pertanian masih rendah.

d. Perdagangan

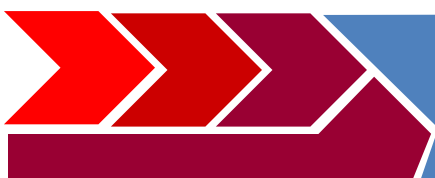
- Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pasar sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen
- Masih adanya pasar yang belum memenuhi persyaratan
- Masih terbatasnya lokasi PKL yang tertata.

e. Perindustrian

- Masih rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB.
- Rendahnya pertumbuhan industri yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Masih rendahnya cakupan pembinaan unit usaha IKM.
- Masih rendahnya pembinaan unit usaha IKM di Kabupaten Bolaang Mongondow. Hal ini adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak diperbolehkannya kegiatan pembinaan.



- Pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak diperbolehkannya adanya kegiatan pameran pada tahun 2020, maka mempengaruhi Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk di Kabupaten Bolaang Mongondow.
- f. Transmigrasi
 - Belum adanya lahan transmigrasi yang tersedia
- 4. Urusan Penunjang
 - a. Penelitian dan Pengembangan
 - Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan untuk bahan pengambilan kebijakan.
 - b. Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Belum optimalnya penjabaran prioritas pembangunan tahunan melalui penjabaran Program RPJMD dalam RKPD.
 - c. Keuangan Daerah
 - Penerimaan daerah dari sumber PAD cenderung turun karena adanya Pandemi Covid 19. Hal ini terlihat bahwa adanya penurunan 25 % tahun 2021 jika dibanding dengan PAD pada tahun 2020.
 - Belum optimalnya penggalian potensi pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, terkendala oleh data potensi pajak dan retribusi yang perlu dilakukan pemutakhiran, dan pemanfaatan teknologi yang masih kurang dalam peningkatan akurasi data dan pelayanan pajak dan retribusi. Dapat dilihat pada rasio PAD.
 - d. Kepegawaian dan Diklat
 - Rendahnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.
 - Belum terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dalam upaya meningkatkan profesionalitas ASN.
 - Belum optimalnya pejabat yang telah mengikuti diklatpim (II, III dan IV).



- e. Sekretariat Daerah
 - Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik di perangkat daerah.
 - Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur dan pendampingan aparatur.
- f. Sekretariat DPRD
 - Rendahnya jumlah perda yang di tetapkan setiap tahunnya.
- g. Pengawasan
 - Tingkat Maturitas dan kapabilitas SPIP belum sesuai dengan harapan. Tingkat Maturitas dan kapabilitas SPIP perlu ditingkatkan sehingga mencapai level 4.
 - Belum seluruhnya objek pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan
- h. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - Masih rendahnya kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan
 - Masih adanya organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang belum terdaftar secara sah di instansi terkait (Kesbangpol).
- i. Kewilayahan
 - Belum Optimalnya pelayanan Masyarakat di kecamatan.

1.1.2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

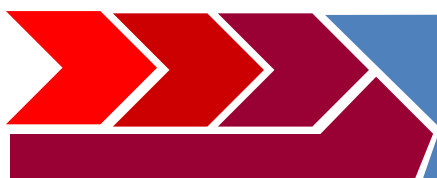
Tujuan pembangunan baik nasional dan daerah telah digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika tujuan yang dimandatkan oleh Konstitusi ini disarikan, akan tampak bahwa mandat yang diberikan Negara kepada para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara negara dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga kelingkup dunia.



Adanya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang pada pasal 201 ayat (9) bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Aturan ini menggambarkan bahwa daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2022 tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah sebagai mana mestinya karena perodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir. Disatu sisi penyusunan RKPD Tahun 2023 membutuhkan pedoman berupa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lebih lanjut menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD. Sehingga lahirlah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 yakni Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bolaang Mongodow tahun 2023-2026.

Sesuai instruksi tersebut, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 memperhatikan :

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow sampai dengan tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2017-2022;
4. RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional;



7. Regulasi yang berlaku.

Isu-isu strategis lainnya dalam perencanaan empat (4) tahun kedepan yaitu :

1. Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak pada tahun 2024.
2. Program prioritas, target, pengarusutamaan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 termasuk didalamnya capaian pembangunan antar wilayah kluster 2016-2020 pada Kawasan Industri Mongondow (KIMONG).
3. Pencapaian misi RPJPD 2005-2025 Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun ke lima (5) yaitu mewujudkan Bolaang Mongondow sebagai lumbung pangan di Indonesia Timur.
4. Penurunan Prevalensi stunting.
5. Pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM), urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas: 1) pendidikan, 2) kesehatan, 3) pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.
6. Penanganan Isu Lingkungan Hidup.
7. Pembangunan dalam Era New Normal, yaitu pembangunan dalam era perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.
8. Penegakan peraturan daerah dan keselarasan dengan RTRW.

Rencana Pembangunan Daerah ini juga memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 serta 7 (tujuh) agenda pembangunan. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045 dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020 – 2024 yang diterjemahkan dalam 7 Agenda Pembangunan:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.



3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2023 telah mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023-2026 sesuai Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2022 tentang RPD Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023-2026.

Visi dan misi yang menjadi landasan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk periode 2023-2026 dilandaskan pada visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2005-2025 pada tahap ke empat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir tahun 2022. Adapun Visi dan Misi Pj. Bupati Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut:.

Visi “BOLAANG MONGONDOW YANG BARU, BERBUDAYA, BERDAYA SAING DAN MANDIRI SEBAGAI LUMBUNG PANGAN INDONESIA TIMUR”

Visi Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow diwujudkan dengan 5 (lima) Misi pembangunan yakni sebagai berikut:

1. MEWUJUDKAN BOLAANG MONGONDOW YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING;
2. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PEMBANGUNAN BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN;
3. MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG MANDIRI BERTUMPU PADA POTENSI SUBERDAYA LOKAL;
4. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DEMOKRATIS DAN BEBAS KKN;
5. MEWUJUDKAN BOLAANG MONGONDOW SEBAGAI LUMBUNGAN PANGAN INDONESIA TIMUR.



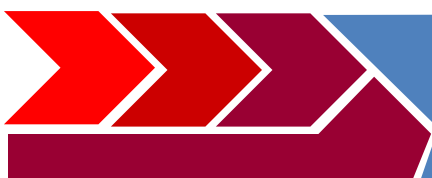
Lima butir misi diatas sebagai tahapan keempat Pembangunan daerah kurun waktu pelaksanaan RPJPD 2005-2025 yang relevan dengan kebutuhan Pembangunan saat ini di Kabupaten Bolaang Mongondow. penjabaran Misi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. MEWUJUDKAN BOLAANG MONGONDOW YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING.

Misi pertama ini ditunjukkan dengan upaya pemerintah dan Masyarakat Bolaang Mongondow untuk melaksanakan pembangunan menjadikan sumberdaya manusia sebagai subjek pembangunan, mendidik sumberdaya manusia Bolaang Mongondow yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kualitas dan integritas serta berperikemanusiaan, memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi tanpa meninggalkan kearifan lokal yang diwariskan oleh nenek moyang Bolaang Mongondow, memiliki derajat kesehatan yang tinggi sehingga memenuhi syarat maupun prasyarat masyarakat intelektual yang bermartabat. Pada gilirannya dengan kemampuan moral, etika, dan intelektual, masyarakat Bolaang Mongondow mampu memproduksi barang dan jasa, serta usaha-usaha lainnya yang dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat dan daerah

2. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PEMBANGUNAN BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN;

Misi kedua ini ditunjukkan dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat yang mampu melaksanakan menyediakan dan memantapkan kondisi infrastruktur dasar sebagai salahsatu syarat dan prasyarat pembangunan bangsa. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas yang mampu memenuhi standar pelayanan minimal sehingga dapat menjadi alat dalam mencapai kemakmuran bersama. Dengan adanya pelayanan pemerintahan yang secara koordinatif mampu melakukan kontrol yang efektif terhadap pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana baik infrastruktur dasar, suprastruktur dan manajemen pembangunan dengan mempertahankan keseimbangan aspek pemanfaatan sumberdaya alam



sebagai modal utama dalam sistem pembangunan berkelanjutan yang mampu menekan efek *climate change*.

Pembangunan Sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan/pemukiman dan lingkungan serta infrastruktur keagamaan menjadi alat dalam mendorong kemampuan daerah menjadi mandiri dan berdaya saing.

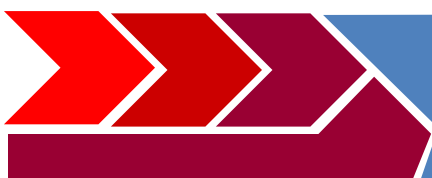
3. MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG MANDIRI BERTUMPU PADA POTENSI SUMBERDAYA LOKAL;

Misi ketiga ini ditunjukkan dengan pembangunan ekonomi daerah dari segala sektor ekonomi dalam rangka mencapai peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terutama dari usaha perekonomian yang berbasis sumberdaya alam baik didarat maupun di laut, dengan memanfaatkan semua potensi sumberdaya alam yang ada, membangun kondisi iklim investasi yang baik dengan proses pembangunan yang berlandaskan pada pengelolaan sumber daya alam demi kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat atau kelompok dengan berbagai bantuan modal maupun pelatihan. Selain itu melaksanakan pengembangan kawasan sentra ekonomi ataupun semacamnya guna meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah dalam melaksanakan kegiatan ekonomi.

Dalam kemandiriannya suatu daerah dapat terlihat dengan besaran pendapatan perkapita, Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, serta prosentase dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemandirian juga dapat terlihat dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan Kesehatan dan Pendidikan tanpa harus lagi keluar daerah dalam mendapatkan pelayanan.

4. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DEMOKRATIS DAN BEBAS KKN.

Misi keempat ini ditunjukkan dengan upaya melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governace*), terjaminnya penegakan



hukum terhadap praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang didukung oleh lembaga legislatif daerah yang kuat serta legitimasi penuh masyarakat. Pemerintahan daerah yang baik, bersih dan demokratis adalah daerah yang aman dan damai karena warganya taat dan patuh terhadap hukum di satu sisi, dan di sisi lain, hak-hak masyarakat terlindungi dan terakomodasi dalam sistem sosial, ekonomi, politik, pemerintahan dan pembangunan.

5. MEWUJUDKAN BOLAANG MONGONDOW SEBAGAI LUMBUNG PANGAN DI INDONESIA BAGIAN TIMUR.

Misi kelima ini ditunjukkan dengan upaya mengerahkan fokus pembangunan kabupaten Bolaang Mongondow dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan untuk menjadikan Kabupaten ini sebagai lumbung pangan di Indonesia Bagian Timur.

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi, yang kemudian dituangkan kedalam 11 butir prioritas pembangunan daerah berikut:

- 1 Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan;
- 2 Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan;
- 3 Pembangunan Infrastruktur;
- 4 Penguatan UMKM Dan Koperasi;
- 5 Pengembangan Pariwisata Berbasis Sumberdaya Alam Dan Kearifan Lokal;
- 6 Peningkatan Perlindungan Kesejahteraan Sosial;
- 7 Revitalisasi Pertanian Dengan Berbagai Subsektor Terutama Perikanan, Tanaman Pangan Dan Perkebunan;
- 8 Pembangunan SDA Dan Lingkungan Hidup;
- 9 Iklim Investasi dan Usaha;
- 10 Penguatan Ekonomi Desa.
- 11 Peningkatan Kualitas Birokrasi dan pelayanan



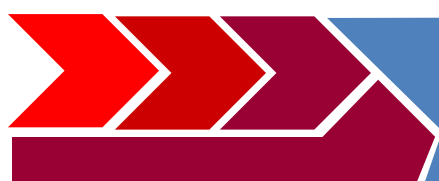
1.1.2.3 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah.

Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan berdasarkan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.14
Program Prioritas Pembangunan Daerah
Urusan Wajib
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
DINAS PENDIDIKAN		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terwujudnya pengelolaan pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Terselenggaranya Pembelajaran Muatan Lokal sesuai kebutuhan dan karakter daerah	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Terdistribusinya pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan



PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Terselenggaranya Pengendalian perizinan Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Dinas Pendidikan
DINAS KESEHATAN		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terlaksananya Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Tersedianya Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Dinas Kesehatan



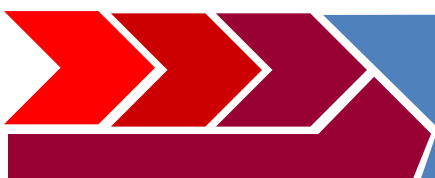
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Standar Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terlaksananya Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Rumah Sakit Umum Daerah
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Terlaksananya Pemanfaatan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan pengembangan sistem air limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



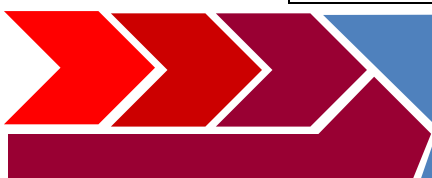
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Cakupan Penanganan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya Keterampilan untuk Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya rumah bagi korban bencana/relokasi program Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertangani	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



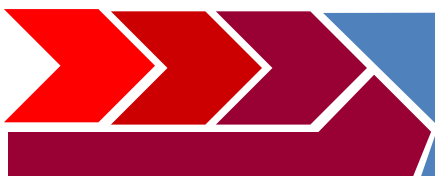
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Tersedianya Rumah yang layak huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tersedianya laporan pengembang perumahan bersertifikasi dan teregistrasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terlaksananya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terlaksana	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terselenggaranya Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Terselenggaranya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non-Kebakaran	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya Perlindungan bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	DINAS SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang baik	DINAS SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Pemberdayaan bagi PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang Aktif	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	DINAS SOSIAL



Tabel 1.15
Program Prioritas Pembangunan Daerah
Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA		
URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Terselenggaranya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terwujudnya Perencanaan Tenaga Kerja	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tersedianya Penempatan Tenaga Kerja	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Tersedianya Pembinaan Hubungan Industrial	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	DINAS SOSIAL



PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prosentase Perempuan yang mendapatkan perlindungan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Terselenggaranya Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Data gender dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terlaksananya Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



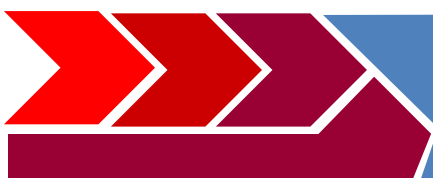
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Terselenggaranya Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
DINAS KETAHANAN PANGAN		
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Tersedianya Infrastruktur Ketahanan Pangan Yang memadai	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pola Pangan harapan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Terlaksananya Penanganan kerawanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya keamanan pangan daerah	Dinas Ketahanan Pangan



PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Dinas Ketahanan Pangan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas perencanaan lingkungan hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terkendalinya Pencemaran kerusakan lingkungan hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Bertambahnya Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Terselenggaranya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin PPLH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Adanya Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait PPLH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya Wawasan Kader Peduli Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Adanya Penghargaan LH Untuk Masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Terlaksananya Penanganan Pengaduan LH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksananya Pengelolaan Persampahan yang tertangani	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL		
URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Terlaksananya Program Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Terlaksananya Program Pencatatan Sipil	DUKCAPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terlaksananya Program Informasi Administrasi Kependudukan	DUKCAPIL
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Terlaksananya Program Pengelolaan Profil Kependudukan	DUKCAPIL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tertib dan Akuntabel	DUKCAPIL



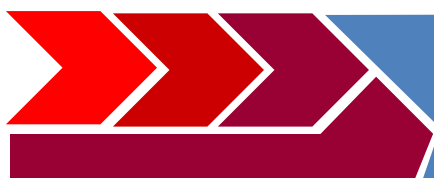
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
PROGRAM PENATAAN DESA	Terlaksananya penataan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Meningkatnya Kerjasama antar Desa Di Bolaang Mongondow	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Program Administrasi Pemerintah Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tertib dan Akuntabel	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	DPPKB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya Prevalensi Peserta KB Aktif	DPPKB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatkan Ketahanan Keluarga (KS)	DPPKB
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang tertib dan Akuntabel	DPPKB
DINAS PERHUBUNGAN		
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang tertib dan Akuntabel	Dinas Perhubungan



PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Terwujudnya Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan Yang Aman Nyaman dan Lancar	Dinas Perhubungan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatkan penerapan E-Government SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tertib dan Akuntabel	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK		
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya data Pembangunan Daerah yang tepat waktu	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Sistem Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika



PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Terlaksananya Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi dan UKM
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Terselenggaranya Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Dinas Koperasi dan UKM
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya Koperasi KSP/USP yang Dinilai Kesehatan Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan UKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Terselenggaranya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terselenggaranya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan UKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terselenggaranya Program Pengembangan Umum	Dinas Koperasi dan UKM



PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tertib dan Akuntabel	Dinas Koperasi dan UKM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Berinvestasi Di Bolaang Mongondow	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jumlah Investor yang melaksanakan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya iklim penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya penyelesaian permasalahan pengaduan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Terwujudnya Aplikasi Pengelolaan Data penanaman Modal secara efektif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tertib dan Akuntabel	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Terselenggaranya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda Dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Terselenggaranya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pemuda Dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya kapasitas daya saing Kepemudaan	Dinas Pemuda Dan Olahraga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Dinas Pemuda Dan Olahraga



PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Terlaksanannya Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Terlaksanannya Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlaksanannya Pelestarian Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Terselenggaranya Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
PROGRAM PENGELOLAAN KEARSIPAN	Terlaksanannya Pengelolaan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	terwujudnya perlindungan dan penyelamatan arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

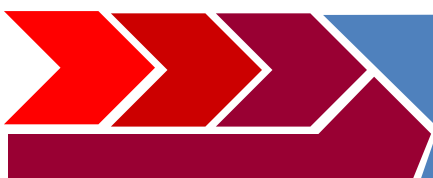


Tabel 1.16
Program Prioritas Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Pilihan

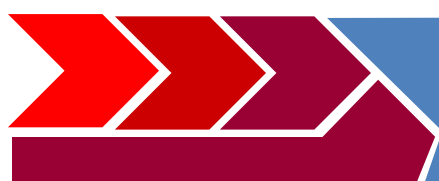
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
DINAS PERIKANAN		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Menurunnya Kegiatan Illegal Fishing	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Produksi Olahan hasil Perikanan	Dinas Perikanan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Dinas Perikanan
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Terlaksanannya Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Terpenuhinya Promosi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



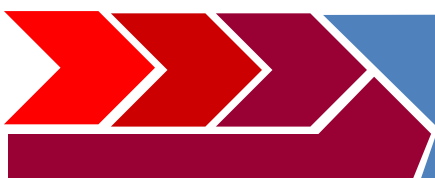
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
DINAS PERTANIAN		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tersedianya Varietas Benih/Bibit Yang bersertifikat	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Terselenggaranya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terselenggaranya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Terselenggaranya Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terselenggaranya penyuluhan pertanian	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	DINAS PERTANIAN



PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
DINAS PERKEBUNAN		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tersedianya Varietas Benih/ Bibit Tanaman Perkebunan Yang Bersertifikat	Dinas Perkebunan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Terselenggaranya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Perkebunan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terselenggaranya Penyuluhan Pertanian	Dinas Perkebunan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Dinas Perkebunan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Dinas Perkebunan
DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Sarana Perdagangan (pasar) yang dimanfaatkan Oleh Pelaku Usaha	Dinas Perdagangan dan ESDM
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tercapainya stabilisasi harga Barang Kebutuhan pokok	Dinas Perdagangan dan ESDM



PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaku usaha ekspor produk komoditi unggulan daerah	Dinas Perdagangan dan ESDM
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Tercapainya standardisasi bidang metrologi legal dan perlindungan konsumen	Dinas Perdagangan dan ESDM
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Dinas Perdagangan dan ESDM
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha di bidang perijinan	Dinas Perdagangan dan ESDM
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Terkelolanya potensi energi terbarukan	Dinas Perdagangan dan ESDM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten	Dinas Perdagangan dan ESDM
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Terkendalinya ijin usaha industri kabupaten	Dinas Perdagangan dan ESDM
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Industri nasional	Dinas Perdagangan dan ESDM



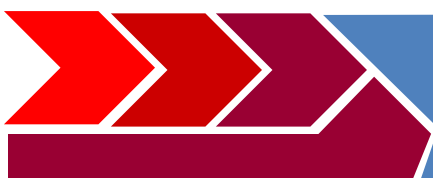
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Dinas Perdagangan dan ESDM
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Tersedianya Kawasan Transmigrasi	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Tabel 1.17
Program Prioritas Pembangunan Daerah
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Pengawasan dan
Kewilayahan
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
SEKRETARIAT DAERAH		
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Menurunnya Angka Kemiskinan	BAGIAN PBJ
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Menurunnya Angka Kemiskinan	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Menurunnya Angka Kemiskinan	BAGIAN PEMBANGUNAN



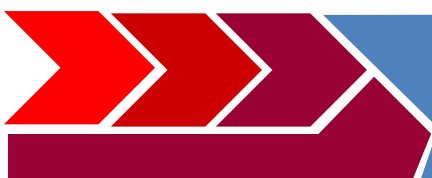
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	BAGIAN HUKUM
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Yang Tertib dan Akuntabel	BAGIAN ORGANISASI
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Yang Tertib dan Akuntabel	BAGIAN UMUM
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Yang Tertib dan Akuntabel	BAGIAN PROTOKOL PIMPINAN
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Yang Tertib dan Akuntabel	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN



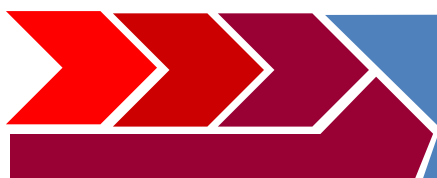
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
SEKRETARIAT DEWAN		
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Yang Tertib dan Akuntabel	SEKRETARIAT DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
PERENCANAAN		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksananya Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Terselenggaranya Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Yang Tertib dan Akuntabel	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
BADAN KEUANGAN DAERAH		
KEUANGAN		
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah	BKD
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKD
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah	BKD
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Yang Tertib dan Akuntabel	BKD
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
KEPEGAWAIAN		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Sesuai Kompetensi Yang Dibutuhkan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Terselenggaranya Pengembangan SDM	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Yang Tertib dan Akuntabel	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan



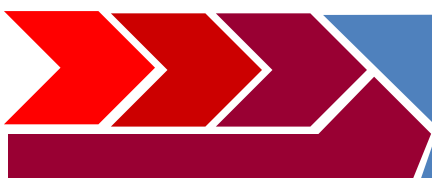
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
UNSUR PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH		
INSPEKTORAT		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Yang Tertib dan Akuntabel	Inspektorat
UNSUR KEWILAYAHAN		
KECAMATAN		
KECAMATAN POIGAR		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Kecamatan Poigar
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya pembangunan partisipatif di tingkat desa	Kecamatan Poigar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya pencegahan covid-19	Kecamatan Poigar
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Kecamatan Poigar



PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
KECAMATAN PASSI TIMUR		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Kecamatan Passi Timur
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya pembangunan partisipatif di tingkat desa	Kecamatan Passi Timur
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya pencegahan covid-19	Kecamatan Passi Timur
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Kecamatan Passi Timur
KECAMATAN DUMOGA		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Kecamatan Dumoga
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya pembangunan partisipatif di tingkat desa	Kecamatan Dumoga
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya pencegahan covid-19	Kecamatan Dumoga



PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Kecamatan Dumoga
KECAMATAN DUMOGA TIMUR		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Kecamatan Dumoga Timur
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya pembangunan partisipatif di tingkat desa	Kecamatan Dumoga Timur
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya pencegahan covid-19:	Kecamatan Dumoga Timur
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Kecamatan Dumoga Timur
KECAMATAN DUMOGA UTARA		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Kecamatan Dumoga Utara
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya Pembangunan Partisipatif di Tingkat Desa	Kecamatan Dumoga Utara



PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya Pencegahan Covid-19	Kecamatan Dumoga Utara
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Kecamatan Dumoga Utara
KECAMATAN DUMOGA BARAT		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Kecamatan Dumoga Barat
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya pembangunan partisipatif di tingkat desa	Kecamatan Dumoga Barat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya pencegahan covid-19	Kecamatan Dumoga Barat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Kecamatan Dumoga Barat
KECAMATAN LOLAYAN		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Kecamatan Lolayan



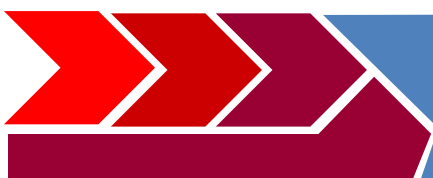
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya pencegahan covid-19	Kecamatan Lolayan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya pembangunan partisipatif di tingkat desa	Kecamatan Lolayan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Kecamatan Lolayan
KECAMATAN LOLAK		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya pembangunan partisipatif di tingkat desa	Kecamatan Lolak
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya pencegahan covid-19	Kecamatan Lolak
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Kecamatan Lolak
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Kecamatan Lolak



PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
KECAMATAN DUMOGA TENGGARA		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya pembangunan partisipatif di tingkat desa	Kecamatan Dumoga Tenggara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya pencegahan covid-19	Kecamatan Dumoga Tenggara
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Kecamatan Dumoga Tenggara
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Kecamatan Dumoga Tenggara
KECAMATAN BOLAANG TIMUR		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya pembangunan partisipatif di tingkat desa	Kecamatan Bolaang Timur
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya pencegahan covid-19	Kecamatan Bolaang Timur
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Kecamatan Bolaang Timur



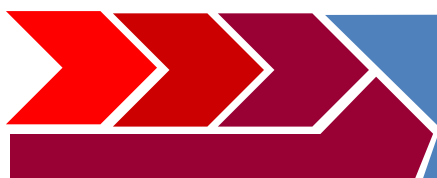
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Kecamatan Bolaang Timur
KECAMATAN DUMOGA TENGAH		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Kecamatan Dumoga Tengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya Pencegahan Covid-19	Kecamatan Dumoga Tengah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya Pembagunan Partisipatif Di Tingkat Desa	Kecamatan Dumoga Tengah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Layanan Dukungan Administrasi Perangkat Daerah	Kecamatan Dumoga Tengah
KECAMATAN PASSI BARAT		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Kecamatan Passi Barat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya pencegahan Covid-19	Kecamatan Passi Barat



PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya pembangunan partisipatif di tingkat Desa	Kecamatan Passi Barat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Kecamatan Passi Barat
KECAMATAN BILALANG		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya pembangunan partisipatif di tingkat desa	Kecamatan Bilalang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya pencegahan covid-19	Kecamatan Bilalang
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Kecamatan Bilalang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Kecamatan Bilalang
KECAMATAN SANGTOMBOLANG		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Kecamatan Sangtombolang



PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya pencegahan covid-19	Kecamatan Sangtombolang
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya pembangunan partisipatif di tingkat desa	Kecamatan Sangtombolang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Kecamatan Sangtombolang
KECAMATAN BOLAANG		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya pembangunan partisipatif di tingkat desa	Kecamatan Bolaang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya pencegahan covid-19	Kecamatan Bolaang
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Kecamatan Bolaang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	terwujudnya layanan dukungan administrasi perangkat daerah	Kecamatan Bolaang



PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terselenggaranya Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	KESBANGPOL
PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Terlaksananya Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	KESBANGPOL
PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	terselenggaranya Program Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi Masyarakat	KESBANGPOL
PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Terselenggaranya Program Peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial	KESBANGPOL



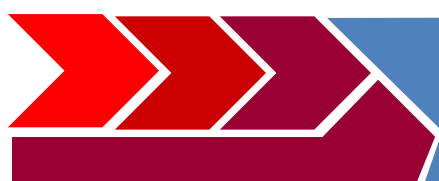
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	KESBANGPOL

1.1.2.4 Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

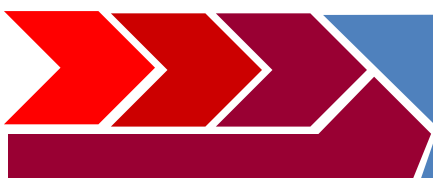
Adapun kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan masing-masing urusan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut:

Tabel 1.18
Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	DINAS PENDIDIKAN		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PENDIDIKAN



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS PENDIDIKAN
	Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS PENDIDIKAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat Partisipasi Sekolah dasar	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat Partisipasi Sekolah Menengah	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat Partisipasi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dokumen Kurikulum Muatan Lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter daerah	DINAS PENDIDIKAN



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	DINAS PENDIDIKAN
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan	DINAS PENDIDIKAN
DINAS KESEHATAN			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS KESEHATAN
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah	DINAS KESEHATAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DINAS KESEHATAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS KESEHATAN



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS KESEHATAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	DINAS KESEHATAN



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang - Undangan	DINAS KESEHATAN
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	DINAS KESEHATAN



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	DINAS KESEHATAN
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	DINAS KESEHATAN
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	DINAS KESEHATAN
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Germas	DINAS KESEHATAN



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
RSUD DATOE BINANGKANG			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD DATOE BINANGKANG
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	RSUD DATOE BINANGKANG
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD DATOE BINANGKANG
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	RSUD DATOE BINANGKANG
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	RSUD DATOE BINANGKANG
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang tersedia	RSUD DATOE BINANGKANG



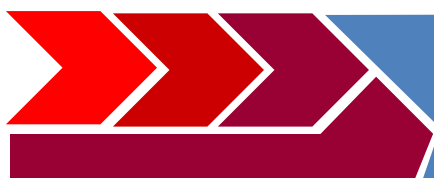
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	RSUD DATOE BINANGKANG
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah sistem informasi layanan terintegrasi	RSUD DATOE BINANGKANG
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan Kesehatan	RSUD DATOE BINANGKANG
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang dikembangkan dan ditingkatkan kompetensinya	RSUD DATOE BINANGKANG
DINAS PU DAN TATA RUANG			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PU DAN TATA RUANG



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Akumulasi Panjang Bangunan Pengaman sepanjang Daerah Aliran Sungai	DINAS PU DAN TATA RUANG



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Akumulasi Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Akumulasi Rumah Tangga yang memiliki akses layanan air minum yang layak	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi Rumah Tangga yang memiliki akses layanan limbah yang layak	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Akumulasi panjang sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam kondisi baik	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Akumulasi Panjang jalan kabupaten Yang Ditingkatkan Kualitasnya	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga Konstruksi yang Terbina	DINAS PU DAN TATA RUANG



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pengawasan Yang Sesuai	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PU DAN TATA RUANG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Yang di adakan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diperbaiki	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen dan Laporan penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen dan Laporan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen dan Laporan penetapan lokasi kawasan kumuh	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani (Ha)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah yang ditingkatkan untuk mencegah perumahan dan kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan terbangun	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lokasi Usaha Yang Berizin	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



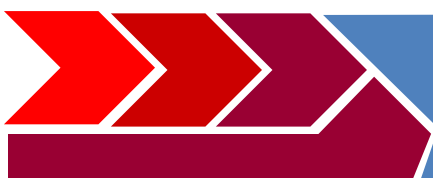
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



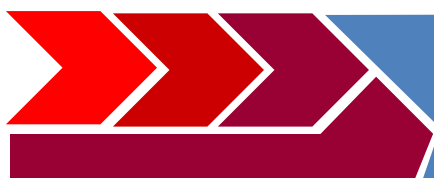
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangan Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangan	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelanggaran Perda	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah orang yang menerima pelayanan informasi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DINAS SOSIAL			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS SOSIAL
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS SOSIAL



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS SOSIAL
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS SOSIAL
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS SOSIAL
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS SOSIAL
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	DINAS SOSIAL
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam Penanggulangan PMKS	DINAS SOSIAL
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Direhabilitas	DINAS SOSIAL



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data TKS tersedia dan Jumlah Kelompok Penerima Bantuan	DINAS SOSIAL
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang ditangani	DINAS SOSIAL
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan terhadap kesiapsiagaan bencana	DINAS SOSIAL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang memiliki PP/PKB	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN
DINAS PP DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PP DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS PP DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PP DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS PP DAN PERLINDUNGAN ANAK



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS PP DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PP DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	DINAS PP DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia lembaga penyedia layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	DINAS PP DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	DINAS PP DAN PERLINDUNGAN ANAK



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	DINAS PP DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS KETAHANAN PANGAN			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS KETAHANAN PANGAN



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase kecamatan yang memiliki lembaga toko tani	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlahj Dokumen kebijakan Target Konsumsi Pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah buku peta rawan pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang ditangani	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikasi, registrasi dan rekomendasi keamanan pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

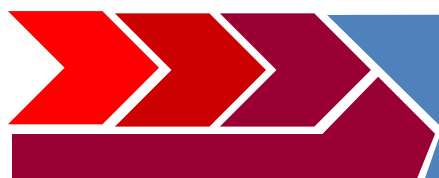


NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen Ranperda Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen KLHS yang tersedia	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pengendalian terhadap lokasi Pencemaran / Kerusakan Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Taman KEHATI	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi	DINAS KEPENDUDUKAN

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Perangkat Daerah	Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	AN DAN PENCATATAN SIPIL
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Yang Diterbitkan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Pelaporan Penyajian Pemanfaatan Data	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase Desa yang tertib Administrasi (DESA)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa yang diberdayakan (KELOMPOK)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PP DAN KB			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PP DAN KB
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PP DAN KB



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS PP DAN KB
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PP DAN KB
	Pelaksanaan, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah organisasi pelaksana	DINAS PP DAN KB
	Pendayagunaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB (PKB, PLKB)	jumlah penyuluh KB yang Diberdayakan	DINAS PP DAN KB
	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan di daerah Kab/Kota	Jumlah Akseptor di Kab/Kota	DINAS PP DAN KB
	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Jumlah organisasi dan mitra lainnya yang mendapatkan pembinaan dan kesertaan ber KB	DINAS PP DAN KB



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil	DINAS PP DAN KB
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Rumah Data Kependudukan yang Dibangun	DINAS PP DAN KB
	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Kelompok yang mendapatkan KIT	DINAS PP DAN KB
DINAS PERHUBUNGAN			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PERHUBUNGAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS PERHUBUNGAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS PERHUBUNGAN



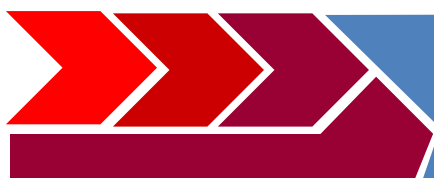
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS PERHUBUNGAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PERHUBUNGAN
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam kondisi baik	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C Yang berfungsi	DINAS PERHUBUNGAN
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Perizinan	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Jumlah Kendaraan Yang di Uji	DINAS PERHUBUNGAN
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Rekayasa Lalulintas	DINAS PERHUBUNGAN
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Andalalin (dokumen)	DINAS PERHUBUNGAN



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah dokumen hasil audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang tersedia	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah moda transportasi	DINAS PERHUBUNGAN
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen rencana umum jaringan trayek perkotaan	DINAS PERHUBUNGAN
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen rencana umum jaringan trayek Pedesaan	DINAS PERHUBUNGAN
	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan wilayah operasi angkutan	DINAS PERHUBUNGAN



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan wilayah operasi angkutan	DINAS PERHUBUNGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain dan sub domain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan egovernment di Lingkup Pemda Kab Bolaang Mongondow	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Kab/ Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS KOPERASI,USAHA KECIL,DAN MENENGAH
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	DINAS KOPERASI,USAHA KECIL,DAN MENENGAH
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usajha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wlayah Keanggotaan Dalam Daerah	DINAS KOPERASI,USAHA KECIL,DAN MENENGAH
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah Dilakukan Pengawasan, Kekuatan Kesehatan, Kemandirian,Keta ngguhan serta Akuntabilitas Koperasi	DINAS KOPERASI,USAHA KECIL,DAN MENENGAH



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	DINAS KOPERASI,USAHA KECIL,DAN MENENGAH
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Yang Produktif yang bernilai tambah memiliki Akses asar, Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penguatan Manajemen Standarisasi	DINAS KOPERASI,USAHA KECIL,DAN MENENGAH
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UKM yang di Kembangkan	DINAS KOPERASI,USAHA KECIL,DAN MENENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Diberikan fasilitasi / Insentif dan kemudahan penanaman modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan promosi yang diikuti	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



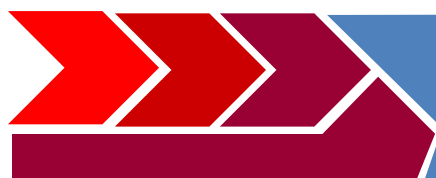
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor yang di berdayakan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda kader yang diberdayakan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah medali yang diperoleh pada Pekan Olahraga	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang mendapat Pembinaan dan Pengembangan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	kebudayaan masyarakat yang terlindungi	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan SDM adat pelestarian seni budaya	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



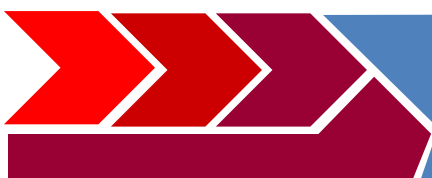
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan yang dikelola	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokus pembudayaan gemar membaca	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JKN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
	DINAS PERIKANAN		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PERIKANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PERIKANAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS PERIKANAN



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PERIKANAN
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kab/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana tangkap yang diadakan	DINAS PERIKANAN
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah sarana dan prasarana Pembudidayaan ikan yang tersedia	DINAS PERIKANAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/kota	jumlah lokasi wisata baru yang terkelola	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota	jumlah dokumen pengelolaan kawasan strategis pariwisata	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota	jumlah lokasi destinasi wisata yang terkelola	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
DINAS PERTANIAN			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PERTANIAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS PERTANIAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PERTANIAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS PERTANIAN



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS PERTANIAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PERTANIAN
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dokumen Pengawasan penggunaan sarana pertanian	DINAS PERTANIAN
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pelaksanaan pengelolaan SDG hewan	DINAS PERTANIAN
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Database lahan yang tersedia	DINAS PERTANIAN
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen pembangunan prasarana pertanian	DINAS PERTANIAN
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis tindakan penjaminan kesehatan hewan yang dilaksanakan	DINAS PERTANIAN



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah luas serangan yang tertangani	DINAS PERTANIAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kegiatan Penyuluhan	DINAS PERTANIAN
DINAS PERKEBUNAN			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PERKEBUNAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS PERKEBUNAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PERKEBUNAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS PERKEBUNAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS PERKEBUNAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PERKEBUNAN



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dokumen Pengawasan penggunaan sarana pertanian	DINAS PERKEBUNAN
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pelaksanaan pengelolaan SDG hewan	DINAS PERKEBUNAN
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen pembangunan prasarana pertanian	DINAS PERKEBUNAN
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah luas serangan yang tertangani	DINAS PERKEBUNAN
DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM

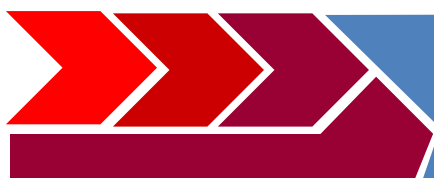
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM
	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ijin pemanfaatan Langsung Panas Bumi berdasarkan potensi	DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah ijin yang diterbitkan	DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pendukung	DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran dan Misi Dagang Yang Diikuti	DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan	DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan Pembangunan Industri	DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
	SEKRETARIAT DPRD		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	SEKRETARIAT DPRD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DPRD



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	SEKRETARIAT DPRD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	SEKRETARIAT DPRD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	SEKRETARIAT DPRD
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah dokumen layanan administrasi DPRD sesuai SOP	SEKRETARIAT DPRD
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Yang ditindaklanjuti	SEKRETARIAT DPRD



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi tugas DPRD yang terfasilitasi	SEKRETARIAT DPRD
SEKRETARIAT DAERAH			
	Penataan Organisasi	Jumlah Penataan Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Terkait BUMD, BLUD, Distribusi Perekonomiandan Ekonomi Mikro kecil	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Pelaksanaan Adminstrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Adminstrasi Pemnagunan Yang Difasilitasi dan Di Evaluasi	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen kegiatan terkait kesejahteraan rakyat / masyarakat dan bina mental spiritual	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen pelaksanaan adminstrasi tata pemerintahan daerah	SEKRETARIAT DAERAH



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah MOU	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata persentase pelayanan terhadap Aparatur Sipil Negara	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah yang diadakan	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah fasilitasi terhadap administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	jumlah fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah yang disediakan	SEKRETARIAT DAERAH



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah dokumen / laporan pengadminstrasia n barang milik daerah	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Penataan organisasi	jumlah kegiatan penataan organisasi	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitasi keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan	SEKRETARIAT DAERAH
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



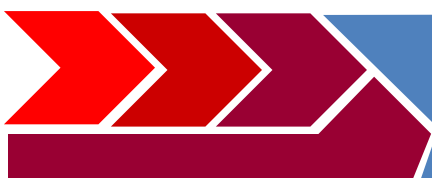
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	rasio kebutuhan ASN	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelayanan terhadap ASN secara cepat dan tepat waktu	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio jumlah ASN dalam jabatan (struktural/Fungsional) sesuai Kompetensi	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase tindak lanjut pembinaan disiplin ASN	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis terhadap kebutuhan organisasi	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN KEUANGAN DAERAH			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	BADAN KEUANGAN DAERAH



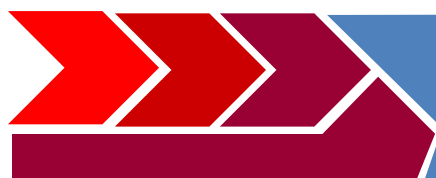
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah (Bulan)	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Bulan)	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Bulan)	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	BADAN KEUANGAN DAERAH



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	BADAN KEUANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



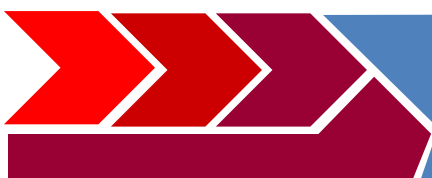
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan, pendanaan dan evaluasi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah yang tersedia	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat daerah yang diasistensi perencanaannya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat daerah yang diasistensi perencanaannya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Perangkat daerah yang diasistensi perencanaannya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan yang tersedia	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan pengembangan inovasi dan teknologi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6	UNSUR PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH		
	INSPEKTORAT DAERAH		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	INSPEKTORAT DAERAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	INSPEKTORAT DAERAH



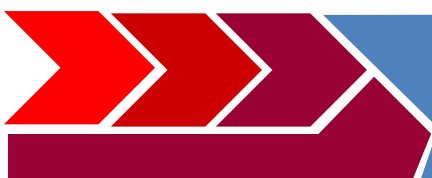
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	INSPEKTORAT DAERAH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	INSPEKTORAT DAERAH
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Entitas yang dilaksanakan Pengawasan	INSPEKTORAT DAERAH
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Entitas yang dilaksanakan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	INSPEKTORAT DAERAH
	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Pendamoingan dan Asistensi	INSPEKTORAT DAERAH
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
	KECAMATAN DUMOGA BARAT		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	KECAMATAN DUMOGA BARAT
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	KECAMATAN DUMOGA BARAT



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	KECAMATAN DUMOGA BARAT
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	KECAMATAN DUMOGA BARAT
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	KECAMATAN DUMOGA BARAT
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	KECAMATAN DUMOGA BARAT
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	KECAMATAN DUMOGA BARAT
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi perencanaan pembangunannya	KECAMATAN DUMOGA BARAT
KECAMATAN DUMOGA TENGAH			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN DUMOGA TENGAH



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KECAMATAN DUMOGA TENGAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	KECAMATAN DUMOGA TENGAH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN DUMOGA TENGAH
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	KECAMATAN DUMOGA TENGAH
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi perencanaan pembangunannya	KECAMATAN DUMOGA TENGAH
KECAMATAN DUMOGA TIMUR			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN DUMOGA TIMUR
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KECAMATAN DUMOGA TIMUR
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	KECAMATAN DUMOGA TIMUR



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN DUMOGA TIMUR
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	KECAMATAN DUMOGA TIMUR
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang emlaksanakan pemberdayaan masyarakat kelurahan	KECAMATAN DUMOGA TIMUR
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	jumlah dokumen yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	KECAMATAN DUMOGA TIMUR
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Perencanaan Pembangunannya	KECAMATAN DUMOGA TIMUR
KECAMATAN DUMOGA UTARA			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN DUMOGA UTARA
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KECAMATAN DUMOGA UTARA



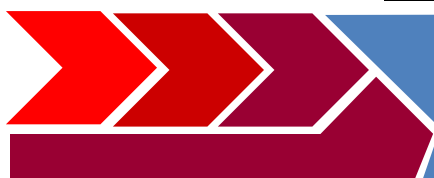
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN DUMOGA UTARA
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan	KECAMATAN DUMOGA UTARA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN DUMOGA UTARA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	KECAMATAN DUMOGA UTARA
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Desa yang dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan	KECAMATAN DUMOGA UTARA
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Perencanaan Pembangunannya	KECAMATAN DUMOGA UTARA
KECAMATAN DUMOGA TENGGARA			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN DUMOGA TENGGARA



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KECAMATAN DUMOGA TENGGARA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN DUMOGA TENGGARA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN DUMOGA TENGGARA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	KECAMATAN DUMOGA TENGGARA
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang dilaksanakan Pemberdayaan	KECAMATAN DUMOGA TENGGARA
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	jumlah desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	KECAMATAN DUMOGA TENGGARA
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Perencanaan Pembangunannya	KECAMATAN DUMOGA TENGGARA



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
KECAMATAN PASSI BARAT			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN PASSI BARAT
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KECAMATAN PASSI BARAT
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN PASSI BARAT
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan	KECAMATAN PASSI BARAT
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN PASSI BARAT
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	KECAMATAN PASSI BARAT
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	jumlah desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	KECAMATAN PASSI BARAT



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Perencanaan Pembangunannya	KECAMATAN PASSI BARAT
KECAMATAN BOLAANG TIMUR			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN BOLAANG TIMUR
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KECAMATAN BOLAANG TIMUR
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Adminstrasi Umum Perangkat daerah	KECAMATAN BOLAANG TIMUR
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan</i>	KECAMATAN BOLAANG TIMUR
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN BOLAANG TIMUR
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Yang Dipelihara	KECAMATAN BOLAANG TIMUR



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	KECAMATAN BOLAANG TIMUR
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Perencanaan Pembangunannya	KECAMATAN BOLAANG TIMUR
KECAMATAN POIGAR			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	KECAMATAN POIGAR
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	KECAMATAN POIGAR
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	KECAMATAN POIGAR
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah yang disediakan	KECAMATAN POIGAR
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	KECAMATAN POIGAR



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	KECAMATAN POIGAR
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawaan (Desa)	KECAMATAN POIGAR
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi perencanaan pembangunannya (desa)	KECAMATAN POIGAR
	Pencegahan Gangguan Ketentraman Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah desa yang ditangani	KECAMATAN POIGAR
KECAMATAN PASSI TIMUR			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	KECAMATAN PASSI TIMUR
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	KECAMATAN PASSI TIMUR
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	KECAMATAN PASSI TIMUR



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah yang disediakan	KECAMATAN PASSI TIMUR
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	KECAMATAN PASSI TIMUR
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	KECAMATAN PASSI TIMUR
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawaan (Desa)	KECAMATAN PASSI TIMUR
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi perencanaan pembangunannya (desa)	KECAMATAN PASSI TIMUR
KECAMATAN DUMOGA			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	KECAMATAN DUMOGA
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	KECAMATAN DUMOGA



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	KECAMATAN DUMOGA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	KECAMATAN DUMOGA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	KECAMATAN DUMOGA
	Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Jumlah desa yang terfasilitasi perencanaan pembangunannya (desa)	KECAMATAN DUMOGA
KECAMATAN LOLAYAN			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	KECAMATAN LOLAYAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan	KECAMATAN LOLAYAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	KECAMATAN LOLAYAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan	KECAMATAN LOLAYAN

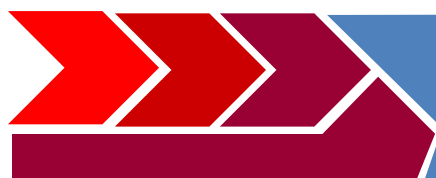
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	KECAMATAN LOLAYAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Yang Dipelihara	KECAMATAN LOLAYAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	KECAMATAN LOLAYAN
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Perencanaan Pembangunannya	KECAMATAN LOLAYAN
KECAMATAN BILALANG			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	KECAMATAN BILALANG
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan	KECAMATAN BILALANG
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Adminstrasi Umum Perangkat daerah	KECAMATAN BILALANG
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan	KECAMATAN BILALANG



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	KECAMATAN BILALANG
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Yang Dipelihara	KECAMATAN BILALANG
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Yang diberdayakan	KECAMATAN BILALANG
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	KECAMATAN BILALANG
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Perencanaan Pembangunannya	KECAMATAN BILALANG
KECAMATAN BOLAANG			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	KECAMATAN BOLAANG
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan	KECAMATAN BOLAANG



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Adminstrasi Umum Perangkat daerah	KECAMATAN BOLAANG
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan	KECAMATAN BOLAANG
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	KECAMATAN BOLAANG
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Yang Dipelihara	KECAMATAN BOLAANG
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Yang diberdayakan	KECAMATAN BOLAANG
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	KECAMATAN BOLAANG
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Perencanaan Pembangunannya	KECAMATAN BOLAANG
KECAMATAN SANG TOMBOLANG			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN SANG TOMBOLANG



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KECAMATAN SANG TOMBOLANG
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Adminstrasi Umum Perangkat daerah	KECAMATAN SANG TOMBOLANG
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan</i>	KECAMATAN SANG TOMBOLANG
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN SANG TOMBOLANG
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Yang Dipelihara	KECAMATAN SANG TOMBOLANG
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Perencanaan Pembangunannya	KECAMATAN SANG TOMBOLANG
KECAMATAN LOLAK			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN LOLAK
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KECAMATAN LOLAK



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Adminstrasi Umum Perangkat daerah	KECAMATAN LOLAK
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan</i>	KECAMATAN LOLAK
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN LOLAK
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Yang Dipelihara	KECAMATAN LOLAK
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Perencanaan Pembangunannya	KECAMATAN LOLAK
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen rumusan kebijakan teknis dan pemanjapan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen kebijakan bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonomi pada dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di pemerintah Pusat ke pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara terus menerus seiring dengan intensifnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung-jawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Jika dilihat dalam konteks pembangunan nasional, maka percepatan penerapan SPM menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional. Dalam hal ini SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional. Pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi Pemerintah Kabupaten/kota yang menjadi urusan wajib terdiri atas:



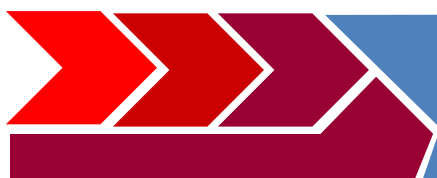
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
dan
6. Sosial.

Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal tersebut, Pemerintah Daerah juga harus mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat daerah pengampu SPM. Pengintegrasian ini menjadi penting agar ada kepastian bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan dan mencapai target yang diharapkan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 yang termuat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2022 menjadikan penerapan SPM termasuk dalam misi pembangunan daerah, yakni misi ke 1 Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berdaya Saing.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya.

Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan *urgent* untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda



dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan dana disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dengan memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial.

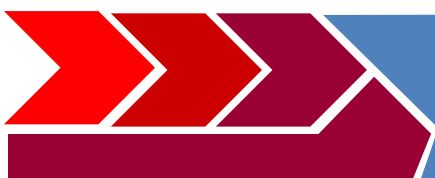
Dalam penyusunan Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai dsar pelaksanaan ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal :

1. Bidang Pendidikan

- Pendidikan anak usia dini (PAUD)
- Pendidikan dasar
- Pendidikan kesetaraan

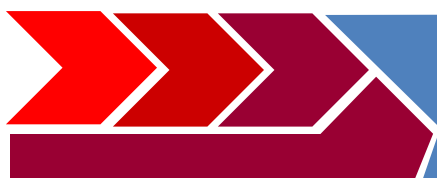
2. Bidang Kesehatan

- Pelayanan kesehatan ibu hamil
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- Pelayanan kesehatan balita
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar



- Pelayanan kesehatan pada usia produktif
 - Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
 - Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
 - Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
 - Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
 - Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
 - Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
 - Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
 4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
 - Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota
 5. Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
 - Pelayanan informasi rawan bencana
 - Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
 6. Bidang Sosial
 - Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
 - Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
 - Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
 - Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
 - Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari



pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan, sebagai berikut:

1.1.3.1 Penyeragaman Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan:

- 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 2 Pendidikan dasar
- 3 Pendidikan kesetaraan

Penyeragaman Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.18
Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
1). Pendidikan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				70.194.672.015	83.234.725.249	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				40.377.618.571	53.417.671.805	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	JUMLAH RKB YANG DIBANGUN	Angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan		2.378.052.000	3.876.556.500
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	JUMLAH PERPUSTAKAAN YG DIBANGUN	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Dumoga Barat, Doloduo	1.176.135.000	1.176.135.000



Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Lolak, Lalow	224.466.000	823.336.000
				Kab. Bolaang Mongondow, Lolayan, Kopandakan II			
				Kab. Bolaang Mongondow, Poigar, Mariri Baru			
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	JUMLAH RKB YG DIBANGUN	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.653.505.000	13.663.905.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	Terbangunnya Jamban Sekolah	Angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan		1.294.226.000	1.518.692.000
	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Penerima	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.796.750.000	41.095.048



Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	TERBANGUNYA JAMBAN SEKOLAH	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.294.226.000	1.518.692.000
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Penerima	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.250.000.000	1.250.000.000
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang dilayani	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	465.148.702	465.148.702
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang dilayani	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.860.600	1.743.646.127
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang dilayani	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.800.000.000	1.800.000.000



Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang dilayani	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.958.336.965	2.958.336.965
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	PEMBINAAN DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Lolak	1.420.880.876	882.000.000
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	JUMLAH SEKOLAH PENERIMA BOS	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.473.765.000	21.349.112.035
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang dilayani	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan		351.016.428	351.016.428
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						22.415.425.744	22.415.425.744



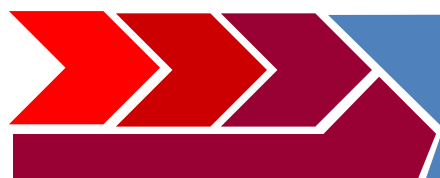
Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang dilayani	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000.000	1.200.000.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang dilayani	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.473.338.211	1.473.338.211
	Pembangunan Laboratorium	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	DOKUMEN	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.546.919.000	6.546.919.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan		866.801.700	866.801.700
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang dilayani	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	405.616.833	405.616.833



Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	JUMLAH SEKOLAH PENERIMA BOS	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.982.275.000	11.982.275.000
2). Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					6.482.717.700	6.482.717.700
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	JUMLAH BAHAN KETERAMPILAN SKB	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	831.096.000	831.096.000
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	JUMLAH PENERIMA ALAT PERMAINAN PAUD	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	153.119.892	153.119.892
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	KEGIATAN GEBYAR PAUD	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	324.155.422	324.155.422



Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	SOSIALISASI SINGRON DAPODIK PAUD	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	532.655.386	532.655.386
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Tutor/Pendidik yang dibayarkan	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan		1.800.271.000	1.800.271.000
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	JUMLAH PENERIMA BOP SEKOLAH	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan		2.941.420.000	2.941.420.000
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					918.910.000	918.910.000
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	JUMLAH PKBM YANG MENERIMA	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	918.910.000	918.910.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					94.342.300	94.342.300
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					94.342.300	94.342.300



Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Guru Yang ikut pelatihan	Jumlah Guru yang di nilai	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94.342.300	94.342.300
3). Pendidikan Kesetaraan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					746.617.585	746.617.585
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					746.617.585	746.617.585
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Guru yang di Nilai	Jumlah Guru PAUD	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	746.617.585	746.617.585
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					10.530.063	10.530.063
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.530.063	10.530.063
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		JUMLAH LEMBAGA YANG BELUM MENGURUS PERIZINAN		Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.530.063	10.530.063

3.1.1.2 Penyelerasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kesehatan

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif



7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa
 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/prevent
- Penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan standar pelayanan minimum (SPM) bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.20
Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kesehatan
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						39.987.741.000	42.006.867.917
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						27.007.623.307	27.679.540.192
2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;	Pembangunan Puskesmas		Jumlah Puskesmas Yang Dibangun	Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Kesehatan		3.019.759.460	3.679.159.460
3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Laboratorium Kesehatan Daerah yang dibangun	Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.557.874.998	5.557.874.998
4. pelayanan kesehatan balita;	Pelayanan kesehatan balita		Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Kesehatan		0	183.583.550
6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Jumlah Puskesmas Yang direhab	Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	680.000.000	680.000.000



Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah fasilitas kesehatan yang direhab	Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab. Bolaang Mongondow , Lelayan, Abak	3.625.000.000	3.871.795.000
8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;					Kab. Bolaang Mongondow , Dumoga, Serasi		
9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;					Kab. Bolaang Mongondow , Dumoga, Kanaan		
11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000	0
12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Puskesmas Penerima	Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.990.109.184	5.990.109.184
	Pengadaan Obat, Vaksin		Jumlah Puskesmas Penerima	Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.717.018.000	7.717.018.000
	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Jumlah BMHP yang diadakan	Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	112.861.665	0
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					12.289.995.981	13.162.502.797



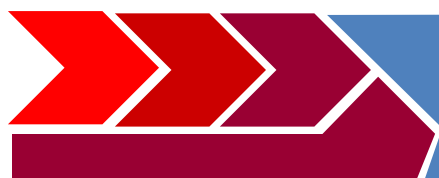
Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Persentase pelayanan pada ibu hamil	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120.208.775	112.822.775
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		persentase pelayanan ibu bersalin	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43.242.000	43.242.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.668.000	57.168.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Cakupan pelayanan kesehatan balita	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	173.752.500	240.492.978
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		cakupan pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73.520.500	68.120.500
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46.986.000	46.986.000



Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		cakupan pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93.257.676	266.749.676
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66.598.402	51.254.402
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		persentase pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68.796.250	66.096.250
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.484.250	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		cakupan pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315.233.772	315.233.772



Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		cakupan pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	119.615.336	101.645.336
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Jumlah Desa	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.500.000	47.690.000
			Waktu Penyediaan Pelayanan Kesehatan pada Situasi Bencana				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	174.630.988	156.930.988
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		jumlah desa	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	192.489.293	0
			jumlah puskesmas				
			Waktu penyediaan pengelolaan kesehatan lingkungan				



Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Desa	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.873.500	532.278.221
			Jumlah Kecamatan				
			Jumlah Puskesmas				
			waktu penyelenggaraan promosi kesehatan				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Meningkatnya Kualitas Kelompok Asuhan Mandiri	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	144.599.010	25.144.000
			Terlaksananya Pengelolaan Obat Tradisional				
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan Surveilance Aktif	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275.941.816	0
			Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Jemaah Haji				
			Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Penyelidikan Epidemiologi Kasus Berpotensi KLB				

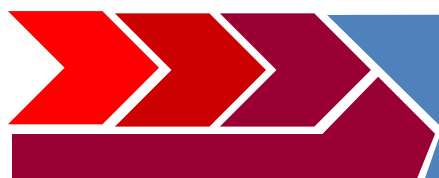


Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
			Persentase Penemuan Kasus Non Polio AFP Rate Per 100.000 Anak < 15 Tahun				
			Persentase Penyelidikan Epidemiologi yang Dilaksanakan				
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Cakupan Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan di daerah sulit dan pada hari hari besar	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	444.051.000	77.801.000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Cakupan pengelolaan pelayanan penyakit menular	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	367.824.345	701.268.761
		Cakupan pengelolaan pelayanan penyakit tidak menular					
		Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Posbindu PTM					
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah PBI Jamkesda	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.250.689.250	5.250.689.250
		Jumlah PBPU dan Kelas III Mandiri					
		Jumlah Puskesmas Penerima					

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah		Jumlah Fasyankes yang diawasi Persentase penyuluhan NAPZA di sekolah	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46.313.450	0
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Persentase tatanan yang dinilai	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	118.178.374	0
	Operasional Pelayanan Puskesmas		waktu penyediaan operasional puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97.200.000	1.517.953.070
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		waktu penyediaan operasional	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.939.704.000	3.027.788.000
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Puskesmas yang di Akreditasi dan Re Akreditasi	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	515.676.000	455.097.000
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Waktu Penyediaan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140.817.716	0



Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Penyakit Berpotensi KLB	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	196.765.350	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelaporan Standar Pelayanan Minimal		91.378.438	0
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi						381.603.500	306.304.500
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	188.089.500	306.304.500
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Peralatan SIK yang Diadakan Waktu Penyediaan penyelenggaraan SIK	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	193.514.000	0
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						308.518.212	858.901.160
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Profesi Tenaga Kesehatan yang Dinilai	Meningkatnya Mutu Kualitas Pelayanan di Fasilitas Kesehatan	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	166.928.272	717.311.220



Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Sistrute	Meningkatnya Mutu Kualitas Pelayanan di Fasilitas Kesehatan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	141.598.940	141.598.940
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						5.685.948.157	5.685.127.825
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota						29.914.665	29.914.665
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Ijin Praktek	Persentase Tenaga Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.914.665	29.914.665
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						5.656.033.492	5.655.213.160
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		jumlah dokumen SDM	Terpenuhiya kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98.713.160	0
		jumlah puskesmas penerima					
		Waktu penyediaan tenaga kesehatan					
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Jumlah Profesi Tenaga Kesehatan yang diadakan	Terpenuhiya kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,532.500.000	5.655.213.160
		Tersedianya Kebutuhan Tenaga Kesehatan yang Sesuai Standar					



Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		jumlah fasilitas kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.820.332	0
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						411.738.000	436.558.332
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Sumber Daya Kesehatan yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	Jumlah Pelatihan Kompetensi	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	411.738.000	436.558.332
			Tersedianya Praktik Tenaga Kesehatan yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan				
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						460.314.487	508.002.557
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						167.579.604	215.267.674
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Kecamatan	Jumlah sarana farmasi yang memiliki ijin	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	122.405.876	169.075.946
			Jumlah Sarana yang Memenuhi Standardan Ijin Operasional				
			waktu Pengawasan				
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan		Jumlah IRTP	Jumlah sarana farmasi yang memiliki ijin	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46.191.728	46.191.728

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Tersedianya Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat dan UMOT				
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				93.387.647	93.387.647	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah IRTP yang mendapatkan Edukasi Keamanan Pangan	Tersedianya Pangan Industri Rumah Tangga yang Aman Dikonsumsi	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93.387.647	93.387.647
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				75.480.606	75.480.606	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah Lokasi Pusat Jajanan yang Dikunjungi	Jumlah sarana yang diawasi	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.480.606	75.480.606
			Persentase sarana yang memenuhi standar kesehatan				
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				123.866.630	123.866.630	



Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Jumlah Lokasi Pusat Jajanan yang Dikunjungi	Jumlah pengawasan TPM	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	123.866.630	123.866.630
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						189.695.405	313.170.325
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						115.162.405	217.651.325
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Cakupan Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat Waktu Pelaksanaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Waktu pelaksanaan penyelenggaraan UKBM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115.162.405	217.651.325
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						74.533.000	95.519.000
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Waktu pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Gernas	Cakupan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.533.000	95.519.000

3.1.1.3 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik



Tabel 1.21
Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun
2023

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					485.856.365	532.576.603
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					485.856.365	532.576.603
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan perdesaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Terbangunnya layanan air minum	Kab. Bolaang Mongondow, Lolak, Lolak	19,547,950	19,547,950
	Supervisi Pembangunan /Peningkatan/ Perluasan/Perbaikakan SPAM	Persentase Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan perdesaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Perluasan/Optimalisasi SPAM	Terbangunnya layanan air minum	Kab. Bolaang Mongondow, Lolak, Lalow	0	1.575.161
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan perdesaan	Terbangunnya sarana prasarana air minum	Terbangunnya layanan air minum	Kab. Bolaang Mongondow, Bolaang, Lolak	0	45.145.077
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan perdesaan	Jumlah Kapasitas Jaringan Perpipaan Kawasan Perdesaan	Terbangunnya layanan air minum	Kab. Bolaang Mongondow, Tungoi I Kab. Bolaang Mongondow, Poigar, Nonapan	466.308.415	466.308.415
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					2.461.464.093	2.652.713.693
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah					2.461.464.093	2.652.713.693

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Kabupaten/Kota						
	Penyusunan Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistim pengelolaan air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	Persentase Layanan Penyediaan Sistim Air Limbah	Jumlah rencana kebijakan strategi dan teknis SPLD dalam daerah kabupaten/kota yang disusun	Terbangunnya layanan sistim air limbah domestik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.117.549	17.117.549
	Supervisi Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistim pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	Persentase Layanan Penyediaan Sistim Air Limbah	Jumlah Dokumen supervise kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistim pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	Terbangunnya layanan sistim air limbah domestik	Kab. Bolaang Mongondow	0	1.249.600
	Pembangunan / Penyediaan Sistim pengelolaan air limbah terpusat skala pemukiman	Persentase Layanan Penyediaan Sistim Air Limbah	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung Dengan Sistim Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Pemukiman	Terbangunnya layanan sistim air limbah domestik	Kab. Bolaang Mongondow, Sang Tombolang, Babo, Cempaka Kab. Bolaang Mongondow, Dumoga Barat, Ikhwan, Doloduo III Kab. Bolaang Mongondow, Dumoga Utara, Mopuya Selatan, Mopugad Utara I	2.444.346.544	2.634.346.544



Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
					Kab. Bolaang Mongondow, Lolak, Totabuan		
					Kab. Bolaang Mongondow, Lolayan, Moposi, Tanoyan Utara, Mengkang		
					Kab. Bolaang Mongondow, Dumoga Barat, Ikhwan		
					Kab. Bolaang Mongondow, Passi Barat, Poyuyanan		
					Kab. Bolaang Mongondow, Dumoga Tenggara, Konarom		
					Kab. Bolaang Mongondow, Dumoga Tengah, Kinomalingan		

3.1.1.4 Penyeragaman Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota



Penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan standar pelayanan minimum (SPM) bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat pada lampiran dibawah ini:

Tabel 1.22

Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				161.968.448	161.968.448	
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				44.321.073	44.321.073	
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Persentase Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		14.527.008	14.527.008
	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Persentase Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.266.231	13.266.231



Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Persentase Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.894.413	10.894.413
	Rembuk Warga Untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban bencana	Pengembangan Perumahan	Jmlah Orang Yang Mengikuti Rembuk	Jumlah Dokumen Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.633.421	5.633.421
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						117.674.375	117.674.375
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Persentase Rumah Korban Bencana yang tertangani	Jumlah Rumah Korban Bencana yang Dibangun	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	111.370.736	111.370.736
	Penyusunan Site Plane dan DED Bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah Site Plane atau DED bagi Rumah Korban bencana Kabupaten atau yang terkena Relokasi Program Kabupaten	Jumlah Dokumen Site Plane atau DED bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Site Plane atau DED	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.303.639	6.303.639

3.1.1.5 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana



4. Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana
5. Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran

Penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan standar pelayanan minimum (SPM) bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.23
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					5.880.065.329	5.652.880.244	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					2.889.152.168	3.300.176.165	
1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	145.302.585	147.455.430
2. pelayanan informasi rawan bencana;	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62.324.757	56.883.627
3. pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana; dan	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	Terlaksananya Penanganan Kawasan Pasca Bencana Dengan Direhabilitasi dan Rekonstruksi	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.681.506.826	3.095.837.108
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					618.670.400	648.093.830	



Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Terlaksananya Pertolongan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	527.850.000	557.206.800
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Terlaksananya Pertolongan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.500.000	18.519.980
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pertolongan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.554.400	27.571.050
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.766.000	44.796.000



3.1.1.6 Penyeragaman Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah

Penyeragaman prioritas pembangunan daerah dengan standar pelayanan minimum (SPM) bidang sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.24

Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023

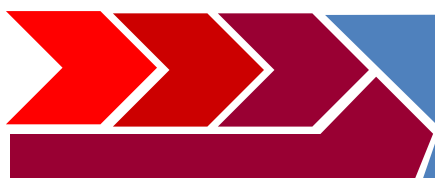
Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					287,717,960	291,032,824	
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					18.259.470	7.200.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah PMKS dan PSKS Yang di Berdayakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang Ataw Barang	Jumlah Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah yang dilakukan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.259.470	7.200.000
		Jumlah PSKS yang diberdayakan					
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					490.432.769	410.610.019	
	Peningkatan Kemampuan	Jumlah PMKS dan PSKS yang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah PSKS Yang Diberdayakan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua	113.606.097	106.106.097

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	diberdayakan	Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota		Kecamatan, Semua Kelurahan		
		Jumlah PMKS dan PSKS Yang di Berdayakan					
		Jumlah PSKS yang diberdayakan					
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS dan PSKS yang diberdayakan	Jumlah Kelompok yang mendapat bantuan	Jumlah PSKS Yang Diberdayakan	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	168.669.957	108.887.207
		Jumlah PSKS yang diberdayakan					
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS dan PSKS yang diberdayakan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah PSKS Yang Diberdayakan	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	208.156.715	195.616.715
		Jumlah PSKS yang diberdayakan					
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					367.626.991	367.741.302
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					367.626.991	367.741.302

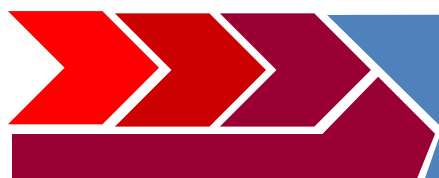


Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Penyediaan Perumahan	Jumlah PMKS yang Menerima Bantuan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Perumahan sesuai dengan standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	Terpenuhiya kebutuhan dasar PMKS	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	302.992.005	299.689.400
		Jumlah PMKS Yang Menerima Bantuan					
	Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS yang Menerima Bantuan	Jumlah Orang Yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	Terpenuhiya kebutuhan dasar PMKS	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.448.532	26.448.532
		Jumlah PMKS Yang Menerima Bantuan					
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS yang Menerima Bantuan	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	Terpenuhiya kebutuhan dasar PMKS	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.186.454	38.186.454
		Jumlah PMKS Yang Menerima Bantuan					
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS yang Menerima Bantuan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	Terpenuhiya kebutuhan dasar PMKS	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	3,416,916

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
		Jumlah PMKS Yang Menerima Bantuan					
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					745.976.048	545.106.888	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					745.976.048	545.106.888	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS yang diberdayakan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang didata	Tersedianya data yang akurat	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	380.588.448	231.662.358
		Tersedianya Data PMKS dan PSKS					
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS yang diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	Tersedianya data yang akurat	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000	0
		Tersedianya Data PMKS dan PSKS					
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah PMKS yang diberdayakan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Tersedianya data yang akurat	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	215.387.600	313.444.530
		Tersedianya Data PMKS dan PSKS					
PROGRAM PENANGANAN BENCANA					358.708.842	368.041.956	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					262.609.725	271.870.839	



Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana yang Tertangani	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.331.400	92.081.400
		Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Yang Dilatih					
	Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana yang Tertangani	Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Korban yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	137.917.500	137.717.872
		Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Yang Dilatih					
	Penanganan Bencana	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Penanganan Khusus Bencana Bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Penanganan Khusus Bencana Bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten /kota	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.520.240	18.825.612



Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Korban Bencana yang Tertangani	Jumlah Kelompok Rentan yang ditangani	Persentase Korban yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.520.240	18.825.612
		Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Yang Dilatih					
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Tertangani	Jumlah korban yang mendapatkan dukungan psikososial	Persentase Korban yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.320.345	4.420.343
		Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Yang Dilatih					
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					96.171.117	96.171.117
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Tertangani	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	Taruna Siaga Bencana yang terlatih	Kab. Bolaang Mongondow , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.171.117	96.171.117



CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

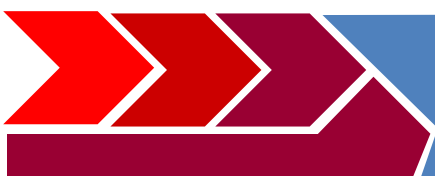
2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan aspek pengukuran kinerja pemerintah pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkaitan erat dengan kondisi perekonomian di Kabupaten Bolaang Mongondow. Meskipun Pandemi covid-19 tahun 2020 turut menyumbang disrupsi pada kehidupan manusia, serta turut dirasakan Negara Republik Indonesia dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan yang menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi Keadaan ini terus dikendalikan sehingga mengharuskan Pemerintah untuk bekerja keras meningkatkan kinerja melalui berbagai hal dalam pencapaian kinerja makro.

Pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian wajib dilakukan, terkait dengan pertumbuhan sektor-sektor industri, pariwisata dan investasi, juga untuk memperkuat sistem kesehatan masyarakat, sistem ketahanan pangan, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana, untuk bencana alam maupun bukan alam, yang secara umum sangat berkaitan erat dengan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan makro ekonomi daerah terkait langsung dengan turunan kebijakan bidang sektoral yang umum dilakukan pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah, kebijakan bidang fiskal yang dibahas bersama eksekutif dan legislatif dan ditetapkan oleh legislatif, dan kebijakan bidang kawasan dan kebijakan bidang regulasi dan kelembagaan.

Arah utama kebijakan makro ekonomi daerah digunakan sebagai alat untuk menuntun kebijakan fiskal, kebijakan moneter khususnya inflasi, kebijakan regulasi dan kelembagaan, kebijakan kawasan (infrastruktur, industri dan ekonomi, permukiman baru), dan kebijakan sektoral melalui semua program yang ditetapkan oleh seluruh Perangkat Daerah. Kebijakan-kebijakan ini mempengaruhi rencana usaha dan investasi yang dilakukan swasta dan masyarakat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan peraturan lainnya. Seluruh kegiatan perangkat daerah dilakukan

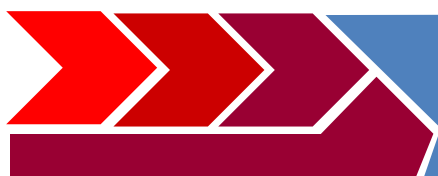


secara terintegrasi, terpadu, dan simultan baik secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi semua aspek kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah, BUMN, BUMD, sektor swasta, kelompok-kelompok produsen, dan perorangan yang menggunakan bahan baku berasal dari sumberdaya lokal dan impor.

Kebijakan strategis yang dilakukan secara konsisten, pada akhir satu periode tertentu satu tahun akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah semakin berkembang dan diharapkan kehidupan Masyarakat semakin meningkat dan sejahtera. Aspek ekonomi daerah menganalisa trend perkembangan ekonomi beberapa tahun terakhir yang difokuskan pada beberapa variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi inflasi, pengangguran, kemiskinan, disparitas antar wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kelembagaan ekonomi penunjang percepatan gerak ekonomi daerah. Tujuannya untuk meningkatkan dimensi pembangunan manusia yang menekankan pada pendidikan dan kesehatan bahkan revolusi mental. Manusia sebagai modal pembangunan daerah akan menjadi pendorong perekonomian jika memiliki kualitas yang mampu bersaing. Lebih jauh dianalisa tentang struktur ekonomi dari sisi produksi dan sisi pengeluaran, struktur pengembangan dan peningkatan infrastruktur dasar, dan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah.

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat



terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didefinisikan oleh United Nations Development Programme (UNDP) sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the choice of people). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan, dan standar hidup layak.

Tabel 2.1
Indeks Pembangunan Manusia Bolaang Mongondow
2019-2023

IPM	Indeks Pembangunan Manusia				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia	67,82	68,77	69,04	69,82	70,48

Sumber : Badan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 mencapai 70,48 atau naik sebesar 1,53 poin dibanding IPM tahun 2022 sebesar 68,82. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat dilihat dari perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka ini mencerminkan pencapaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Angka IPM Kabupaten Bolaang Mongondow periode 2018 - 2022 terus mengalami peningkatan. Pembangunan manusia menurut standar United Nations Development Program (UNDP), terdiri dari 4 kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi, serta IPM 60-69 kategori sedang.

Jika melihat standar United Nations Development Program (UNDP) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten Bolaang Mongondow telah memenuhi kategori tinggi. Hal ini dibarengi dengan memaksimalkan capaian kinerja pemerintah daerah dari target indikator yang ditetapkan dalam mendorong peningkatan 3 variabel dimensi yang menjadi tolak ukur indikator perhitungan IPM, meliputi : a) aspek kesehatan Angka Harapan



Hidup (tahun) b) Aspek Pendidikan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, c) Aspek Pendapatan yaitu standar hidup layak Masyarakat. Berikut Indeks Pembangunan Manusia beserta Komponen-Komponen Pembentuknya di kabupaten bolaang mongondow dari tahun 2021 hingga 2023

Tabel 2.2
Indeks Pembangunan Manusia Beserta Komponen-komponen Pembentuknya di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021-2023

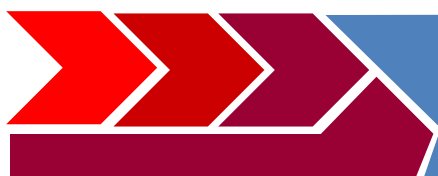
IPM dan Komponen Pembentuknya	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia (Angka Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020)		
	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup (tahun)	71.38	71.68	71.94
Harapan Lama Sekolah (tahun)	8.03	8.17	8.36
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	11.53	11.61	11.63
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (ribu rupiah)	10220.00	10614.00	10915.00
Indeks Pembangunan Manusia	69.04	69.82	70.48

Sumber : BPS Bolaang Mongondow 2024

Untuk melihat kondisi IPM di seluruh kabupaten/kota se Sulawesi Utara dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota se Sulawesi Utara 2021-2023

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia		
	2021	2022	2023
Bolaang Mongondow	69.04	69.82	70.48
Minahasa	77.29	77.72	78.48
Kepulauan Sangihe	72.79	73.35	73.94
Kepulauan Talaud	70.94	71.53	72.22
Minahasa Selatan	73.94	74.5	75.25
Minahasa Utara	75.36	75.92	76.50



Bolaang Mongondow Utara	69.72	70.39	70.97
Kepulauan Sitaro	69.28	70.18	70.81
Minahasa Tenggara	72.16	72.56	72.97
Bolaang Mongondow Selatan	68.20	68.66	69.17
Bolaang Mongondow Timur	68.70	69.35	70.09
Kota Manado	80.53	80.96	81.40
Kota Bitung	75.46	75.94	76.33
Kota Tomohon	78.09	78.65	79.29
Kota Kotamobagu	75.09	75.56	76.01
Sulawesi Utara	74.03	74.52	75.04

Sumber : BPS Bolaang Mongondow Tahun 2024

Jika dilihat pada tabel diatas, IPM Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2021 sebesar 69,04 naik pada tahun 2022 mencapai 69,82 dan terus naik pada tahun 2023 sebesar 70.48. Meski demikian capaian nilai IPM tersebut masih berada dibawah angka IPM provinsi sebesar 75.04 pada tahun 2023. Jika dilihat secara peringkat, IPM Bolmong tahun 2023 berada pada posisi ke-13 atau posisi yang sama dengan peringkat IPM tahun 2022 dari 15 kabupaten Kota yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Jika dibandingkan dengan kabupaten / kota se- "Bolaang Mongondow Raya", IPM Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2021 berada pada posisi ke-3 setelah Kota Kotamobagu. IPM tertinggi dicapai oleh Kota Manado dengan nilai 81.40.

2.1.2 Angka Kemiskinan

Kemiskinan menjadi faktor yang terus diupayakan sebagai salah satu indikator pembangunan. Terdapat 5 (lima) indikator kemiskinan yang menjadi perhatian dalam melihat angka kemiskinan. Hal tersebut yakni Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan kemiskinan serta garis kemiskinan. Sejak tahun 2016 hingga 2023 garis kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow terus mengalami kenaikan yang berarti penduduknya semakin Sejahtera. Tercatat pada tahun 2023, garis kemiskinan tercatat 394.032 dengan penduduk miskin sebanyak 19,02 ribu jiwa dan persentase penduduk miskin sebesar 7,37 persen.



Berdasarkan hasil SUSENAS tahun 2022, diperoleh indeks kedalaman kemiskinan 1,24 dan indeks keparahan kemiskinan 0,31. Sementara untuk tahun 2023 berdasarkan hasil SUSENAS diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan 0,55 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,11. Terjadinya penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan yang juga menurun dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin memperlihatkan penurunan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

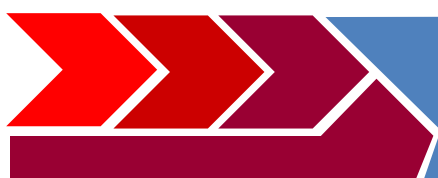
Indikator kemiskinan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow

Indikator Kemiskinan	Indikator Kemiskinan		
	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	19.08	17.96	19.02
Persentase Penduduk Miskin (P0)	7.58	7.04	7.37
Indeks Kedalaman Kemiskinan(P1)	1.14	1.24	0.55
Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2)	0.27	0.31	0.11
Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ Bulan)	343302.00	355639.00	394032.00

Sumber : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow 2024

Jika dilihat dari Angka Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow, pada tahun 2022 angka kemiskinan menurun sebesar 7,04 persen atau berkurang hingga mencapai 0,54 poin dibanding tahun 2021 yang mencapai 7,58 persen. Pada tahun 2023 persentase penduduk miskin naik menjadi 7,37 atau naik 0,33 poin. Hal ini dipengaruhi meningkatnya jumlah penduduk miskin dari 17,96 ribu jiwa di tahun 2022 dan naik menjadi 19,02 ribu jiwa di tahun 2023. Meski demikian garis kemiskinan jika dilihat pada tabel diatas meningkat dari 355.639 Rb/kapita/bulan menjadi 394.032 Rb/kapita/bulan



Sementara itu di tahun 2022 Kabupaten Bolaang Mongodow menempati peringkat ke- 6 dari persentase Tingkat kemiskinan terendah kabupaten/kota dan di tahun 2023 menunjukkan penurunan trend ke peringkat ke 8 dari 15 kabupaten Kota yang memperoleh persentase Tingkat kemiskinan terendah. Sementara itu, angka kemiskinan tertinggi ditempati oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan nilai sebesar 12,04 persen, sedangkan angka kemiskinan terendah adalah Kota Kotamobagu dengan nilai sebesar 5,03 persen. Secara keseluruhan angka persentase kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 mencapai 7,38 dengan trend naik dibanding tahun Tahun 2022 yang hanya mencapai 7,28. Berikut angka kemiskinan kabupaten / kota di Sulawesi Utara pada tabel 2.5 berikut :

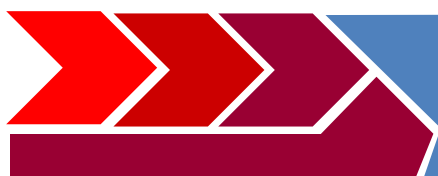
Tabel 2.5
Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2021	2022	2023
Bolaang Mongondow	7.58	7.04	7.37
Minahasa	7.67	7.05	6.87
Kepulauan Sangihe	11.02	10.50	11.01
Kepulauan Talaud	9.00	8.25	8.46
Minahasa Selatan	9.37	9.00	8.89
Minahasa Utara	7.11	6.60	6.65
Bolaang Mongondow Utara	8.03	7.31	7.90
Kepulauan Sitaro	8.94	8.20	8.76
Minahasa Tenggara	12.47	11.78	11.84
Bolaang Mongondow Selatan	12.85	11.92	12.04
Bolaang Mongondow Timur	6.10	5.85	5.80
Kota Manado	6.19	5.85	5.79
Kota Bitung	6.43	6.20	6.56
Kota Tomohon	5.69	5.26	5.60
Kota Kotamobagu	5.74	5.19	5.03
Sulawesi Utara	7.77	7.28	7.38

Source Url:

<https://sulut.bps.go.id/indicator/23/8/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara 2024



2.1.3 Angka Pengangguran

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 4,96 persen. Meskipun jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja meningkat hingga mencapai 194.731 jiwa namu hal tersebut juga diikuti oleh meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja sebesar 121.669 jiwa sehingga hal tersebut mempengaruhi persentase penduduk yang bekerja. Pengangguran Terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada tabel berikut :

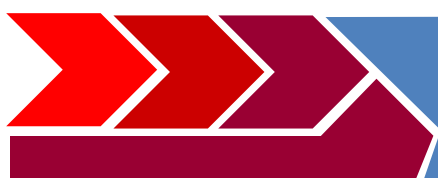
Tabel 2.6
Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow
2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja	116.269	118.506	194.731
Jumlah penduduk angkatan kerja	110.625	112.630	121.669
Persentase penduduk yang bekerja	95,15	95,04	95,39
Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja	5.644	5.876	5.874
Persentase pengangguran terbuka	4,85	4,96	4,61

Sumber: Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Angka 2024 (BPS)

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara/daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan penyumbang terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow.



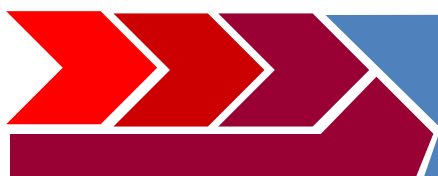
Kondisi Perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2021 melalui upaya pemulihan ekonomi terlihat dengan pertumbuhan sebesar 3,87 persen dan terus merangka naik pada tahun 2022 dengan peningkatan mencapai 5,35 persen. Namun di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow mengalami sedikit perlambatan dengan Tingkat pertumbuhan sebesar 5,18 persen. Pertumbuhan paling tinggi adalah untuk kategori transportasi dan pergudangan (15,44 Persen) sedangkan terendah pada kategori pertambangan dan penggalian sebesar (-4,36 persen)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bolaang Mongondow atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai Rp 8.970,18 juta, merangkak naik tahun 2022 mencapai Rp 9.776,74 juta dan terus meningkat hingga mencapai 10.539,42. Sementara PDRB berdasarkan harga konstan pada tahun 2023 meningkat sebesar 6.345,24 jika dibanding tahun 2022 yang mencapai 6.032,70 juta naik dan tahun 2021 sebesar Rp 5.726,21 juta rupiah.

Produk Domestik Regional bruto Atas dasar harga konstan 2010 Menurut lapangan usaha (persen) dari 17 kategori, kategori pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023, yaitu mencapai Rp 2.505,36 (miliar rupiah) atau 39,78 persen (Distribusi Persentase PDRB Atas Harga Berlaku menurut lapangan usaha), dan diikuti oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda sebesar Rp 781,63 (miliar rupiah) atau 12,36 di ikuti kategori Konstruksi sebesar Rp 781,62 (miliar rupiah) atau 10,62 persen. Sementara penyumbang terendah PDRB tahun 2023 pada kategori Jasa Perusahaan sebesar 0,04 persen atau hanya mencapai Rp 2,03 (miliar rupiah).

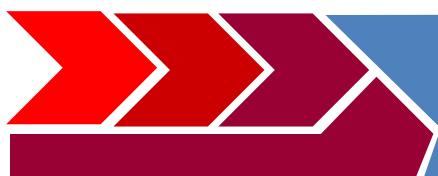
Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bolaang Mongondow
(Persen)
2018-2023

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,31	1,22	0,14	-0,26	6,71	3,18



2	Pertambangan dan Penggalian	27,93	18,7	12,71	15,97	-0,98	-4,36
3	Industri Pengolahan	6,19	100,44	6,90	10,15	6,58	6,79
4	Pengandaan listrik dan Gas	3,98	7,02	8,57	7,64	9,17	4,66
5	Pengandaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,85	5,01	5,17	5,84	2,24	1,08
6	Konstruksi	2,85	5,07	-5,61	5,65	3,81	9,14
7	Perdagangan Besar dan eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,36	6,84	-0,80	4,04	8,34	10,61
8	Transportasi Pergudangan	7,36	6,43	-5,81	2,25	8,26	15,44
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,19	6,94	-7,75	5,50	9,39	10,43
10	Informasi dan Komunikasi	6,21	3,02	9,03	3,89	4,48	8,6
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-7,40	-1,12	8,93	4,85	-6,76	-3,13
12	Real estate	6,57	3,05	-0,83	0,61	2,68	5,05
13	Jasa Perusahaan	5,20	5,93	-2,09	3,84	5,77	4,14
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	5,30	0,44	-1,73	3,77	1,65	6,51
15	Jasa Pendidikan	9,63	7,23	3,31	4,53	7,58	8,37
16	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,82	7,68	8,95	9,41	6,36	7,63
17	Jasa Lainnya	11,39	7,28	0,70	4,76	6,49	15,17
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		7,49	7,89	0,98	3,87	5,35	5,18

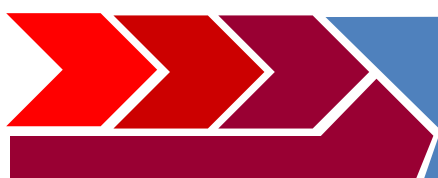
Sumber : Bolaang Mongondow Dalam Angka 2024



Untuk laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/ Kota se provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota

No	Kabupaten	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi SULUT (Persen), 2018-2023					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bolaang Mongondow	7,49	7,89	0,98	3,87	5,35	5,18
2	Minahasa	6,10	5,79	- 1,03	3,53	5,47	5,55
3	Kepulauan Sangihe	5,5	5,42	0,45	5,99	5,45	5,3
4	Kepulauan Talaud	5,02	4,69	0,43	3,34	5,22	5,21
5	Minahasa Selatan	6,09	5,97	- 0,77	4,91	5,41	5,54
6	Minahasa Utara	6,41	6,35	- 0,55	5,96	5,50	5,41
7	Bolaang Mongondow Utara	6,18	6,17	0,71	3,46	5,52	5,43
8	Siau Tagulandang Biaro	6,73	6,65	1,03	4,43	5,19	5,25
9	Minahasa Tenggara	6,00	5,98	- 0,64	4,29	5,30	5,38
10	Bolaang Mongondow Selatan	6,56	6,39	0,63	3,74	5,20	5,33
11	Bolaang Mongondow Timur	5,06	4,80	0,16	3,05	5,18	5,35
Kota							
1	Kota Manado	6,65	6,05	- 3,14	5,14	5,64	5,52
2	Kota Bitung	6,01	4,06	1,37	4,60	5,61	5,66



3	Kota Tomohon	6,12	6,76	- 0,41	2,05	5,17	5,32
4	Kota Kotamobagu	6,66	6,13	0,20	4,20	5,15	5,4
Sulawesi Utara		6,00	5,65	- 0,99	4,16	5,42	5,48

Sumber : Bolaang Mongondow Dalam Angka 2024

2.1.5 Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka negara tersebut akan dipandang sebagai negara yang makmur oleh negara-negara lainnya di dunia. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. Dimana, dalam bidang ekonomi PDB atau Produk Domestik Bruto merupakan nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB digunakan sebagai salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. Sehingga karena PDB berkaitan erat dengan Pendapatan Nasional, maka ia juga terkait erat dengan refleksi pendapatan per kapita di Indonesia.

Kesejahteraan penduduk di suatu wilayah kiranya bisa dilihat dari tingkat pendapatan masyarakatnya. Hanya saja hingga saat ini data mengenai pendapatan masyarakat masih sulit untuk didapatkan. Sebagai alternatifnya pendekatan pengukuran kesejahteraan ekonomi didekati dengan menggunakan pengeluaran penduduk. Dalam prosesnya pengeluaran penduduk digunakan tidak hanya untuk mengukur tingkat kesejahteraan, akan tetapi juga digunakan dalam penghitungan kemiskinan maupun untuk melihat ketimpangan.

Data pengeluaran konsumsi yang terekam dalam Susenas terdiri atas dua kelompok, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Tingkat kebutuhan/permintaan terhadap kedua kelompok tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas, kita akan mendahulukan pemenuhan kebutuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan, maka



lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan. Dengan kata lain, persentase pengeluaran bukan makanan akan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk.

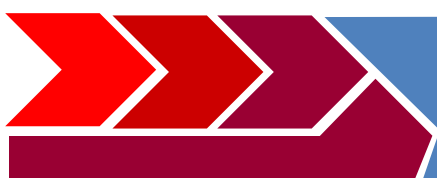
Pergeseran komposisi dan pola pengeluaran tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan secara umum rendah, sedangkan elastisitas permintaan terhadap kebutuhan bukan makanan relatif tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan, sedangkan sisa pendapatan dapat disimpan sebagai tabungan/investasi. Uraian di atas menjelaskan bahwa pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, sedangkan pergeseran komposisi pengeluaran dapat mengindikasikan perubahan tingkat kesejahteraan penduduk.

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 sebesar 1.120.760 rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 1.060.137 rupiah. Dari pengeluaran ini, hampir 57 persennya digunakan untuk pengeluaran makanan, dan sisanya yaitu sebanyak 43 persen dialokasikan untuk pengeluaran bukan makanan.

Pada pengeluaran komoditas makanan, pengeluaran terbesar ada di pengeluaran makanan atau minuman jadi senilai 153.265 rupiah atau 13,68 persen dari total rata-rata pengeluaran per kapita. Sedangkan untuk pengeluaran lainnya sebesar 8.258 rupiah atau sekitar 0,74 persen.

Sementara itu, pengeluaran pada kelompok komoditas bukan makanan, pengeluaran terbesar adalah untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 261.668. Nilai ini mencapai lebih dari setengah pengeluaran bukan makanan dan menjadi subkelompok pengeluaran terbesar secara keseluruhan yang mencapai 23,35 persen.

Berdasarkan pada kelompok pengeluarannya, penduduk terbanyak berada pada kelompok pengeluaran 500.000-749.999 rupiah, dengan persentase sebesar 26,77 persen, terbanyak berikutnya pada kelompok Rp. 1.000.000-1.499.999 dengan persentase penduduk sebanyak 22,49 persen disusul oleh



kelompok pengeluaran diatas Rp. 1.500.000 rupiah sekitar 21,78 persen.

Disisi lain, penduduk dengan pengeluaran perkapita pada kelompok terendah (200.000-299.999 rupiah) memiliki persentase jumlah terkecil yaitu sebanyak 0,24persen.

Persentase Penduduk menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Bolaang Mongondow 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

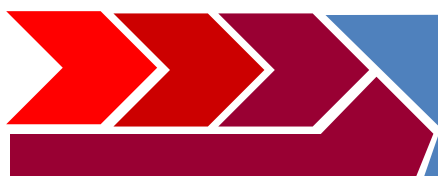
Tabel 2.9
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Bolaang Mongondow 2023

Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Bolaang Mongondow 2023	
Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan (rupiah)	Persentase Penduduk
< 150.000	0,00
150.000-199.999	0,00
200.000-299.999	0,24
300.000-499.999	9,83
500.000-749.999	26,77
750-000-999.999	18,88
1.000.000-1.499.999	22,49
>1.500.000	21,78
Jumlah/ Total	100,00

Sumber : Bolaang Mongondow Dalam Angka 2024

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Menurut Antonio Carrales, seorang profesional ekonomi di University College London, Gini Ratio menyediakan indeks untuk mengukur ketimpangan tersebut. Gini Ratio dimaknai sebagai sebuah alat ukur tingkat kesenjangan sosial di masyarakat. Indeks ini menggunakan ukuran skala 0 sampai dengan 1, yaitu angka 0 menunjukkan tidak adanya kesenjangan sosial di masyarakat dan angka 1 menunjukkan adanya kesenjangan sosial yang ekstrem di masyarakat. Gini ratio Bolaang Mongondow dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi meski demikian belum adanya kesenjangan sosial ditingkatkan Masyarakat. Pada Tahun

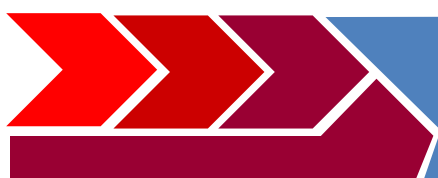


2020 Gini ratio Kabupaten Bolaang Mongondow mencapai 0.310 dan meningkat pada tahun 2021 hingga mencapai 0.360 kemudian turun pada angka 0.317 di tahun 2022 dan terus menurun pada tahun 2023 mencapai 0,311. Angka ini menunjukkan bahwa di Bolaang Mongondow angka tersebut semakin kecil atau mendekati nol menandakan semakin meratanya distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi. Sementara itu Gini Ratio Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 sebesar 0.365 dan tetap bertahan pada angka 0.365 di tahun 2022 dan merangkat naik pada angka 0,370. Ketimpangan pendapatan mengacu pada sejauh mana pendapatan di distribusikan secara merata diantara populasi. Ketimpangan pendapatan juga dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara yang kaya dan yang tidak kaya.

Tabel 2.10

Ratio Gini Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota		
	2021	2022	2023
Bolaang Mongondow	0.360	0.317	0.311
Minahasa	0.387	0.308	0.327
Kepulauan Sangihe	0.340	0.323	0.356
Kepulauan Talaud	0.328	0.356	0.339
Minahasa Selatan	0.366	0.382	0.350
Minahasa Utara	0.363	0.385	0.408
Bolaang Mongondow Utara	0.328	0.351	0.380
Kepulauan Sitaro	0.344	0.323	0.366
Minahasa Tenggara	0.357	0.351	0.320
Bolaang Mongondow Selatan	0.329	0.307	0.310
Bolaang Mongondow Timur	0.370	0.370	0.324
Kota Manado	0.346	0.373	0.406
Kota Bitung	0.324	0.346	0.371
Kota Tomohon	0.354	0.374	0.339
Kota Kotamobagu	0.346	0.404	0.375
Sulawesi Utara	0.365	0.365	0.370



2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan gambaran atas pencapaian kinerja pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten bolaang mongondow tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten bolaang mongondow.

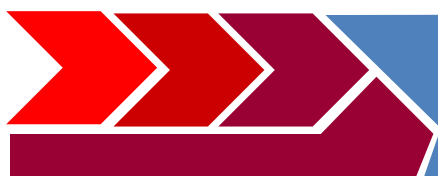
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah RPD Tahun 2023-2026. Tahun 2023 merupakan peletakan pondasi awal pembangunan sekaligus merupakan tahun Kesatu dan tahun momentum untuk merefleksikan pelaksanaan pembangunan daerah di awal pemerintahan dengan Tema pembangunan Tahun 2023 yakni "Peningkatan pembangunan infrastruktur, sosial dan ekonomi pada berbagai bidang, yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, tangguh dan berdaya saing" yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2023-2026.

2.3.1 Pengukuran Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2023

Tabel 2.11
Pengukuran Kinerja Tujuan Tahun 2023

Tujuan 1 Meningkatkan Mutu Pendidikan Dan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berdaya Saing				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,80	69,62 (BPS)	101
Tujuan 2 Terbangunnya Infrastruktur Yang Memadai				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Infrastruktur	66	65	98,48
Tujuan 3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,96	*75,33 (Statistik Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2023)	105%

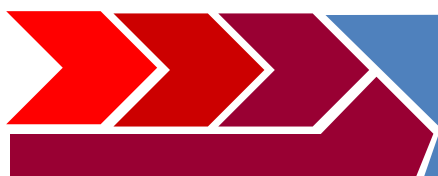


Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,90	5,18 % (Bolmong Dalam Angka 2023)	105,71
2	Gini Ratio	0,335	0,311 (BPS)	92,82%
Tujuan 5 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Rata-Rata Capaian Opini BPK, Nilai Sakip, LPPD, Indeks Pelayanan Publik	77,5	65,66	84,72%
Tujuan 6 Meningkatnya Kemandirian Pangan Daerah				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Ketahanan Pangan	84,94	*83,26 (Indeks Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2023)	98,02%

Tabel 2.12

Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2023

Sasaran 1 Meningkatnya Akses Dan Kualitas Layanan Pendidikan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pendidikan (Tahun)	13,50	11,63	86,14
Sasaran 2 Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Semesta				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Rata-Rata Usia Harapan Hidup (Angka)	69,55	70,07 (BPS)	101%
Sasaran 3 Menurunnya Angka Kemiskinan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Kemiskinan (%)	7	7,37 (BPS)	94,97%
Sasaran 4 Meningkatnya Infrastruktur Transportasi				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Kendaraan (Angka)	23,39	23,39	100%
2	Persentase Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik (%)	67	67	100%



Sasaran 5 Meningkatnya Layanan Air Minum Layak				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak (%)	71,70	92,94 (BPS)	130%
Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Air				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Air (Angka)	50,00	50,00 (Lakip DLH)	100%
Sasaran 7 Meningkatnya Kualitas Udara				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Udara (Angka)	95.43	95,87 (Lakip DLH)	101%
Sasaran 8 Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Tutupan Lahan (Angka)	75,00	75,72 (Lakip DLH)	100,96
Sasaran 9 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Kontribusi Pertumbuhan Parb Sektor Industri Pengolahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (% / Tahun)	10,10	6,17	61,08
2	Kontribusi Pertumbuhan Parb Sektor Pertanian Dan Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (% / Tahun)	1,22	3,18	260,65
Sasaran 10 Meningkatnya Daya Tarik Investasi Berskala Nasional				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (Pma/Pmdn) (% / Tahun)	10	7,24	72,40%
Sasaran 11 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pelayanan	Kuning	Hijau (95,05)	176%



	Publik (Zona)			
Sasaran 12				
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Opini Bpk (Opini)	WTP	WTP (100)	100
2	Nilai Sakip (Nilai/Predikat)	B	B (64,56)	107 %
3	Laporan Penyelenggara an Pemerintah Daerah (Angka)	3,6	3,0528	84,8
Sasaran 13				
Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Ketersediaan Pangan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Pangan (Angka)	1,08	1,16 (Lakip DKP)	107,40100

2.3.2 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023

Pengukuran kinerja terhadap Tujuan, indikator kinerja tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran yang telah dicapai di atas berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja Tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut :

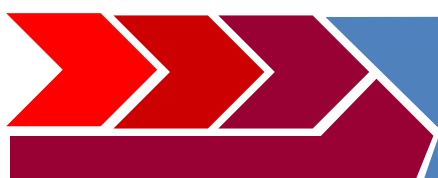
ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN 1

“meningkatkan mutu pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat yang berdaya saing”

Tujuan 1				
Meningkatkan Mutu Pendidikan Dan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berdaya Saing				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,80	69,62 (BPS)	101


Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dasarnya adalah pengukuran perbandingan dan harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua. IPM pada awalnya digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara berkembang atau negara terkebelakang dan juga mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang



mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia 2021-2023

< back 

Data series subyek: **Indeks Pembangunan Manusia** juga dapat diakses melalui [Fitur Tabel Dinamis](#).

Data Series : **2021-2023** | 2018-2020 | 2015-2017 | 2012-2014 | 2010-2011

Search:

Komponen IPM	Indeks Pembangunan Manusia		
	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,45	69,78	70,07
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,03	8,17	8,36
Harapan lama Sekolah (Tahun)	11,53	11,61	11,63
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	10 220,00	10 614,00	10 915,00
Indeks Pembangunan Manusia	68,16	68,95	69,62

Indeks Pembangunan Manusia Beserta Komponen-komponen Pembentuknya di Kabupaten Bolaang Mongondow

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

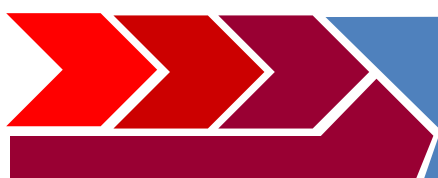
Angka IPM Kabupaten Bolaang Mongondow terus mengalami kenaikan dari 68,16 di Tahun 2021 menjadi 68,95 di Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 meningkat lagi menjadi 69,62 dengan Capaian 101 Persen :

No	Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,16	68,95	69,62

ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 1

“Meningkatnya Akses Dan Kualitas Layanan Pendidikan”

Sasaran 1				
Meningkatnya Akses Dan Kualitas Layanan Pendidikan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pendidikan (Tahun)	13,50	11,63	86,14



Indeks Pendidikan

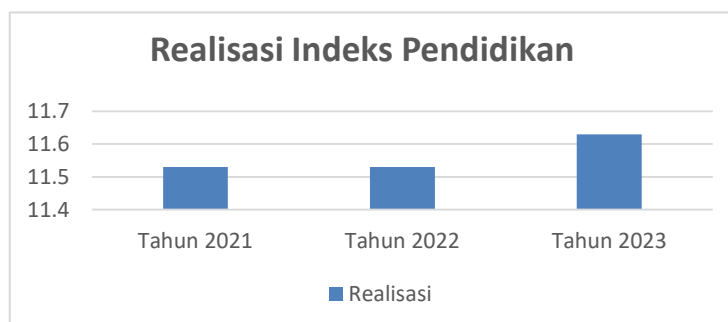
Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang Pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya manusia yang tercermin didalamnya sangat menentukan tingkat produktivitas suatu bangsa. Indeks Pendidikan diukur dari kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dan rata-rata Tahun bersekolah. Kemampuan baca-tulis orang dewasa tercermin dari data angka melek huruf (literacy rate) yaitu proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis (baik huruf latin maupun huruf lainnya). Rata-rata lama Sekolah (means-years of schooling) menunjukkan jenjang Pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun keatas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya menggiat peduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah.

Perbandingan Realisasi Indeks Pendidikan Tahun 2021-2023

No	Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Indeks Pendidikan	11,53	11,53	11,63

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa secara rata-rata Indeks Pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar 0,10. Selama periode Tahun 2021-2023. Indeks Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan trend yang positif, yakni mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Rata-rata persentase peningkatan setiap tahunnya sebesar 0,10%. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2023 yakni sebesar 0,10%.

Grafik berikut menggambarkan capaian target dan realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.



ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 2 “Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Semesta”

Sasaran 2				
Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Semesta				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Rata-Rata Usia Harapan Hidup (Angka)	69,55	70,07 (BPS)	101%

Rata - Rata Usia Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan atau ekspetasi dari usia bayi yang baru lahir mencapai kematiannya. Angka usia harapan hidup merupakan indikator kualitas kesehatan. Perhitungan capaian kinerja indikator Usia Harapan Hidup (UHH) = (Jumlah semua Umur masing-masing yang meninggal / jumlah orang yang meninggal pada tahun itu)

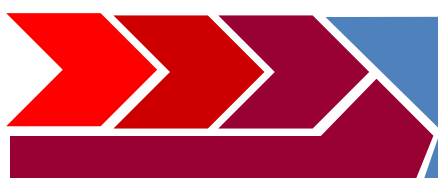
Indikator kinerja Angka Usia Harapan Hidup dengan target sebesar 69,55 Tahun 2023, capaian realisasi sebesar 70,07 Tahun 2023. Indikator ini mencapai target capaian realisasi sebesar 101%.

Perbandingan Realisasi Rata-rata Usia Harapan Tahun 2021-2023

No	Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Rata-Rata Usia Harapan Hidup	69,45	69,78	70,07

Capaian kinerja angka usia harapan hidup dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. dimana angka usia harapan hidup tahun 2023 sebesar 70,07 meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,29 Tahun dari Angka Harapan hidup 69,78 tahun, dan di bandingkan Tahun 2022 dengan Tahun 2021 mengalami peningkatan 0,33 Tahun.

Tahun	Target Angka Usia Harapan Hidup Bolaang Mongondow	Capaian Angka Usia Harapan Hidup Bolaang Mongondow	Angka Usia Harapan Hidup Sulawesi Utara	Angka Usia Harapan Hidup Nasional
2017	68,61	68,61	71,05	71,11
2018	68,86	68,86	71,17	71,25



2019	69,10	69,22	71,63	71,39
2020	69,35	69,36	71,75	71,53
2021	69,60	69,45	71,81	71,61
2022	69,85	69,78	72,08	71,85
2023	70,07	70,14	72,08	71,85

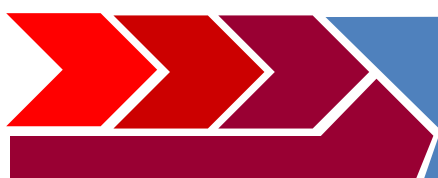
ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 3 "MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN"

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Kemiskinan	7	7,37	94,97%

Sumber : BPS Bolaang Mongondow Tahun 2024

Kemiskinan menjadi faktor yang terus diupayakan sebagai salah satu indikator pembangunan. Terdapat 5 (lima) indikator kemiskinan yang menjadi perhatian dalam melihat angka kemiskinan. Hal tersebut yakni Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan kemiskinan serta garis kemiskinan. Sejak tahun 2016 hingga 2023 garis kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow terus mengalami kenaikan yang berarti penduduknya semakin Sejahtera. Tercatat pada tahun 2023, garis kemiskinan tercatat 394.032 dengan penduduk miskin sebanyak 19,02 ribu jiwa dan persentase penduduk miskin sebesar 7,37 persen.

Berdasarkan hasil SUSENAS tahun 2022, diperoleh indeks kedalaman kemiskinan 1,24 dan indeks keparahan kemiskinan 0,31. Sementara untuk tahun 2023 berdasarkan hasil SUSENAS diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan 0,55 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,11. Terjadinya penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan yang juga menurun dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin memperlihatkan penurunan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.



Perbandingan Realisasi Indikator Angka Kemiskinan Tahun 2021-2023

No	Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Angka Kemiskinan	7,58	7,04	7.37

Sumber : BPS Bolaang Mongondow Tahun 2024

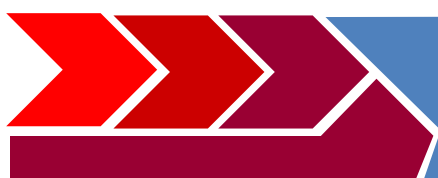
Jika dilihat dari Angka Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow, pada tahun 2022 angka kemiskinan menurun sebesar 7,04 persen atau berkurang hingga mencapai 0,54 poin dibanding tahun 2021 yang mencapai 7,58 persen. Pada tahun 2023 persentase penduduk miskin naik menjadi 7,37 atau naik 0,33 poin. Hal ini dipengaruhi meningkatnya jumlah penduduk miskin dari 17,96 ribu jiwa di tahun 2022 dan naik menjadi 19,02 ribu jiwa di tahun 2023.

Sementara itu di tahun 2022 Kabupaten Bolaang Mongondow menempati peringkat ke- 6 dari persentase Tingkat kemiskinan terendah kabupaten/kota dan di tahun 2023 menunjukkan penurunan trend ke peringkat ke 8 dari 15 kabupaten Kota yang memperoleh persentase Tingkat kemiskinan terendah. Sementara itu, angka kemiskinan tertinggi ditempati oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan nilai sebesar 12,04 persen, sedangkan angka kemiskinan terendah adalah Kota Kotamobagu dengan nilai sebesar 5,03 persen. Secara keseluruhan angka persentase kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 mencapai 7,38 dengan trend naik dibanding tahun Tahun 2022 yang hanya mencapai 7,28. Berikut angka kemiskinan kabupaten / kota di Sulawesi Utara pada tabel 2.5 berikut :

Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2021	2022	2023
Bolaang Mongondow	7.58	7.04	7.37
Minahasa	7.67	7.05	6.87
Kepulauan Sangihe	11.02	10.50	11.01
Kepulauan Talaud	9.00	8.25	8.46
Minahasa Selatan	9.37	9.00	8.89
Minahasa Utara	7.11	6.60	6.65
Bolaang Mongondow Utara	8.03	7.31	7.90
Kepulauan Sitaro	8.94	8.20	8.76
Minahasa Tenggara	12.47	11.78	11.84
Bolaang Mongondow Selatan	12.85	11.92	12.04
Bolaang Mongondow Timur	6.10	5.85	5.80
Kota Manado	6.19	5.85	5.79
Kota Bitung	6.43	6.20	6.56
Kota Tomohon	5.69	5.26	5.60
Kota Kotamobagu	5.74	5.19	5.03
Sulawesi Utara	7.77	7.28	7.38

Source Url: <https://sulut.bps.go.id/indikator/23/8/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>



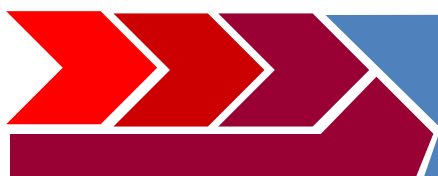
ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN 2 “TERBANGUNNYA INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI”

Tujuan 2 Terbangunnya Infrastruktur Yang Memadai				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Infrastruktur	66	56,11	98,48

Pembangunan infrastruktur secara masif dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia digagas guna memastikan terjaminnya ketersediaan infrastruktur agar dapat menjadi lompatan bagi Indonesia untuk menuju negara maju, sekaligus dapat lepas dari perangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”.

Urgensi keberlanjutan pembangunan infrastruktur semakin dirasakan ditengah meningkat tajamnya persaingan ekonomi antar kawasan, karena dengan membangun infrastruktur sejatinya adalah membangun masa depan sebuah peradaban, karena dapat berperan sebagai stimulus Bergeraknya berKabupaten Bolaang Mongondow aktivitas ekonomi. Melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata di seluruh tanah air, kita tentunya berharap dapat tercipta konektivitas yang kuat antarwilayah, menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memupus kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan daya saing dan stimulus pertumbuhan ekonomi guna mencapai negara maju.

Tabel di bawah memuat data Capaian Indeks Infrastruktur 3 tahun terakhir dimana untuk tahun 2023 realisasi nilai Indeks Infrastruktur Kabupaten Bolaang Mongondow 56,11 artinya capaian Nilai Indeks Infrastruktur Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 mencapai 96,83 %. Bila dibandingkan dengan persentase capaian pada Tahun 2021, terdapat selisih penurunan sebesar 1,52 % sebagai hasil kalkulasi antara Nilai Target dan Realisasi Indeks infrastruktur masing-masing 64% dan 61%. Selanjutnya pada Tahun 2023 dari Target 65%, Nilai Indeks Infrastruktur Kabupaten Bolaang Mongondow terealisasi sebesar 62,31% dengan persentase capaian 95,86%. Grafik dibawah ini menggambarkan Target dan Realisasi Indeks Infrastruktur Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2020 – 2023.



No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Indeks Infrastruktur(%)	58,90	64,53	56,11

ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 4 “Meningkatnya Infrastruktur Transportasi”

Sasaran 4 Meningkatnya Infrastruktur Transportasi				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Kendaraan (Angka)	23,39	20,01	85,54%
2	Persentase Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik (%)	67	67	100%

Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Kendaraan (Angka)

Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor.

Indikator Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun 2023 dri target 23,39 terealisasi 20,11 dengan Capaian 85,54%.

Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Persentase Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik (%)

Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap untuk tahun 2023 adalah 67% dengan capaian 100%. Capaian tahun 2023 sama dari tahun sebelumnya. Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap Tahun 2022 menunjukkan realisasi capaian Kinerja 100%.

Realisasi Peningkatan Panjang jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Tahun 2023 mencapai 100%. untuk capaian Keberhasilan ini tercapai karena



Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki pagu anggaran APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk jalan dari kementerian PUPR yang cukup signifikan sehingga bisa mencapai realisasi tersebut diatas dan capaian kinerja ini didukung oleh program penyelenggaraan jalan.

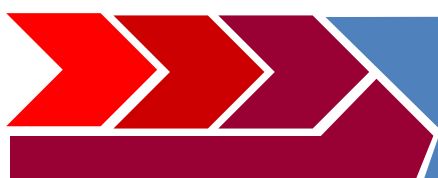
No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Persentase Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik (%)	67	67	67

ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 5 "Meningkatnya Layanan Air Minum Layak"

Sasaran 5 Meningkatnya Layanan Air Minum Layak				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak (%)	71,70	92,94 (BPS)	130%

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 memiliki Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak 92,94% dari target 71,70 dengan Capaian Kinerja 130%.

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.



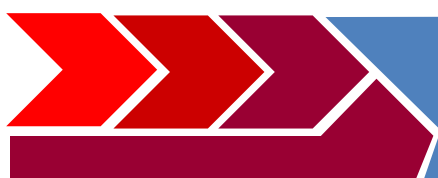
ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN 3 “MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP”

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,96	*75,33 (Statistik Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2023)	105%

Pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh - sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Pengukuran kualitas lingkungan secara umum dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya.

Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks Pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 dengan target Nilai Indeks 71,96 terealisasi sebesar 75,33. Nilai Indeks tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2022 yaitu 71,95% dengan kinerja sebesar 89,93% atas target yang sama yakni 80%. Selanjutnya perbandingan Capaian di Tahun 2020, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow mengalami Penurunan sebesar 11,78%. data ini merujuk pada Hasil Perhitungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow.

No	Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		71,95	75,33



ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 6 "MENINGKATNYA KUALITAS AIR"

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Air	50,00	50,00	100%

Capaian indikator Indeks Kualitas Air berdasarkan Tabel diatas Pada beberapa Tahun Terakhir. Pada Tahun 2023 dari perhitungan Indeks Kualitas Air pada tahun 2023 Dari Target 50 terealisasi sebesar 50 dengan Capaian Kinerja Tahun 2023 adalah 100% dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2022 sebesar 104,75% Indikator Indeks Kualitas Air Meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1,071 %. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan kualitas air di tahun 2023, penurunan yang signifikan dimana terdapat alih fungsi lahan menjadi pertambangan illegal.

Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Air Tahun 2021-2023

No	Indikator	Realisasi	Realisasi	Realisasi
		2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Air	44,55	46,67	50,00

ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 8 "MENINGKATNYA KUALITAS TUTUPAN LAHAN"

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Tutupan Lahan	75,00	75,72	101%

Capaian indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan berdasarkan Tabel diatas Pada beberapa Tahun Terakhir. Pada Tahun 2023 dari perhitungan Indeks Tutupan Lahan pada tahun 2023 Dari Target 75,00 terealisasi sebesar 75,72 dengan Capaian Kinerja Tahun 2023 adalah 101% dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2022 sebesar 100% Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan Meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1,02 %. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan kualitas Tutupan



Lahan di tahun 2023, penurunan yang signifikan dimana terdapat alih fungsi lahan menjadi pertambangan illegal.

Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Tutupan Lahan Tahun 2021-2023

No	Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Indeks Tutupan Lahan	74,90	74,90	75,72

Trend 3 Tahun Terakhir indicator Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2021-2023 berdasarkan Tabel diatas Capaian Tahun 2023 sebesar 75,72, dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2022 sebesar 74,90 meningkat 0,80%. Capaian Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2022 mendapatkan Capaian Realisasi yang sama.

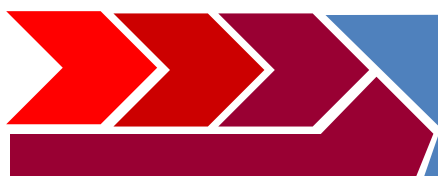
ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN 4 “MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI”

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,90	5,18 % (Bolmong Dalam Angka 2023)	105,71
2	Gino Ratio	0,335	0,311 (BPS)	92,83

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara/daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Berdasarkan tabel Tujuan Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi, dengan indikator tujuan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023, dengan Target 4,90 terealisasi 5,18 dengan Capaian Kinerja 105,71%. Dibandingkan dengan Tahun 2022 adanya Peningkatan Pertumbuhan ekonomi sebesar 0,18. Selanjutnya dibandingkan



dengan Tahun 2021, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow dibandingkan dengan Tahun 2022 mencapai 1,13% dengan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,87. Pertumbuhan tersebut menurun disebabkan dengan adanya Pandemi Covid-19. Pasca Pandemi Covid-19 tahun 2023, Usaha perbaikan ekonomi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan hasil positif ditandai dengan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow yang berangsur membaik pada 3(tiga) Tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya data pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

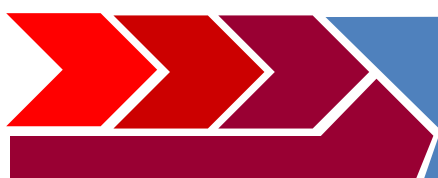
No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,87	5	5,18

Pertumbuhan Paling tinggi adalah untuk kategori pertambangan dan penggalian (10,55%), sedangkan yang paling rendah terdapat pada kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (-7,76%). Faktor Pandemi Covid-19 menjadi penyebab terjadinya Penurunan Pertumbuhan Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum tersebut, sama halnya dengan yang terjadi pada beberapa kategori lain yang mengalami yang mengalami penurunan seperti konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan real estate, jasa perusahaan dan administrasi Pemerintahan.

Adapun strategi untuk menjaga Pertumbuhan Ekonomi dengan melakukan refocusing Anggaran pada Sektor Pertanian Khususnya Bantuan Bibit, Pupuk, serta Bantuan Lainnya untuk menjaga produktifitas Petani Sehingga Geliat Perekonomian tetap terjaga.

Gini Ratio

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat juga menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan ketimpangan antar wilayah (yang maju dan yang tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan maupun antar wilayah dapat memunculkan permasalahan antara lain kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam.

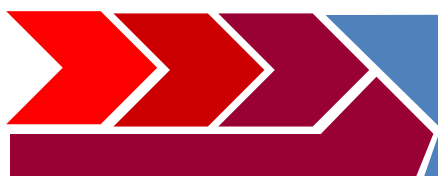


Ketimpangan ekonomi pada dimensi distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat. Fenomena ini telah menjadi perhatian publik, sehingga upaya evaluasi yang sangat mendesak dilakukan. Dari hasil evaluasi diharapkan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya juga akan membawa konsekuensi berkurangnya tingkat ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat sejalan dengan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Apabila ketimpangan ini dibiarkan semakin melebar maka akan semakin mendistorsi hasil pembangunan.

Oleh karena itu upaya mengetahui besaran ketimpangan pengeluaran antar golongan penduduk maupun secara spasial perlu dilakukan. Indeks Gini (gini ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Berdasarkan nilai gini ratio Kabupaten Bolaang Mongondow dalam jangka waktu 3 tahun terakhir (Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023) berada kategori rendah yaitu berada pada posisi dibawah 0,30. Namun perlu menjadi perhatian pada Tahun 2023 nilai gini ratio Kabupaten Bolaang Mongondow mencapai 0,298 artinya hampir mendekati tingkat sedang (0,30), artinya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat meningkat. Pada Tahun 2022 posisi Kabupaten Bolaang Mongondow berada pada nomor 4 tertinggi di S dan ditingkat Kabupaten berada posisi pertama tertinggi.

Gini ratio Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2021 sebesar 0,365, tahun 2022 sama 0,251 namun tahun 2023 naik tajam mencapai 0,370 hal ini disebabkan dampak pandemi Covid 19 yang menyebabkan naiknya angka keparahan kemiskinan.



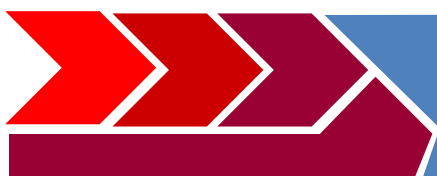
No	Indikator	Realisasi	Realisasi	Realisasi
		2021	2022	2023
1	Gini Ratio	0,365	0,365	0,370

Secara umum perkembangan gini ratio Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow pada grafik diatas menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran antara kelompok kaya dan miskin tidak terlalu mengkhawatirkan. Namun demikian, yang perlu dicermati adalah trend ketimpangan yang cenderung meningkat dalam periode 3 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Utara bahwa tingkat kesenjangan di Kabupaten Bolaang Mongondow masih dibawah.

Struktur ekonomi Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow, yang mempengaruhi nilai gini ratio adalah Sektor Agraris, dimana Lebih dari 29,22 persen perekonomian didukung oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Bahwa ketimpangan di wilayah agraris lebih kecil dibandingkan dengan wilayah industri karena rendahnya level penghasilan yang diterima oleh individu di wilayah agraris tersebut. Adapun tingkat ketimpangan mengalami peningkatan pada wilayah dengan struktur perekonomian yang bercorak industri. (Kuznet, dalam Prastowo dan kawan-kawan, 2014).

Berdasarkan Perkembangan gini ratio Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow antara Tahun 2021 s/d 2023 cenderung meningkat, maka upaya yang dilakukan antara lain

1. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian untuk mengejar ketertinggalan dari sektor lainnya.
2. Perlu adanya upaya untuk mendorong transfer surplus tenaga kerja di sektor pertanian ke sektor ekonomi kreatif dengan mengadakan pelatihan maupun kursus keterampilan termasuk penguatan pangsa pasar dan program "bapak asuh".
3. Hampir separuh dari tenaga kerja yang ada berlatar belakang tingkat pendidikan menengah ke bawah. Oleh karena itu, perlu dibuat program untuk menjaga tingkat APM (Angka Partisipasi Murni) agar tidak turun dan meningkatkan target APM untuk level Sekolah Menengah.
4. Dalam jangka pendek, intervensi terhadap kelompok pengeluaran terbawah dapat dilakukan dengan



melanjutkan program raskin maupun bantuan tunai. Namun demikian kebijakan ini perlu selalu dimonitor dan dievaluasi mengingat dalam jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan dan inefisiensi anggaran.

5. Perlu dibuatkan program pengelolaan ekonomi (pariwisata) berbasis komunitas dengan mengedepankan modal sosial (kultur Kabupaten Bolaang Mongondow). Program tersebut harus mengutamakan keterlibatan dari kelompok masyarakat pengeluaran terbawah.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 9

“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah”

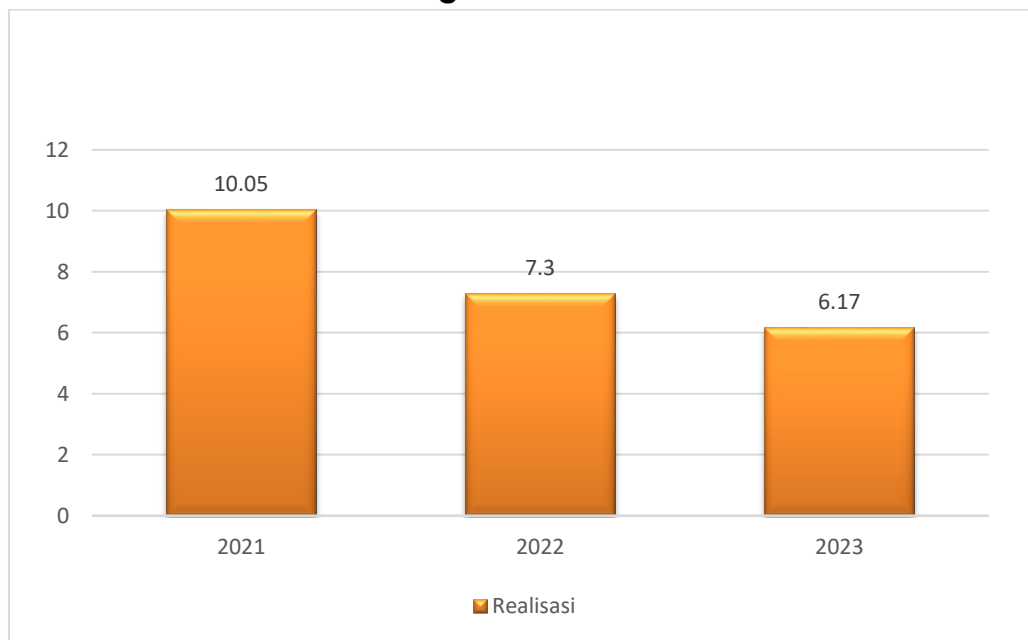
Sasaran 9 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Kontribusi Pertumbuhan Pdrb Sektor Industri Pengolahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (% / Tahun)	10,10	6,17	61,08
2	Kontribusi Pertumbuhan Pdrb Sektor Pertanian Dan Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (% / Tahun)	1,22	3,18	260,65

Kontribusi Pertumbuhan Pdrb Sektor Industri Pengolahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (% / Tahun)

Indikator Kontribusi Pertumbuhan Pdrb Sektor Industri Pengolahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 pada Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bolaang Mongondow (persen), dengan Target 10,10% terealisasi 6,17% dengan Capaian Kinerja Sebesar 61,08%. dibandingkan dengan Tahun 2022 adanya Penurunan di sektor Industri Pengolahan 1,13% dari realisasi Tahun 2022 sebesar 7,13. Hal ini disebabkan Beberapa Industri Pengolahan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Khususnya Produk Unggulan yang ada di Promosikan di Pemeran – Pameran secara Lokal dan Nasional. Berdampak pada Peningkatan Presentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Pada Tahun 2022.



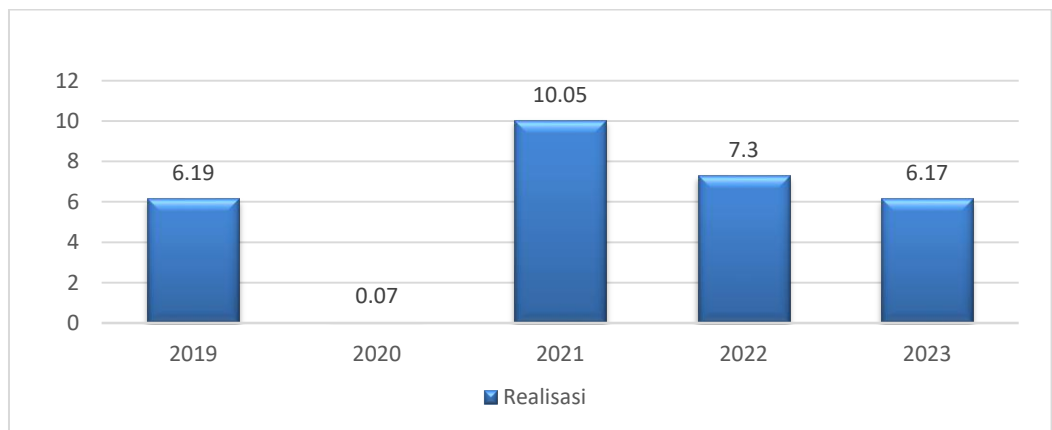
Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Tahun 2021-2023



Sementara Presentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2017 mencapai 0%, dan terus meningkat di tahun 2018 dengan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan 2,71%, kemudian di Tahun 2019 naik sebesar 6,19% dan di Tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 0,07% jika dilihat dari gambar dibawah dapat disimpulkan Presentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan menurun akibat Pandemi Covid 19, lalu pada Tahun 2021 Presentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Bolmong yang ditargetkan mencapai 0.38% menurut Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Naik dengan angka mencapai 10,05%. Pada Tahun 2022 pada Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bolang Mongondow (persen), 2017–2021 dengan Target 0.49% terealisasi 7,30% dengan Capaian Kinerja Sebesar 100%. Turun di Tahun 2023 dengan realisasi 6,17. Presentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Bolmong rentang tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Grafik di bawah ini :



Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Tahun 2019-2023

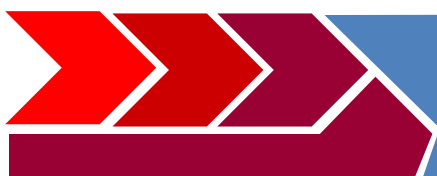


Sumber Bolaang Mongondow Dalam Angka 2024

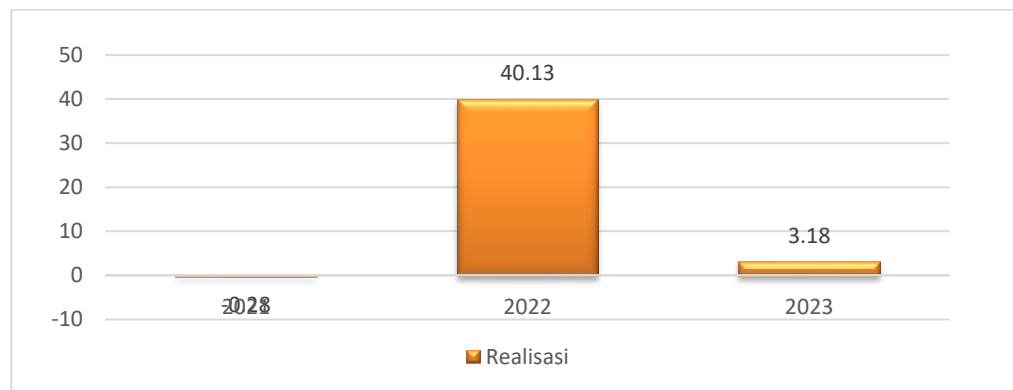
Presentase Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan

Dilihat indikator Presentase Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan Pada Tahun 2023 dengan Target 1,22 terealisasi sebesar 3,18% dengan Capaian Kinerja sebesar 260%, ada Peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2022 menurut Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow dari Data Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bolaang Mongondow (persen) tercapai -0.28% dengan Capaian Kinerja Sebesar -5.09%. dibandingkan dengan Tahun 2019 adanya Penurunan Kinerja Indikator Presentase Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan sebesar 0.14 dari 0.42%.

Hal ini disebabkan Masa Pandemi Covid 19 Sektor Pertanian dan Perikanan menjadi Fokus Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow di Khusus nya di Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow dengan memberikan Bantuan Khususnya Bantuan Bibit, Pupuk, serta Bantuan Lainnya untuk menjaga produktifitas Petani dan Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Dinas Perikanan dan Kelautan dalam meningkatkan Sarana dan Prasarana Perikanan untuk Meningkatkan Pendapatan Nelayan.



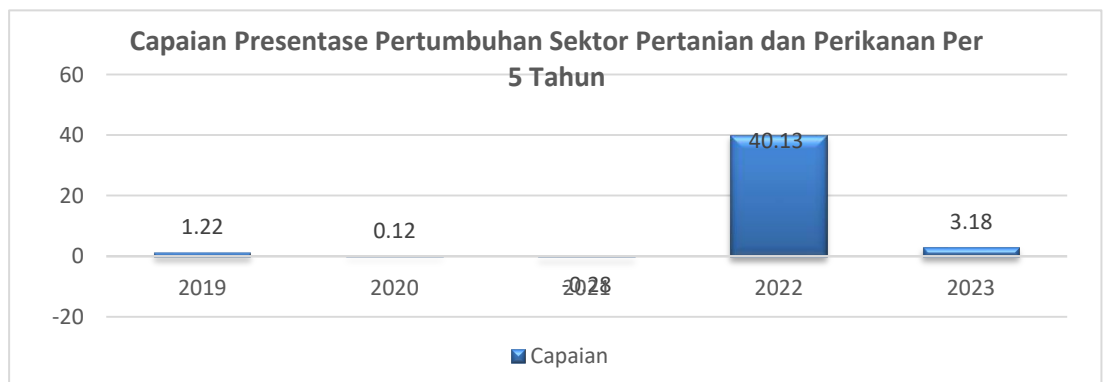
Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2020-2023



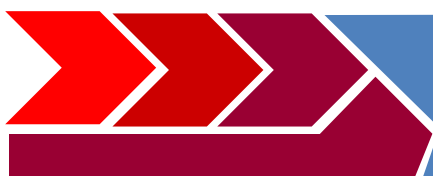
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD Presentase Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan Pada Tahun 2022 sebesar 5.61% dan Capaian Presentase Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan di Tahun 2021 mencapai -0.28%.

Untuk indikator sasaran Presentase Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan, pada tahun 2017 mencapai 6.78%. menurun di Tahun 2018 dengan 5.31% selain itu Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bolaang Mongondow (persen). Menurun di Tahun 2019 sebesar 1.22%. Presentase Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan di Tahun 2020 Turun lagi sebesar 0.12 sampai dengan Tahun 2021 menjadi -0.28. Pada Tahun 2022 dengan Target 5,61 terealisasi sebesar 40,13% dengan Capaian Kinerja sebesar 100%. Faktor Pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi Indikator Sasaran Presentase Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan karena Anggaran yang di refofusing untuk Penanganan Pandemi Covid 19 (sumber : data BPS – Bolmong dalam angka 2012).

Realisasi Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2018-2022



Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka 2023



ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 10
“Meningkatnya Daya Tarik Investasi Berskala Nasional”

Sasaran 10 Meningkatnya Daya Tarik Investasi Berskala Nasional				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (Pma/Pmdn) (% / Tahun)	10	7,24	72,40%

Peningkatan investasi ikut andil dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun.

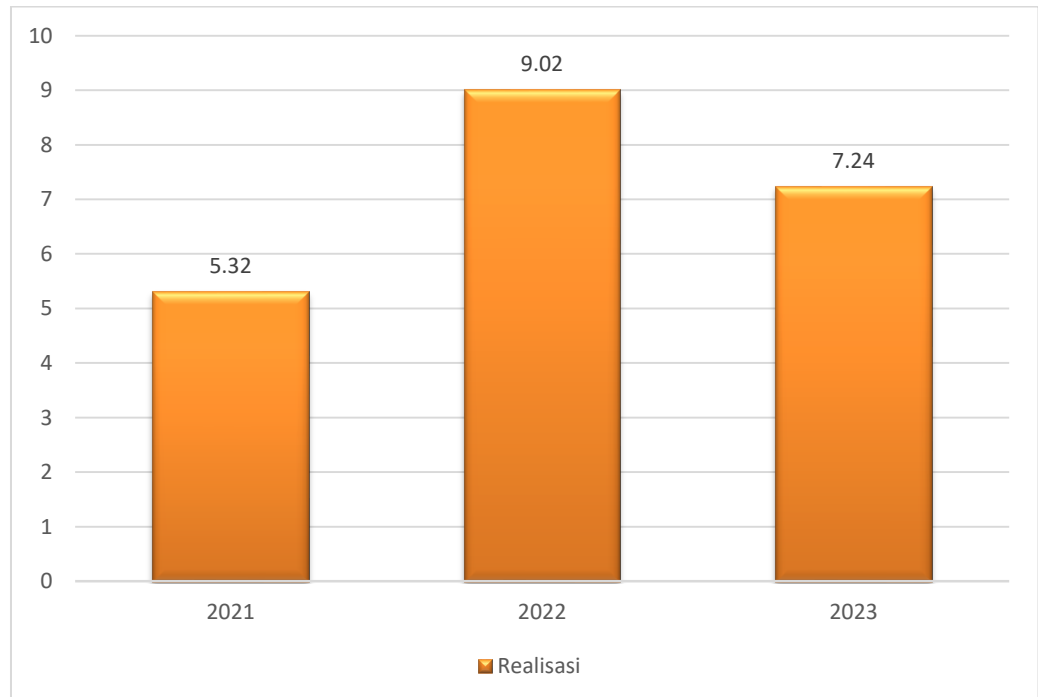
Investasi juga sebagai sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya memperluas penyerapan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi. Kaum aliran klasik menganggap akumulasi kapital sebagai suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Jadi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa dengan melakukan penanaman modal maka dapat meningkatkan pendapatan.

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Persentase Peningkatan Nilai Investasi (%) di Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun 2023 dari Target 10% terealisasi sebesar 7,24 dengan Capaian Kinerja sebesar 72,40%. Dibandingkan dengan Tahun 2021 nilai Investasi di Kabupaten Bolaang Mongondow menurun sebesar 1,78% dari Nilai Investasi 9,02

Jika dilihat Capaian tersebut dari Tahun 2022 – 2023 adanya Penurunan Investasi sebesar 1,78%. hal ini disebabkan karena adanya kurangnya investor dalam Peningkatan nilai Investasi di Kabupaten Bolaang Mongondow.



Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Peningkatan Nilai Investasi Tahun 2021-2023



Adapun Capaian Peningkatan Nilai Investasi selama 5 Tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Realisasi Persentase Peningkatan Nilai Investasi Dalam Lima Tahun RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2019-2023

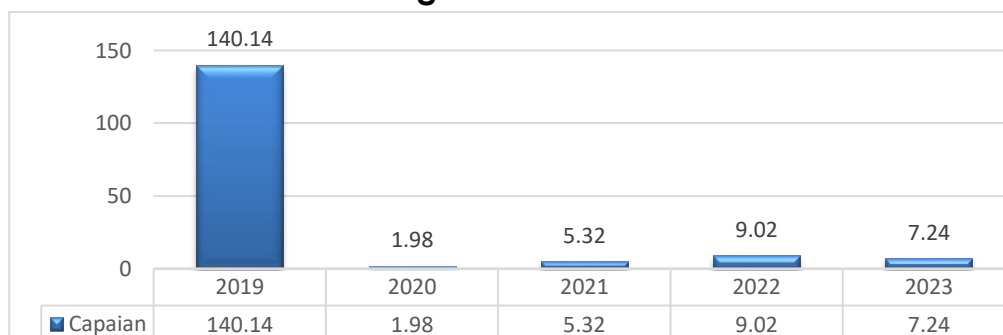
No	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (%)	140,14	1,98	5,32	9,02	7,24

Berdasarkan Tabel diatas dengan data yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Indikator Presentase Peningkatan Nilai Investasi di kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun 2023 mencapai 7,24 menurun dibandingkan dengan Tahun 2022 yang mencapai 9,02%. dibandingkan dengan Tahun 2021 Ada peningkatan yang mencapai 5,32%. Pada Tahun 2020 capaian Nilai Investasi memperoleh 1,98%. Dibandingkan dengan Tahun 2019 Capaian Nilai Investasi Kabupaten Bolaaang Mongondow sangat baik karena Melebihi Target dengan mencapai 140,14%. dibandingkan dengan Tahun 2018 capain Presentase Peningkatan Nilai Investasi hanya mencapai 17,48%. belum mencapai target yang ada karena diharapkan Pemerintah



Kabupaten Bolaang Mongondow selama 5 Tahun dan tiap Tahun menargetkan 20% untuk Peningkatan Nilai Investasi. Capaian dapat juga kita lihat dalam bentuk grafik dibawah ini.

Realisasi Persentase Peningkatan Nilai Investasi Tahun 2018-2022



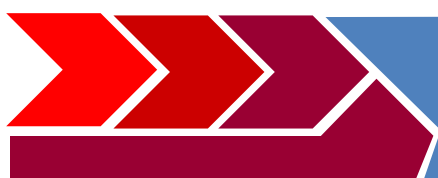
Faktor Faktor Yang Mempengaruhi :

Dari tabel dan uraian diatas maka terdapat Penurunan realisasi investasi pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, untuk kabupaten Bolaang Mongondow terhadap target yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara malah sudah melebihi target, kondisi ini memperlihatkan bahwa perekonomian masyarakat sudah mulai membaik dalam masa pemulihan pasca pandemi covid-19

Peningkatan nilai investasi (PMDN/PMA) karena adanya kepercayaan pemodal terhadap pemerintah, serta proses pelayanan yang maksimal. Selain itu adanya investasi PT Conch sangat mempengaruhi peningkatan investasi di wilayah Bolaang Mongondow dimana tahun 2019 merupakan tahun pelaksanaan eksplorasi oleh sejumlah perusahaan yang melakukan investasi terutama PT Conch. Pertumbuhan investasi diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pelaksanaan produksi pada tahun 2021.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN 5 “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayan Publik yang Berkualitas”

Tujuan 5 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayan Publik yang Berkualitas				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Rata-Rata Capaian Opini BPK, Nilai Sakip, LPPD, Indeks Pelayanan Publik	77,5	65,66	84,72%



Nilai Rata-Rata Capaian Opini BPK, Nilai Sakip, LPPD, Indeks Pelayanan Publik

Capaian Sasaran ditunjukkan dengan Upaya melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governace), terjaminnya penegakan hukum terhadap praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang didukung oleh lembaga legislatif daerah yang kuat serta legitimasi penuh masyarakat. Pemerintahan daerah yang baik, bersih dan demokratis adalah daerah yang aman dan damai karena warganya taat dan patuh terhadap hukum di satu sisi, dan di sisi lain, hak-hak masyarakat terlindungi dan terakomodasi dalam sistem sosial, ekonomi, politik, pemerintahan dan pembangunan.

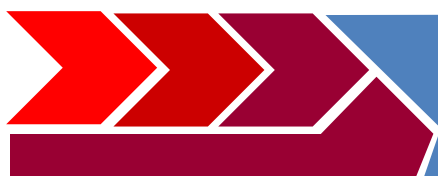
Adapun Capaian Indikator Nilai Rata-Rata Capaian Opini BPK, Nilai Sakip, LPPD, Indeks Pelayanan Publik pada Tahun 2023 Akumulasi dari Capaian Opini BPK, Nilai Sakip, LPPD, Indeks Pelayanan Publik dari Target 77,5 terealisasi 65,66 dengan Capaian Kinerja 84,27

Tujuan yang ingin dicapai dalam Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas melalui pencapaian pelayanan public, perolehan Opini BPK, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Adapun sasaran pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan strategi yaitu Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan publik melalui mekanisme yang inovatif, penerapan SOP dan SPP yang konsisten, dan berbasis kepuasan masyarakat.
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, strategi pembangunannya adalah Menguatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan melalui perencanaan program dan kebijakan yang akurat, pengelolaan keuangan daerah yang tepat, serta pelaksanaan pengawasan yang efektif

ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 11 "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"

Sasaran 11 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pelayanan Publik (Zona)	Kuning	Hijau (95,05)	176%



Indeks Pelayanan Publik (Zona)

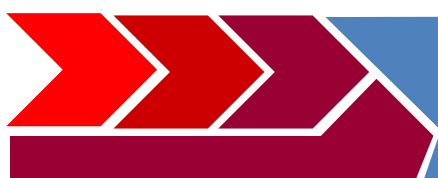
Era milenial menuntut manusia untuk berkembang lebih pesat. Perkembangan tersebut mempengaruhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Dengan dinamisnya tuntutan kebutuhan masyarakat mendorong penyelenggara layanan untuk lebih aktif memberikan pelayanan publik yang prima. Itu menandakan adanya hak dan kewajiban yang terbaru yang timbul antara penyelenggara dan masyarakat sebagai penerima layanan publik. Secara umum, hal tersebut tentunya diatur dalam peraturan yang berlaku melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Adapun peraturan tersebut lahir untuk memberikan kepastian hukum antara hubungan penyelenggara dan masyarakat sebagai penerima layanan publik.

Namun, untuk mengukur sejauh mana pelayanan publik telah diberikan secara baik kepada masyarakat perlu adanya suatu tolok ukur. Sehingga pelayanan publik disertai dengan standar pelayanan yang menjadi tolok ukur untuk digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Selain tersedia standar pelayanan, masyarakat juga dipenuhi hak-haknya melalui maklumat pelayanan, yaitu pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang tercantum dalam standar pelayanan.

Standar Pelayanan sebagai Kepastian Layanan

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu adanya prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh penyelenggara supaya dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Adapun prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam asas pelayanan publik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 bahwa asas-asas pelayanan publik meliputi asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

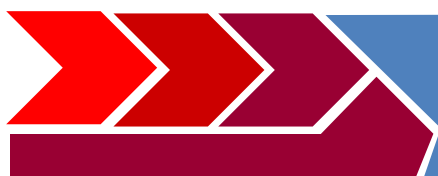
Selain berdasarkan asas-asas pelayanan publik, penyelenggara maupun penerima layanan memiliki hak dan kewajiban dalam



pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Hal inilah yang kemudian menarik untuk dikaji. Apabila berbicara mengenai hak dan kewajiban tentunya ada konsekuensi tersendiri apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Oleh karena itu, perlu adanya suatu indikator yang dapat menilai ketercapaian hal tersebut. Mari kita bahas satu per satu. Penyelenggara pelayanan publik memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dalam pelayanan publik. Adapun kewajiban yang terkait dalam tulisan ini adalah menyusun, menetapkan standar pelayanan bahkan mempublikasikan maklumat pelayanan. Adapun kewajiban tersebut sebagai hak masyarakat untuk mengetahui, mengawasi bahkan mengadukan setiap pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Hal tersebut dilaksanakan demi pelaksanaan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan publik.

Adapun standar pelayanan diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pada dasarnya penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan bahkan dengan melibatkan masyarakat. Terdapat beberapa komponen standar pelayanan yang meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan, serta evaluasi kinerja pelaksana. Selain standar pelayanan, penyelenggara pelayanan juga perlu menyusun maklumat pelayanan sebagai pemenuhan kewajiban dan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Pada akhirnya, standar pelayanan ini menjadi fokus dalam pengawasan pelayanan publik yang notabene dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik. Adapun



kegiatan tersebut selanjutnya disebut dengan Survei Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik.

Predikat Kepatuhan Tinggi atau Zona Hijau diperoleh dari rentang nilai 78-100, Predikat Kepatuhan Sedang atau Zona Kuning diperoleh dari rentang nilai 54,00-77,99, Akumulasi nilai tersebut diperoleh dari bobot nilai per-variabel pertanyaan yang dilihat dari sisi ketampakan fisik pada penyelenggara layanan administratif baik tingkat pusat maupun Daerah.

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
1	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	ZONA KUNING (57,76)	ZONA MERAH (53,32)	ZONA HIJAU (95,05)

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Indikator Nilai Kepatuhan Standart Pelayanan Publik Sesuai UU NO. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Tahun 2023 meraih Predikat ZONA HIJAU dengan nilai 95,05 dengan Capaian Kinerja 126,73%, dapat dikatakan bahwa Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Bolaang Mongondow sudah sangat baik, dibandingkan dengan Tahun 2022 Nilai Kepatuhan Standart Pelayanan Publik Sesuai UU NO. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mendapat Predikat ZONA MERAH dengan Nilai 57,76. Dibandingkan dengan Tahun 2021 meraih Predikat ZONA KUNING dengan Nilai 53,32. Capaian tersebut dapat kita lihat pada grafik berikut :

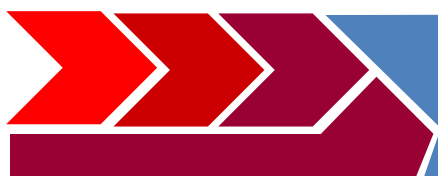
Grafik 3.12

Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kepatuhan Standart Pelayanan Publik di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 – 2023



Hasil ini perlu disikapi secara positif dengan upaya dan komitmen Pimpinan. Terhadap hasil penilaian tersebut, Ombudsman RI menyarankan agar:

1. Memberikan apresiasi (award) kepada pimpinan unit pelayanan publik yang produk layanannya mendapat Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi. Hal ini penting sebagai bentuk penghargaan atas segala upaya dan komitmen pimpinan unit memenuhi komponen standar pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Memberi teguran dan mendorong implementasi standar pelayanan publik kepada para pimpinan unit pelayanan publik yang produk layanannya mendapatkan Zona Merah dengan Predikat Kepatuhan Rendah dan Zona Kuning dengan Predikat Kepatuhan Sedang.
3. Menyelenggarakan program secara sistematis dan mandiri untuk mempercepat implementasi standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Kewajiban penyelenggara layanan dalam mempublikasikan standar pelayanan publik diawali dengan penyusunan yang melibatkan partisipasi publik, penetapan dan implementasi standar pelayanan. Sekiranya diperlukan, Ombudsman RI bersedia membantu dan/memfasilitasinya.
4. Menunjuk pejabat yang kompeten untuk memantau konsistensi dan peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik. Setiap unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Terdapat lebih dari 10 komponen standar pelayanan yang harus dipenuhi penyelenggara pelayanan publik demi terciptanya kualitas pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat.
5. Mempercepat perbaikan dan peningkatan tata kelola pelayanan yang terintegrasi dengan menerapkan asas pendelegasian wewenang atas produk layanan, dukungan manajemen sumber daya manusia yang profesional, serta pemenuhan sarana dan prasarana dalam menjalankan proses pelayanan.



ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 12
“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih”

Sasaran 12				
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Opini Bpk (Opini)	WTP	WTP (100)	100
2	Nilai Sakip (Nilai/Predikat)	B	B (64,56)	107 %
3	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Angka)	3,6	3,0528	84,8

Opini BPK

Pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah untuk memeriksa kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dari kegiatan yang dilakukan BPK tersebut, jenis pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan bentuk pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun
		2020	2021	2022
1	Opini BPK	WTP (100)	WTP (100)	WTP (100)

Capaian Kinerja Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sedang menunggu hasil evaluasi dirilis oleh BPK-RI. dibandingkan dengan 3 (Tiga) Tahun sebelumnya Opini Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peraihan Hasil Evaluasi BPK-RI dapat dilihat secara lebih detail pada grafik dibawah ini :



Perbandingan Target dan Realisasi Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Tahun 2020-2022



Capaian Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi dan seluruh 15 Kabupaten Kota Se Sulawesi Utara mendapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan atas Laporan Keuangan berdasarkan Undang undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian intern yang memadai untuk menyusun Laporan Keuangan yang Bebas dari salah saji Material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu Opini atas Laporan Keuangan berdasarkan Pemeriksaan BPK, BPK melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang



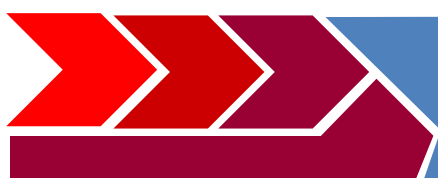
memadai apakah Laporan Keuangan tersebut bebas dari Kesalahan Penyajian material.

Suatu Pemeriksaan meliputi pengujian bukti – bukti yang mendukung angka – angka dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Prosedur yang di pilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk Penilaian Resiko salah saji yang material dalam Laporan Keuangan, baik yang disebabkan Kecurangan Maupun Kesalahan. Dalam melakukan penilaian Resiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan Penyajian Wajar Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk merancang prosedur Pemeriksaan yang tepat sesuai kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga Mencakup evaluasi atas ketepatan Kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, serta evaluasi Atas Penyajian Laporan Keuangan secara Keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan Opini BPK.

Menurut Opini BPK, Laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua Hal yang Material, Posisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran Laporan Keuangan tersebut, BPK juga melakukan Pemeriksaan terhadap sistem Pengendalian intern dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 3.B/LHP/XIX.MND/04/2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini.



Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah dan peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada peraturan menteri tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

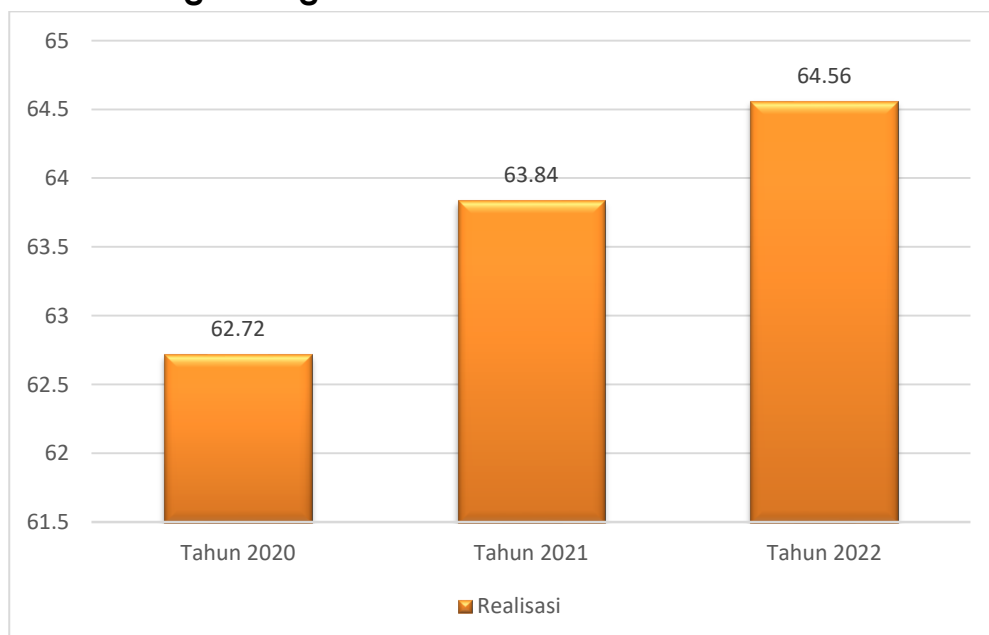
Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 atas Capaian Kinerja Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow masih dalam tahap Penyusunan.

Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow atas Capaian Kinerja Tahun 2022 berhasil meraih Nilai 64,56 dengan predikat "B", capaian Nilai AKIP Tahun 2022 atas capaian Kinerja Tahun 2021 meraih nilai 63,84 dengan predikat "B". dan capaian kinerja Tahun 2021 atas Capaian Kinerja Tahun 2020 meraih Nilai 62,72 dengan predikat "B". capaian Nilai Akip Kabupaten Bolaang Mongondow 3 Tahun berturut – turut mendapat Predikat "B".

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
1	Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	62,72 (B)	63,84 (B)	64,56 (B)



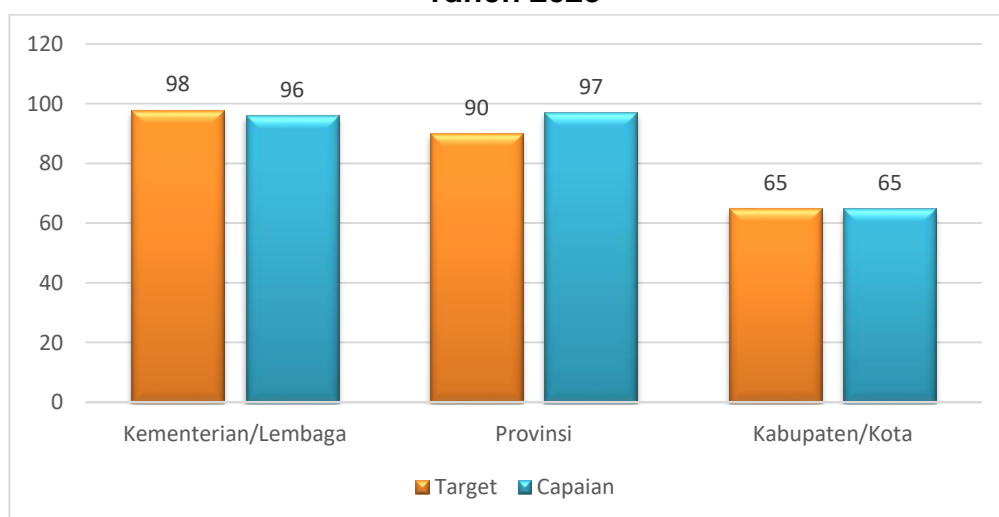
Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2020-2022



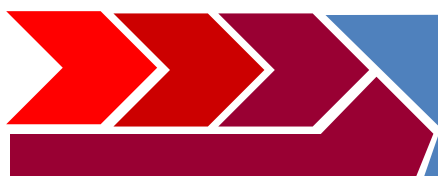
Capaian Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menunjukkan tren peningkatan khususnya pada 3 (tiga) tahun terakhir

Selanjutnya terkait Persentase Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Hasil Evaluasi dari Kementerian PANRB dapat dilihat pada grafik berikut

Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023



Berdasarkan Grafik di atas, Capaian Kementerian/Lembaga dari target 98% terealisasi 96% dibandingkan dengan capaian Provinsi yang berhasil melampaui target, dari target 90% terealisasi 97%. Selanjutnya untuk Kabupaten/Kota dari target 65% terealisasi 65%.



Adapun terkait rincian Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 - 2023 secara lebih detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Komponen Penilaian Nilai AKIP Kabupaten Bolaang Mongondow

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Tahun	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30	22,61	22,83
2	Pengukuran Kinerja	30	17,89	18,10
3	Pelaporan Kinerja	15	9,19	9,38
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,15	14,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	63,84	64,56
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Adapun rekomendasi dari Kemenpan RB RI

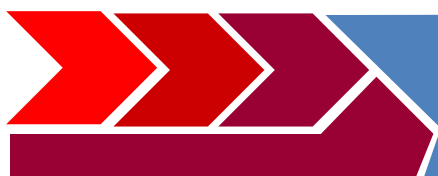
1. Melakukan reuiu atas dokumen perencanaan kinerja jangka menengah guna memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan telah berorientasi outcome dan sesuai dengan jenjang levelnya.
2. Menyempurnakan pohon kinerja yang dimiliki dengan cara memastikan pohon kinerja yang disusun telah memenuhi prinsip logis/logical framework yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan critical success factor (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan sehingga penetapan kondisi kinerja antar level tidak berulang;
3. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap PD dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja seperti: memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented); memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) terutama pada kriteria spesifik, relevan, dan terukur;
4. Memastikan kembali program dan kegiatan yang dimiliki pada level PD untuk lebih berfokus pada pencapaian kinerja sehingga tercipta birokrasi yang efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki;



5. Menjelaskan seluruh kinerja yang diperjanjikan dalam perencanaan strategis ke dalam laporan kinerja sehingga dapat memberikan informasi kinerja yang terukur sesuai dengan yang diperjanjikan dan seharusnya dicapai. Hal ini bertujuan agar laporan kinerja dapat berfungsi sebagai media perbaikan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kinerja
6. Meningkatkan kualitas laporan kinerja PD dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi deskriptif program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja dan melakukan benchmark dari kabupaten/kota, provinsi, dan apabila memungkinkan dengan nasional untuk kinerja yang sifatnya strategis serta menjadikan laporan akuntabilitas kinerja dengan informasi yang lengkap sebagai standar atau pedoman untuk dapat diimplementasikan ke seluruh PD;
7. Mendorong adanya monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas internal PD dilakukan secara berkala, sehingga tindak lanjut rekomendasi dapat mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja tingkat PD dan akan berpengaruh juga pada tingkat Pemda;
8. Mendorong pelaksanaan evaluasi internal agar dilaksanakan kepada seluruh tahun 2023 sehingga secara internal, sehingga Pemda dapat memiliki gambaran secara utuh terkait kualitas implementasi SAKIP Pemda dari sisi internal;
9. Mendorong pemanfaatan hasil Evaluasi AKIP internal yang sudah dilakukan sebagai bagian dari penilaian reward dan punishment kepada PD, sehingga PD lebih semangat dalam mendorong perbaikan implementasi SAKIP kedepannya.

Nilai / Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun, Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Penyusunan LPPD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah



Nomor 13 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi dan dinilai oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk Reviu. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/8679/OTDA tanggal 11 Desember 2023 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2023 angka 3 huruf a. Data dan dokumen pendukung sebelum ditandatangani Kepala Perangkat Daerah wajib di reviu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

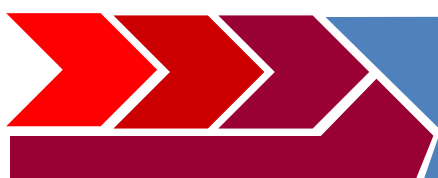
Penetapan peringkat, skor dan status kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam proses EPPD dilakukan melalui proses penilaian kinerja dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
Kelompokkan ke Dalam 5 Klasifikasi

No.	Skor Kinerja	Status Kinerja
1.	1.00-1.80	Sangat Rendah
2.	1.81-2.60	Rendah
3.	2.61-3.40	Sedang
4.	3.41-4.20	Tinggi
5.	4.21-5.00	Sangat Tinggi

Berdasarkan klasifikasi skor kinerja dan status kinerja diatas, Tahun 2019 target skor LPPD Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow yakni 3,5 dengan capaian target 3,41 dengan status kinerja Tinggi Sehingga mengacu pada target skor Tahun 2019 tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan skor LPPD setiap tahunnya minimal kenaikan 0,1 dari target tahun 2019 sehingga tahun 2023 target skor LPPD menjadi 3,6; Tahun 2024 target skor LPPD 3,7; Tahun 2025 target LPPD 3,8 dan ditahun 2026 target skor LPPD mecapai 3,9 dengan status kinerja dari tahun 2023 s/d 2026 Tinggi.

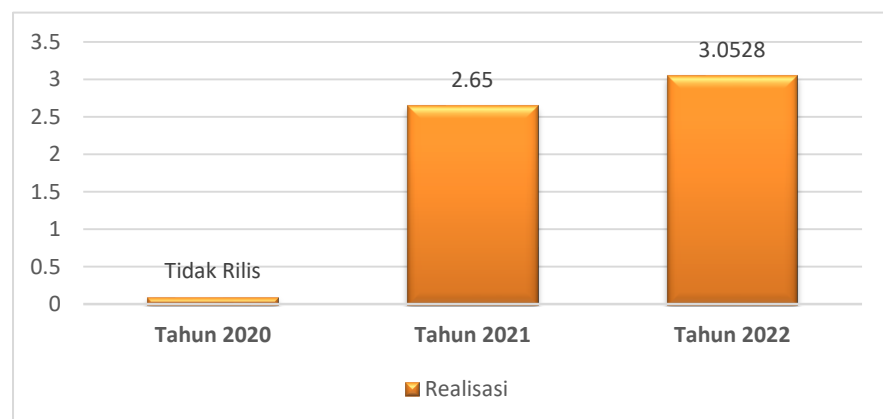
No	Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Nilai/Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	2,67	3,419	Tidak Rilis	2,65	3,0528



Hal – Hal yang berpengaruh pada Capaian Nilai LLPD Tahun 2023 Karena masih ada Perangkat Daerah yang terlambat memasukkan Data pada saat Inspektorat Provinsi Mengadakan Pemeriksaan LPPD. Sehingga Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tidak dapat Menganalisa / Menganalisis Hasil Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang terlambat memasukkan Data. Sehingga kedepannya Perangkat daerah akan memperbaiki Kinerja yang lebih Baik.

Faktor yang mempengaruhi indikator sasaran ini adalah ketelitian dari semua pihak yang berkopeten dalam menyusun peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Perbandingan Target dan Realisasi Nilai / Perangkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2020 – 2022



**ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN 6
“MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH”**

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Indeks Ketahanan Pangan	84,94	*83,26 (Indeks Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2023)	98,02%

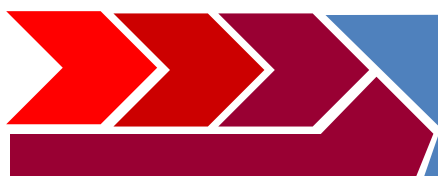


Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Adapun Capaian Indikator Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow menurut data Badan Pangan Nasional Tahun 2023 dari Target 84,94 terealisasi sebesar 83,26 dengan Capaian Kinerja 98,02.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.



Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi



ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 13

“Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Ketersediaan Pangan”

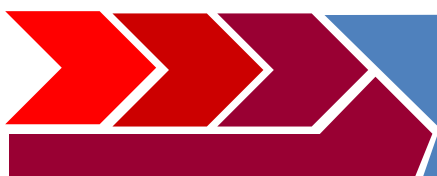
Sasaran 13 Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Ketersediaan Pangan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Pangan (Angka)	1,08	1,16 (Lakip DKP)	107,40100

Pasca terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina pada awal tahun 2023 yang menyebabkan terjadinya inflasi yang berdampak pada perekonomian Masyarakat, khususnya pada sektor pertanian yang mengalami lonjakan harga pangan pokok, sehingga dibentuknya Tim Penanganan Inflasi Daerah dan Satgas Pangan ditingkat Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan mengambil Langkah-langkah strategis guna penanggulangan inflasi daerah.

indikator rasio pangan pada tahun 2022 sebesar 85% dengan target sebesar 1.21 dan realisasi sebesar 1.03 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja tahun 2023 yaitu, 113 % dengan target 1.02 dengan realisasi sebesar 1,16. Jika dilihat dari Capaian rasio pangan tahun 2023 yang melebihi target yaitu 113%, dapat diasumsikan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow tahan dan terjamin akan kebutuhan pangan pada tahun 2023.

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 tidak lepas dari upaya yang dilakukan melalui bebrbagi program diantaranya :

- Melakukan operasi pasar terkait dengan adanya permainan harga bahan pokok oleh oknum-oknum yang tidak

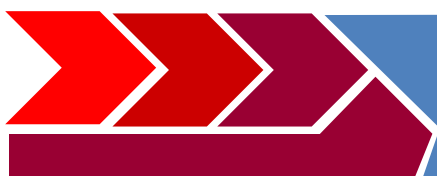


bertanggungjawab yang memanfaatkan situasi ekonomi saat itu

- Pelaksanaan gelar pangan murah melalui Kerjasama dengan berbagai pihak, dalam rangka penanganan inflasi daerah dan kenaikan harga pangan
- Penyaluran Cadangan pangan pemerintah daerah pada daerah yang rentan dan rawan pangan berdasarkan peta kerawanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow
- Pengisian lumbung pangan Desa dalam rangka pemenuhan Cadangan pangan pada setiap desa.
- Penyaluran benih tanaman kepada kelompok Wanita tani (KWT) dalam rangka pemanfaatan pekarangan di 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow.

hal ini tidak lepas dari berbagai Upaya yang dilakukan sebagaimana disebutkan pada poin-poin diatas . Dikatakan ketahanan pangan bila jumlah ketersediaan pangan lebih besar 1,2 kali dibanding dengan jumlah konsumsi pangan. Tahan pangan (rawan pangan) jika $RP < 0,8$ Tahan pangan tetapi kurang terjamin jika $0,8 < RP < 1,2$ dan tahan pangan terjamin jika $Rp > 1,2$. Untuk mencapai rasio 1,2 perlu adanya Regulasi Pemerintah Daerah untuk menata ketersediaan pangan pokok (beras), anjuran nasional seperti halnya untuk alur distribusi pangan pokok beras (stok pangan di daerah), untuk mengantisipasi ketimpangan stok pangan pokok beras yang ada didaerah guna memudahkan mengantisipasi gejolak harga saat ini Dimana pada tahun 2023 akan adanya inflasi ekonomi yang akan berdampak terhadap harga pangan. Menurut data Neraca Bahan Makanan (NBM) pangan pokok (beras) di daerah untuk ditata dan dikelola sehingga stok pangan (beras) baik yang dikuasai pemerintah maupun yang dikuasai swasta yang ada di daerah dimanfaatkan melalui kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan optimal. Beberapa factor penghambat yang mengakibatkan adanya kegagalan terkait pencapaian target indikator kinerja yang disebabkan oleh :

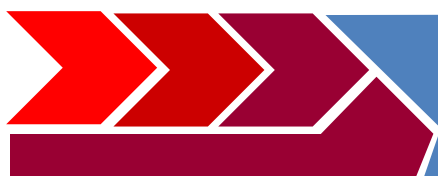
- Sarana dan Prasarana terkait Pergudangan yang belum ada Alih fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan rendahnya stok ketersediaan pangan
- Belum Beragamnya Konsumsi pangan Masyarakat
- Kualitas dan mutu pangan yang belum terjamin



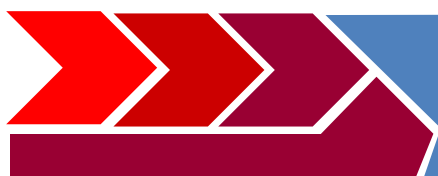
- Harga Bahan pangan strategis masih berfluktuatif seperti beras, cabe, bawang merah dan bawang putih.
- Masih adanya daerah rawan/rentan terhadap pangan

2.3.3 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (8/7*100)	10 (6-9)
1	Meningkatnya Akses Dan Kualitas Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan (Tahun)	13,5	11,63	86	64.687.969.234	58.457.964.512	90	-4
2	Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Semesta	Rata-Rata Usia Harapan Hidup (Angka)	69,55	70,07	101	115.208.022.550	107.792.253.462	94	7
3	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	7	7,37	105	15.037.237.463	13.919.709.356	93	13
4	Meningkatnya Infrastruktur Transportasi	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Kendaraan (Angka)	23,39	23,39	100	109.253.954	109.237.000	100	0,02
		Persentase Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik (%)	67	67	100	58.303.324.042	51.088.536.924	88	12
5	Meningkatnya Layanan Air Minum Layak	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak (%)	71,7	92,94 (BPS)	130	8.442.236.980	8.026.619.341	95	35
6	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (Angka)	50	50,00 (Lakip DLH)	100	191.083.086	189.175.812	99	1
7	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (Angka)	95,43	95,87 (Lakip DLH)	101	191.083.086	189.175.812	99	2
8	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan (Angka)	75	75,72 (Lakip DLH)	100,96	191.083.086	189.175.812	99	2

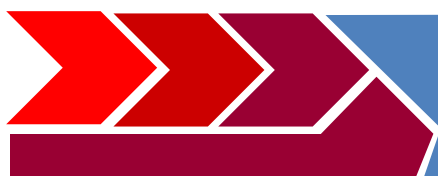


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (8/7*100)	10 (6-9)
9	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Kontribusi Pertumbuhan Pdrb Sektor Industri Pengolahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (% / Tahun)	10,1	6,17	61,08	16.450.344.325	15.173.515.330	92	-31
		Kontribusi Pertumbuhan Pdrb Sektor Pertanian Dan Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (% / Tahun)	1,22	3,18	260,65	16.450.344.325	15.173.515.330	92	168
10	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Berskala Nasional	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (Pma/Pmdn) (% / Tahun)	10	7,24	72,40	148.519.364,00	144.432.100,00	97	-25
11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (Zona)	Kuning	Hijau (95,05)	176	6.304.698.574	6.198.377.417	98	78
12	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih	Opini Bpk (Opini)	WTP	WTP (100)	100	27.812.168.708	24.503.191.285	99	1
		Nilai Sakip (Nilai/Predikat)	B	B (64,56)	107	27.812.168.708	24.503.191.285	100	7
		Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Angka)	3,6	3,0528	84,8	27.812.168.708	24.503.191.285	101	-17
13	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Ketersediaan Pangan	Rasio Pangan (Angka)	1,08	1,16	107	16.597.906.736	15.894.979.753	96	12
Rata Rata Efisiensi (Inefisiensi) Kinerja dan Anggaran					1894			1633	261
					146			126	20,06

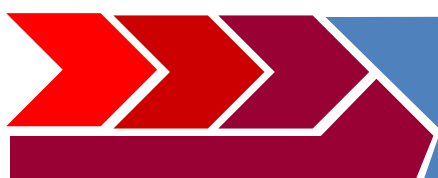


2.3.4 Analisis Capaian IKU dan Program Pendukung Sasaran Strategis

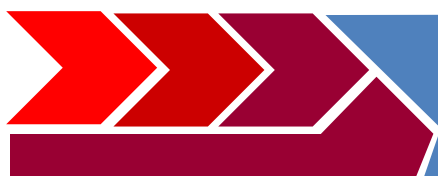
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program Pendukung			Capaian
			Program	Anggaran	Penyerapan Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akses Dan Kualitas Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan (Tahun)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	59.540.839.685	54.625.894.840	91,75
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	764.679.677	366.138.400	47,88
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	746.617.585	170.571.285	22,85
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	10.530.063	-	0,00
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	343.886.600	318.902.425	92,73
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	400.645.021	400.000.000	99,84
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.289.195.574	2.155.472.562	94,16
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	250.293.418	99.255.500	39,66
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	216.706.515	216.704.900	100,00
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	76.383.216	76.383.200	100,00
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	48.191.880	28.641.400	59,43
2	Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Semesta	Rata-Rata Usia Harapan Hidup (Angka)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	103.067.195.724	91.558.381.958	88,83
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	11.150.904.320	10.810.516.306	96,95
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	537.687.681	5.041.261.834	937,58
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	452.234.825	382.093.364	84,49
3	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	545.106.888	470.198.850	86,26
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	352.786.253	346.011.500	98,08
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	364.324.386	350.854.450	96,30
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	417.810.019	393.251.662	94,12



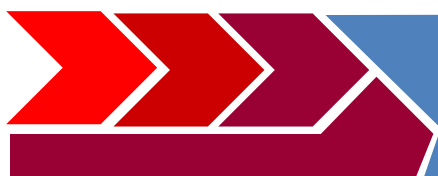
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	307.080.599	305.783.639	99,58
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	128.386.000	98.276.000	76,55
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	389.136.722	375.675.400	96,54
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	105.600.180	103.794.100	98,29
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	120.816.000	120.666.000	99,88
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.671.210.011	1.636.356.929	97,91
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.634.980.405	9.718.840.826	91,39
4	Meningkatnya Infrastruktur Transportasi	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Kendaraan (Angka)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	109.253.954	109.237.000	99,98
		Persentase Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	58.815.509	57.090.400	97,07
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	90.247.978	90.171.200	99,91
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	662.745.148	442.159.674	66,72
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	57.491.515.407	50.499.115.650	87,84
5	Meningkatnya Layanan Air Minum Layak	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak (%)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.835.130.299	1.714.562.140	93,43
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	247.380.686	211.273.900	85,40
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.948.269.995	3.876.581.864	98,18
6	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (Angka)	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	191.083.086	189.175.812	99,00
7	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (Angka)	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	191.083.086	189.175.812	99,00
8	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan (Angka)	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	191.083.086	189.175.812	99,00
9	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor	Kontribusi Pertumbuhan Pdrb Sektor	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	8.288.955	7.878.500	95,05



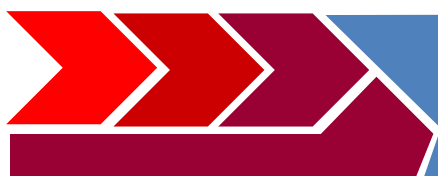
	Unggulan Daerah	Industri Pengolahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (% / Tahun)	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	56.435.352	55.690.500	98,68
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	75.344.827	68.700.320	91,18
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	103.450.398	91.572.400	88,52
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	16.461.333	16.073.600	97,64
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	38.997.457	38.608.900	99,00
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	200.856.968	194.917.411	97,04
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	239.575.824	201.261.500	84,01
		Kontribusi Pertumbuhan Pdrb Sektor Pertanian Dan Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (% / Tahun)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.837.078.594	4.614.025.006	95,39
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6.014.458.377	5.837.170.480	97,05
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.016.353.325	1.323.069.813	65,62
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	17.528.250	17.297.000	98,68
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.681.618.560	1.581.901.650	94,07
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.143.896.105	1.125.348.250	98,38
10	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Berskala Nasional	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (Pma/Pmdn) (% / Tahun)	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	3.554.109	3.492.000	98,25
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	19.354.336	19.233.000	99,37
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	125.610.919	121.707.100	96,89
11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (Zona)	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	500.800.000	489.989.950	97,84
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	430.615.115	373.530.000	86,74
			PROGRAM PENCATATAN SIPII	24.926.934	24.300.000	97,48



		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	38.434.261	34.536.800	89,86	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	11.263.000	9.062.600	80,46	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.991.757.470	1.981.840.000	99,50	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.260.105.108	3.239.151.717	99,36	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	41.398.399	40.817.050	98,60	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	5.398.287	5.149.300	95,39	
	Opini Bpk (Opini)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.927.320.550	2.123.196.950	54,06	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.306.704.112	3.198.713.319	96,73	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.092.997.316	1.066.728.890	97,60	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.114.899.937	996.523.624	89,38	
	Nilai Sakip (Nilai/Predikat)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.940.772.706	1.515.327.363	78,08	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	87.320.819	81.865.575	93,75	
	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Angka)	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	227.069.385	218.138.318	96,07	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	863.613.076	827.892.790	95,86	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	712.532.204	665.069.803	93,34	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	14.538.938.603	13.809.734.653	94,98	
13	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Ketersediaan Pangan	Rasio Pangan (Angka)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.605.254.718	2.508.356.234	156,26
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	308.206.284	296.870.800	96,32



		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	36.135.363	33.186.300	91,84
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.837.078.594	4.614.025.006	95,39
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	211.707.000	15.082.200	7,12
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	206.574.478	122.972.700	59,53
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.898.696.474	4.631.941.700	94,55
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.016.353.325	1.323.069.813	65,62
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.078.888.000	1.960.040.000	94,28
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	399.012.500	389.435.000	97,60



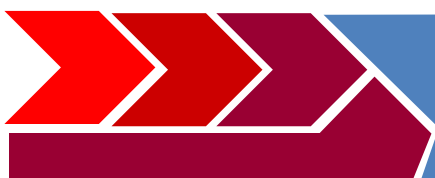
**BAB
III**

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan atau mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada yang menugaskan. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan setelah adanya penugasan pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) atas beban APBN.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada Kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/kota dan sebagian tugas pemerintahan di bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/kota.



Dasar Hukum Tugas Pembantuan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Pelaksanaan Tugas Pembantuan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.03/2000 tentang Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Surat Pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor : DPPA/B.2/3.27.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 18 Januari 2023;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2023 Nomor: DPPA/B.1/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 4 Januari 2023;
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Pemerintah Pusat Nomor : PHD-074/IPDMIP/PK/2018 tanggal 14 Februari 2018.

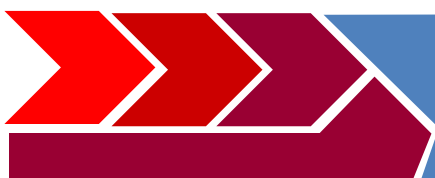
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah

Untuk Tahun Anggaran 2023 Tugas Pembantuan dari Pusat ke Daerah tidak ada kerjasama kegiatan

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah

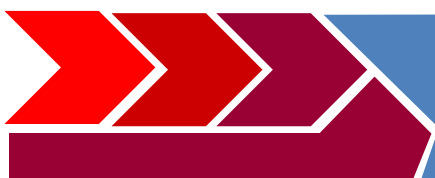
Untuk Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mendapatkan Dana Tugas Pembantuan dari:

1. kementerian Pertanian terdiri dari 2 (dua) Ditjen pada Tahun 2023 dengan pengelolaannya untuk satker Tanaman Pangan dan untuk Satker Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) dikelola oleh Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara dan Tugas Pembantuan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara.
2. Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui Bidang Distribusi dan Akses Pangan, Bidang Kewaspadaan Pangan, dan Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan.



3.2.1 Target Kinerja

- Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Kegiatan ini merupakan program bantuan Benih jagung NASA 29 kepada 342 Kelompok Tani dengan jumlah benih yang disalurkan sebanyak 45.000 Kg dan Benih Jagung HJ21 kepada 209 Kelompok Tani dengan jumlah benih yang disalurkan sebanyak 37.500 Kg yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan produktivitas produksi jagung di daerah pelaksanaan jagung hibrida menuju swasembada berkelanjutan.
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kegiatan ini merupakan program bantuan Embung Pertanian sebanyak 2 (dua) unit yang bertujuan untuk menampung sekaligus menyalurkan air dalam rangka mendukung ketersediaan air pada perluasan sawah.
- Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara
Kegiatan ini merupakan program bantuan Benih jagung NK 212 kepada 101 Kelompok Tani dengan jumlah benih yang disalurkan sebanyak 15.000 Kg yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan produktivitas produksi jagung di daerah pelaksanaan jagung hibrida menuju swasembada berkelanjutan.
- Bidang Distribusi dan Akses Pangan
Kegiatan ini merupakan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dimana pelaksanaan dalam rangka memonitoring harga dan pasokan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Bidang Kewaspadaan Pangan
Kegiatan ini merupakan kegiatan pengawasan terhadap peta kerawanan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow dengan melaksanakan kegiatan Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa (GENIUS) dan Food Security and Vulnerability (FSVA).



3.2.2 Realisasi

- Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Tabel 3.1

**Jenis Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Satker Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2023**

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase (%)	
				Keuangan	Fisik
1.	Pengadaan Benih Jagung	-	-	-	100
Jumlah		-	-	-	100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi fisik mencapai 100 %. Akan tetapi, untuk jumlah dana yang bersumber pada APBN Tahun 2023 yang digunakan dalam pengadaan Benih Jagung Hibrida Varietas NASA dan HJ21 tidak diketahui, karena Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Bidang Tanaman dan Holtikultura hanya menerima bantuan dalam bentuk Benih yang kemudian disalurkan kepada Kelompok Tani Penerima Bantuan.

- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)

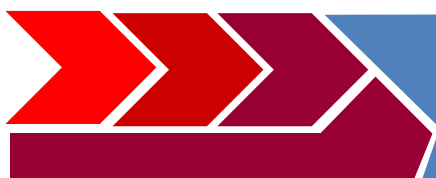
Tabel 3.2

**Jenis Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Satker Dirjen Sistem Penyediaan Prasarana dan Sarana
Pertanian (PSP) Tahun 2023**

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase (%)	
				Keuangan	Fisik
1.	Embung Pertanian	200.000.000	200.000.000	100	100
Jumlah		200.000.000	200.000.000	100	100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi fisik mencapai 100 % dan keuangan 100% yang bersumber dari APBN Tahun 2023 Yang peruntukkan untuk pembangunan Embung Pertanian sebanyak 2 (dua) Unit.

- Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara



Tabel 3.3
Jenis Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Dinas
Pertanian dan Peternakan SULUT Tahun 2023

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase (%)	
				Keuangan	Fisik
1.	Pengadaan Benih Jagung	630.000.000	630.000.000	100	100
Jumlah		630.000.000	630.000.000	100	100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi fisik mencapai 100 % dan Keuangan 100% yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Utara yang peruntukkan untuk Kelompok Tani Penerima Bantuan Jagung varietas NK 212.

- Bidang Distribusi dan Akses Pangan

Tabel 3.4
Jenis Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Stabilisasi
Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2023

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase (%)	
				Keuangan	Fisik
1.	Rapat/Pertemuan Koordinasi	4.250.000	4.250.000	100	100
2.	Bahan Promosi	15.338.000	15.275.000	99,59	100
3.	Percetakan Laporan	1.337.000	1.337.000	100	100
4.	Alat Tulis Kantor	3.000.000	3.000.000	100	100
5.	Honor Narasumber	4.000.000	4.000.000	100	100
6.	Honor Moderator	700.000	700.000	100	100
7.	Monitoring Evaluasi Pasokan dan	12.000.000	12.000.000	100	100
8.	Koordinasi, Pemantauan dan Pengumpulan Data	7.500.000	6.750.000	90	100
Jumlah		48.125.000	47.312.000	98,31	100



Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan dalam rangka memonitoring harga dan pasokan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran yang cukup baik yakni berada pada angka 98,31% dan realisasi fisik mencapai 100%.

- Bidang Kewaspadaan Pangan

Tabel 3.5
Jenis Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan GENIUS dan FSVA Tahun 2023

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase (%)	
				Keuangan	Fisik
1.	Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa (GENIUS)	47.500.000	47.500.000	100	100
2.	Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	23.000.000	23.000.000	100	100
Jumlah		70.500.000	70.500.000	100	100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan dan fisik mencapai 100% dengan pelaksanaan kegiatan di 3 (tiga) sekolah dasar yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow selama 6 (enam) minggu.

- Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Tabel 3.6
Jenis Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Tahun 2023

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase (%)	
				Keuangan	Fisik
1.	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah	8.074.000	5.054.000	62,60	-



No	Jenis Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase (%)	
				Keuangan	Fisik
2.	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	4.915.000	4.915.000	100	-
3.	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	3.710.000	3.710.000	100	-
Jumlah		16.699.000	13.679.000	81,91	-

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan mencapai 81,91% pada kegiatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Tahun 2023.

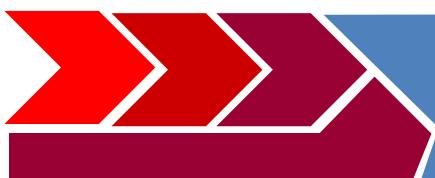
3.3 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala yang ditemui oleh Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan petani dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan jaringan irigasi dan embung pertanian masih kurang.
2. Potensi luas lahan jagung yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow yang sangat luas tidak sesuai dengan jumlah bantuan benih jagung yang diberikan.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

1. Harus lebih aktif bagi jasa fasilitator untuk pendampingan baik pada pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban sehingga outputnya dapat tercapai.



2. Memberikan sosialisasi kepada petani agar dalam melakukan kegiatan usahatani tidak bergantung kepada bantuan dari pemerintah dan bisa dikelola secara mandiri.



**BAB
IV****PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonominya pada dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di pemerintah Pusat ke pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara terus menerus seiring dengan intensifnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Jika dilihat dalam konteks pembangunan nasional, maka percepatan penerapan SPM menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional. Dalam hal ini SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana penerapan dan



pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

Pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi Pemerintah Kabupaten/kota yang menjadi urusan wajib terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal tersebut, pemerintah daerah juga harus mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat daerah pengampu SPM. Pengintegrasian ini menjadi penting agar ada kepastian bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan dan mencapai target yang diharapkan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

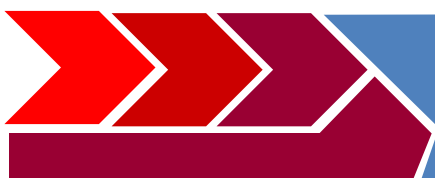
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Pendidikan kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pendidikan angka usia dini;
- b. Pendidikan dasar; dan
- c. Pendidikan kesetaraan.

4.1.2 Target Pencapaian dan Realisasi SPM oleh Daerah

Adapun capaian SPM pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sampai dengan Triwulan IV, sebagai berikut:

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian Tahun 2023 (%)	Capaian TW 1 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 2 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 3 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 4 Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi Dalam pendidikan PAUD	100,00	56,37	57,66	62,78	96,67



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian Tahun 2023 (%)	Capaian TW 1 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 2 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 3 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 4 Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100,00	76,79	77,59	80,69	99,46
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100,00	80,00	83,61	71,59	98,70

4.1.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka pencapaian target standar pelayanan minimal bidang pendidikan sebesar Rp. 110.407.091.928,-

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	61.763.917.808
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	41.858.079.004
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.826.721.216
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	958.373.900

4.1.4 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 didukung jumlah personil sebesar 35 orang. Keadaan pegawai dilihat dari kualifikasi pangkat dan



golongan serta jabatan struktural dan fungsional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Keadaan PNS menurut pangkat/golongan
Tahun 2023

No	Pangkat/Gol	Jumlah
1.	Golongan IV	5 Orang
2.	Golongan III	23 Orang
3.	Golongan II	6 Orang
4.	Golongan I	1 Orang
Jumlah		35 Orang

4.1.5 Permasalahan dan Solusi

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

Permasalahan

1. Pemutakhiran data di lapangan yang memerlukan biaya untuk secara berkala bisa turun ke wilayah-wilayah, terutama data peserta didik kesetaraan yang masih sangat kurang akurat
2. Penghitungan kebutuhan belum benar-benar dimengerti.

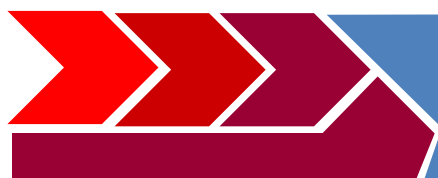
Solusi

1. Perlunya pemuktahiran data untuk pencapaian target SPM;
2. Perlunya pelatihan-pelatihan untuk perencanaan.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kabupaten/Kota terdiri atas:

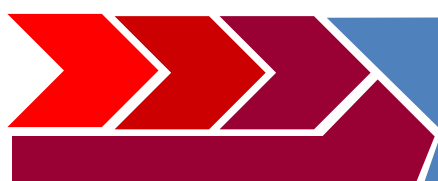


- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. Pelayanan kesehatan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

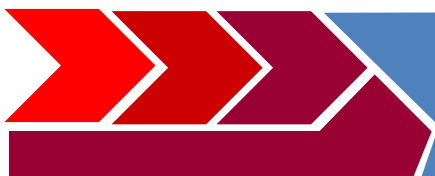
4.2.2 Target Pencapaian dan Realisasi SPM oleh Daerah

Adapun capaian SPM pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow sampai dengan Triwulan IV, sebagai berikut:

No	Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2023 (%)	Capaian TW 1 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 2 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 3 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 4 Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	27,48	61,24	68,03	87,12
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	26,79	45,88	56,28	76,59
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	24,96	45,09	56,41	78,57
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	21,26	40,02	70,16	92,10



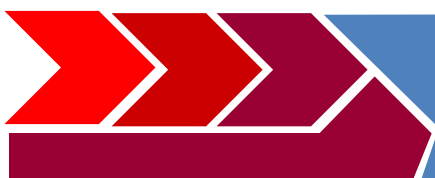
No	Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2023 (%)	Capaian TW 1 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 2 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 3 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 4 Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	26,81	45,09	55,47	73,05
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	23,32	41,40	48,86	70,48
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	32,38	56,43	73,94	88,50
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	24,59	49,08	76,43	81,58
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	32,21	54,66	89,74	92,38



No	Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2023 (%)	Capaian TW 1 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 2 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 3 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 4 Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100,00	34,95	64,30	81,99	94,48
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	26,44	49,16	68,96	94,05
12.	Pelayanan kesehatan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	29,58	49,60	59,97	87,39

4.2.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2023 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow berjumlah Rp1.591.504.101,00,- dengan rincian sebagai berikut:



No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	124.194.775,00
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	30.942.000,00
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	64.640.000,00
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	182.292.500,00
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	72.692.500,00
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	57.358.000,00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	258.568.582,00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	51.254.402,00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	58.446.250,00
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	45.721.440,00
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	305.333.772,00
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	93.295.336,00
13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	25.627.000,00
14	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	87.189.500,00
15	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	133.948.044,00

4.2.4 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 didukung jumlah personil sebesar 47 orang sebagaimana tabel berikut:



Tabel 4.2
Keadaan PNS menurut pangkat/golongan
Tahun 2023

No	Pangkat/Gol	Jumlah
1.	Golongan IV	16 Orang
2.	Golongan III	30 Orang
3.	Golongan II	1 Orang
4.	Golongan I	-
Jumlah		47 Orang

4.2.5 Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraannya pelayanan di bidang kesehatan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Data sasaran indikator SPM menggunakan data sasaran program pembangunan kesehatan yang dikeluarkan oleh Pusat Data Informasi Kemenkes RI;
2. Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar sebatas informasi kepada Puskesmas dengan menggunakan aplikasi Siscobikes;
3. Perencanaan dan penganggaran SPM yang dilakukan hanya terbatas pada kebutuhan pelaksanaan program dimasing-masing bidang Dinas Kesehatan. Alokasi anggaran masih terbatas untuk membiayai pencapaian program SPM di Puskesmas. Mengusulkan alokasi anggaran kegiatan penunjang SPM untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan lintas sektor, lintas program, sosialisasi, monev dan pelaporan SPM;
4. Pelaksanaan Pelayanan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bolaang Mongondow belum optimal, dimana ada sebagian indikator SPM belum dapat dilaksanakan terkait dengan SDM kesehatan yang belum terlatih, sementara pembiayaan logistik penunjang masih terbatas;
5. Monev dan pelaporan SPM belum optimal, Mengusulkan kegiatan penunjang SPM untuk mengakomodir kegiatan – kegiatan lintas sektor, lintas program, Sosialisasi, Monev dan pelaporan SPM



Solusi

Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow telah berupaya melakukan perencanaan berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan melakukan monitoring secara berkala pada capaian indikator SPM tersebut.

Beberapa indikator SPM telah dicapai namun hasil pencapaian tersebut perlu terus ditingkatkan melalui upaya-upaya:

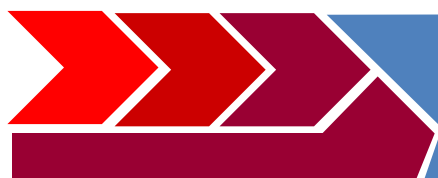
1. Upaya dalam pengendalian penyakit menular dengan peningkatan surveillance aktif di Rumah Sakit, Puskesmas dan Dinas Kesehatan serta penemuan kasus TB Paru.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, merata, terjangkau dan berkeadilan melalui berbagai program yang meliputi: Akreditasi Puskesmas, Peningkatan Puskesmas PONEB, Pengadaan alat-alat kesehatan serta pendidikan dan pelatihan tenaga medis.
3. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dan dilaksanakan di fasilitas kesehatan.
4. Melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi di Puskesmas.
5. Membangun sistem informasi kesehatan dengan menggunakan teknologi sehingga menghasilkan satu data kesehatan.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang standar teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah;



4.3.2 Target Pencapaian dan Realisasi SPM oleh Daerah

No	Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2023 (%)	Capaian TW 1 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 2 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 3 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 4 Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100,00	0,00	74,13	36,73	78,86
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	100,00	0,00	79,20	8,59	88,26

4.3.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2023 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow berjumlah Rp2.947.320.458,00,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	532.476.603
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.652.713.693

4.3.4 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 didukung jumlah personil sebanyak 74 orang PNS.



Tabel 4.3
Keadaan PNS menurut pangkat/golongan
Tahun 2023

No	Pangkat/Gol	Jumlah
1.	Golongan IV	3 Orang
2.	Golongan III	54Orang
3.	Golongan II	16 Orang
4.	Golongan I	1 Orang
Jumlah		74 Orang

4.3.5 Permasalahan dan Solusi

Pembangunan bidang pekerjaan umum di Kabupaten Bolaang Mongondow secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pembangunan. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pekerjaan umum mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pekerjaan umum adalah sebagai berikut:

Permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain :

1. Berkurangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum dan Sanitasi di Tahun 2023 yang hanya menyisir 12 Provinsi Tidak termasuk Provinsi Sulawesi Utara yang didalamnya Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan;
3. Belum sinerginya upaya implementasi

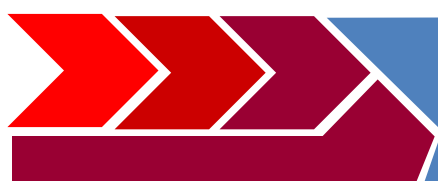
Solusi

Perlunya intervensi sumber dana diluar APBD untuk perluasan cakupan layanan air minum dan sanitasi.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang standar teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,



jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.4.2 Target Pencapaian dan Realisasi SPM oleh Daerah

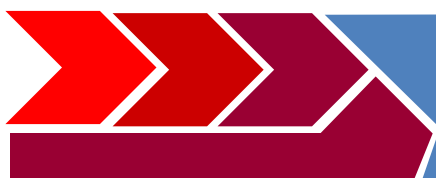
No	Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2023 (%)	Capaian TW 1 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 2 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 3 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 4 Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100,00	20,00	20,00	100,00	100,00

4.4.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2023 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat berjumlah Rp207.140.709,00,- dengan rincian sebagai berikut:



No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	162.819.636,00
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	81.515.997,00
	- Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	21.307.743,00
	- Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	6.314.970,00
	- Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	19.451.067,00
	- Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	12.361.914,00
	- Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	22.080.303,00
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	81.303.639,00
	- Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	6.303.639,00
	- Pembangunan rumah bagi korban bencana	75.000.000,00
2.	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN LAINNYA	44.321.073,00
	- Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	14.527.008,00
	- Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	13.266.231,00



No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
	- Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	10.894.413,00
	- Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	5.633.421,00

4.4.4 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 mendapat dukungan personil sebanyak 18 orang. Adapun daftar personil tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Keadaan PNS menurut pangkat/golongan
Tahun 2023

No	Pangkat/Gol	Jumlah
1.	Golongan IV	5 Orang
2.	Golongan III	11 Orang
3.	Golongan II	2 Orang
4.	Golongan I	- Orang
Jumlah		18 Orang

4.4.5 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan perumahan rakyat adalah sebagai berikut:

Permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain :

1. Tahapan pengumpulan data korban bencana tidak maksimal di karenakan kekurangan Sumber Daya ASN;
2. Perangkat Daerah Pengampu sulit untuk menentukan kriteria penerima bagi masyarakat miskin;
3. Perangkat Daerah Pengampu kurangnya mengalokasikan anggaran untuk penanganan pasca bencana di tahun berjalan;



4. Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua standar pelayanan minimal dapat terpenuhi, dan kejadian angin puting beliung di tahun 2023 akan di anggarkan pada tahun 2024;
5. Minimnya ketersediaan anggaran;
6. Masih kekurangan personil;
7. Kurangnya anggaran untuk operasional penanggulangan bencana, baik pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Solusi

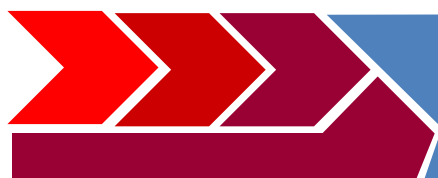
1. Melakukan pendekatan kualitatif dan menganggarkan kembali kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian urusan Standar Pelayanan Minimal;
2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam pengajuan alokasi anggaran kegiatan SPM pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maupun Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat;
3. Merencanakan penambahan personil pegawai dalam pemenuhan capaian SPM

4.5 Urusan Trantibum dan Linmas

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.



4.5.2 Target Pencapaian dan Realisasi SPM oleh Daerah

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai berikut:

No	Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2023 (%)	Capaian TW 1 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 2 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 3 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 4 Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,00	0,00	80,00	0,00	90,00
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00



2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai berikut:

No	Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2023 (%)	Capaian TW 1 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 2 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 3 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 4 Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100	0,00	99,14	100,00	100,00
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	0,00	80,95	75,39	88,87

4.5.3 Alokasi Anggaran

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Alokasi anggaran tahun 2023 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Bolaang Mongondow berjumlah Rp3.948.269.995,00,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	3.948.269.995,00
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3.300.176.165,00
	- Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	147.455.430,00



No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
	- Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	56.883.627,00
	- Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	3.095.837.108,00
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	648.093.830,00
	- Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	557.206.800,00
	- Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	18.519.980,00
	- Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	27.571.050,00
	- Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	44.796.000,00

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Alokasi anggaran tahun 2023 di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Bolaang Mongondow berjumlah Rp. 226.416.180,00,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	105.600.180,00
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	54.030.168,00
	- Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	54.030.168,00



No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	51.570.012,00
	- Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	51.570.012,00
2.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	120.816.000,00
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	120.816.000,00
	- Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	120.816.000,00

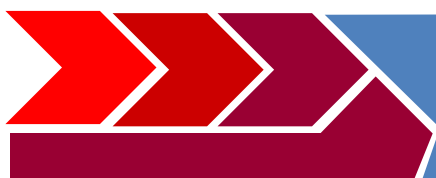
4.5.4 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dibutuhkan personil untuk pelaksanaannya.

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 didukung jumlah personil sejumlah 20 orang. Yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Keadaan PNS menurut Pangkat/Golongan
Tahun 2023

No	Pangkat/Gol	Jumlah Personil
1.	Golongan IV	2 Orang
2.	Golongan III	11 Orang
3.	Golongan II	7 Orang
4.	Golongan I	-
Total		20 Orang



2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 didukung jumlah personil sejumlah 22 orang. Yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Keadaan PNS menurut pangkat/Golongan
Tahun 2023

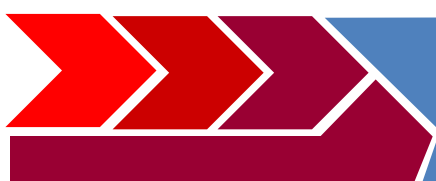
No	Pangkat/Gol	Jumlah Personil
1.	Golongan IV	2 Orang
2.	Golongan III	11 Orang
3.	Golongan II	9 Orang
4.	Golongan I	-
Total		22 Orang

4.5.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain:

- a. Dalam hal penganggaran, Satpol PP & Damkar Kab. Bolaang Mongondow mendapatkan pagu APBD yang SANGAT MINIM, sehingga berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow mendapatkan pagu APBD yang Minim, sehingga beberapa Kegiatan pada Program Kebencanaan tidak dapat dilaksanakan;
- c. Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, sering mengalami kendala dalam jumlah hal sarpras yg masih sangat terbatas, kebutuhan akan BBM kendis dan damkar yg masih minim, juga jumlah personil yg masih kurang dari standar minimal, sehingga pelaksanaan tugas pelayanan belum bisa optimal, bahkan beberapa kegiatan pelayanan damkar tidak dapat terlaksana karena keterbatasan sarpras dan SDM;
- d. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow mengalami beberapa kendala terkait Sarpras yang digunakan personil masih sangat terbatas dan jumlah personil yg masih kurang dari standar minimal, sehingga pelaksanaan tugas pelayanan tidak maksimal;
- e. Minimnya kesejahteraan para Anggota Satpol PP dan personil Damkar;



- f. BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow belum memiliki Gedung kantor dan Gudang Sebagai tempat penyimpanan Logistik dan Sarpras yang memadai. Saat ini BPBD masih menggunakan rumah warga yang dikontrak / Sewa, sehingga menjadi kendala bagi BPBD untuk pengadaan peralatan pendeteksi Bencana yang harus terpasang permanen.

Solusi

Secara umum solusi yang harus diambil yakni:

- a. Mengajukan alokasi anggaran berkaitan sarana mobilitas tersebut dengan berkoordinasi dan berkonsultasi pada pihak pemerintah kabupaten bolaang mongondow maupun pemerintah provinsi/pusat melalui bantuan keuangan/hibah.
- b. Mengajukan anggaran sarana prasarana penunjang untuk pencegahan dan penyelamatan korban bencana dan kebakaran pada pihak pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow maupun pemerintah provinsi/pusat.

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Sosial Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.



4.6.2 Target Pencapaian dan Realisasi SPM oleh Daerah

No	Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2023 (%)	Capaian TW 1 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 2 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 3 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 4 Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00	51,50	95,38	100,00	100,00
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00	95,00	0,00	98,33	100,00
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00	0,00	0,00	0,00	88,33
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

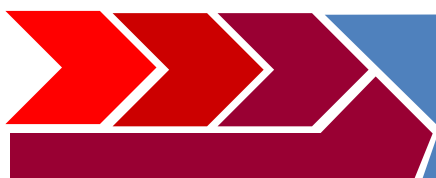


No	Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2023 (%)	Capaian TW 1 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 2 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 3 Tahun 2023 (%)	Capaian TW 4 Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100,00	0,00	80,00	96,00	100,00

4.6.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2023 di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow berjumlah Rp. 335.783.095,00,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	335.783.095,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	23.648.550,00
	- Penyediaan alat bantu	23.648.550,00
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	312.134.545,00
	- Penyediaan makanan	78.155.100,00
	- Penyediaan sandang	131.812.500,00
	- Penyediaan tempat penampungan pengungsi	80.226.360,00
	- Penanganan khusus bagi kelompok rentan	17.520.240,00
	- Pelayanan dukungan Psikososial	4.420.345,00



4.6.4 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 didukung jumlah personil sebanyak 23 orang ASN. Keadaan pegawai dilihat dari pangkat dan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Keadaan PNS menurut Pangkat/Golongan
Tahun 2023

No	Pangkat/Gol	Jumlah
1.	Golongan IV	4 Orang
2.	Golongan III	14 Orang
3.	Golongan II	5 Orang
Total		23 Orang

4.6.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Masalah yang dihadapi selama tahun 2023 antara lain adalah sebagai berikut :

1. DTKS belum terverifikasi dengan baik;
2. Minimnya SDM;
3. DTKS yang belum terverifikasi dengan baik menyebabkan perencanaan kurang matang dan Penganggaran yang minim;
4. Minimnya Pekerja Sosial diwilayah.

Solusi

Solusi dalam mengatasi permasalahan ini adalah melaksanakan sosialisasi kepada pimpinan, aparat dan masyarakat di desa. Melaksanakan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan upaya peningkatan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial serta melaksanakan kegiatan pelayanan / rehabilitasi kesejahteraan sosial, baik yang bersifat pelayanan publik diantaranya, pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), maupun pemberian bantuan langsung serta pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat stimulant untuk usaha ekonomi produktif



para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Melaksanakan perbaikan dan penambahan kendaraan operasional untuk pengangkutan logistik kepada masyarakat, selain itu juga memasukkan anggaran dalam kegiatan penerapan standar pelayanan minimal bidang sosial sehingga realisasinya sesuai dengan yang diharapkan.

4.7 Program dan Kegiatan

1. Bidang Urusan Pendidikan

Program kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023 sebagai berikut:

N O	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	110.407.091.928	103.354.587.352
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	61.763.917.808	57.294.305.803
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	41.858.079.004	39.567.446.807
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia PAUD	5.826.721.216	5.535.526.542
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	958.373.900	957.308.200

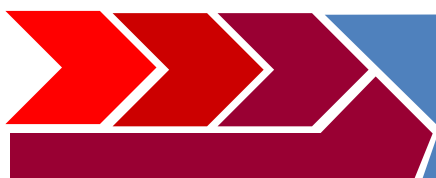
2. Bidang Urusan Kesehatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023 sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
I.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	1.370.366.557,00	1.166.095.322,00



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.370.366.557,00	1.166.095.322,00
1	Pengelolaan Pelayanan	124.194.775,00	92.637.780,00
2	Pengelolaan Pelayanan	30.942.000,00	29.442.000,00
3	Pengelolaan Pelayanan	64.640.000,00	54.336.720,00
4	Pengelolaan Pelayanan	182.292.500,00	130.466.486,00
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	72.692.500,00	55.897.100,00
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	57.358.000,00	45.511.980,00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	258.568.582,00	249.695.336,00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	51.254.402,00	39.728.274,00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	58.446.250,00	44.966.456,00
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	45.721.440,00	45.491.540,00



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	305.333.772,00	274.160.000,00
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	93.295.336,00	78.321.050,00
13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis	25.627.000,00	25.440.600,00
II.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA	221.137.544,00	177.720.440,00
1	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	87.189.500,00	54.084.000,00
2	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	133.948.044,00	123.636.440,00
JUMLAH		1.591.504.101,00	1.343.815.762,00

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023 sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
I.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	485.856.365,00	219.547.950,00



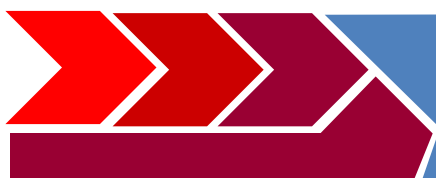
NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	485.856.365,00	219.547.950,00
	- Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	19.547.950,00	19.547.950,00
	- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	466.308.415,00	200.000.000,00
II.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.461.464.093,00	2.461.464.093,00
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.461.464.093,00	2.461.464.093,00
	- Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	17.117.549,00	17.117.549,00
	- Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	2.444.346.544,00	2.444.346.544,00
JUMLAH		2.947.320.458,00	2.681.012.043

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM bidang urusan perumahan rakyat tahun 2023 sebagaiberikut:



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	162.819.636,00	144.429.250,00
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	81.515.997,00	63.975.500,00
	- Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	21.307.743,00	18.414.050,00
	- Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	6.314.970,00	6.189.300,00
	- Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	19.451.067,00	14.656.400,00
	- Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	12.361.914,00	7.149.200,00
	- Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	22.080.303,00	17.566.550,00



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	81.303.639,00	80.453.750,00
	- Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	6.303.639,00	5453750,00
	- Pembangunan rumah bagi korban bencana	75.000.000,00	75.000.000,00
2.	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN LAINNYA	44.321.073,00	27.376.950,00
	- Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	14.527.008,00	8.122.750,00
	- Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	13.266.231,00	7.620.400,00
	- Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	10.894.413,00	6.045.100,00



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	- Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	5.633.421,00	5.588.700,00
JUMLAH		207.140.709,00	171.806.200,00

5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	3.948.269.995,00	3.876.581.864,00
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3.300.176.165,00	3.268.878.814,00
	- Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	147.455.430,00	138.285.200,00
	- Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	56.883.627,00	54.866.267,00
	- Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	3.095.837.108,00	3.075.727.347,00
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	648.093.830,00	607703050,00
	- Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	557.206.800,00	540.063.050,00

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	- Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	18.519.980,00	0,00
	- Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	27.571.050,00	23.540.000,00
	- Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	44.796.000,00	44.100.000,00
JUMLAH		3.948.269.995,00	3.876.581.864,00

2. Satuan Polisi Pamong Praja

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	105.600.180,00	0.00
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	54.030.168,00	53.880.000
	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan,	54.030.168,00	53880000
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	51.570.012,00	49.914,100



	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	51.570.012,00	49.914.100
2.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	120.816.000,00	120.666.000
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Kebakaran	120.816.000,00	120.666.000
	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	120.816.000,00	120.666.000
JUMLAH		226.416.180,00	224.460.100,00

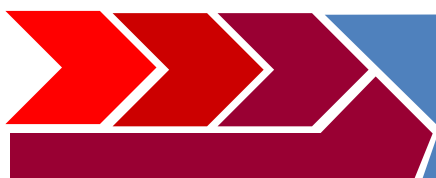
6. Bidang Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2023 sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	335.783.095,00	331.855.250,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	23.648.550,00	23.648.550,00
	Penyediaan alat bantu	23.648.550,00	23.648.550,00



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	312.134.545,00	308.206.700,00
	- Penyediaan makanan	78.155.100,00	75.715.000,00
	- Penyediaan sandang	131.812.500,00	131.324.100,00
	- Penyediaan tempat penampungan pengungsi	80.226.360,00	80.140.000,00
	- Penanganan khusus bagi kelompok rentan	17.520.240,00	16.837.500,00
	- Pelayanan dukungan Psikososial	4.420.345,00	4.190.100,00
	JUMLAH	335.783.095,00	331.855.250,00



BAB V

PENUTUP

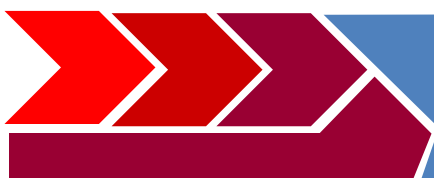
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023, pada hakekatnya merupakan hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan wajib disampaikan kepada pemerintah pusat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah yang merupakan tujuan penerapan otonomi daerah telah dilaksanakan untuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perangkat daerah serta dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangannya.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 ini disusun dan disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur Sulawesi Utara, dengan harapan jalinan kerjasama pihak-pihak terkait dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai visi Bolaang Mongondow "Bolaang Mongondow yang baru, berbudaya, berdaya saing dan mandiri sebagai lumbung pangan Indonesia Timur".

Terima Kasih



**CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023**

KABUPATEN : BOLAANG MONGONDOW

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR							
1	PENDIDIKAN	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD adalah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat dan sedang belajar, 5.634 ----- x 100% Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan, 7.703	73.14%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas DUKCAPIL Data By Name, By Kecamatan
				1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	193 A=3 B=97 C=93	Sumber Data dari Dinas Pendidikan Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan
				2	Jumlah Peserta Didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Sumber data dari Dinas Pendidikan
				3	Jumlah Peserta Didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	4716	Sumber data dari Dinas Pendidikan
				4	Jumlah Kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	442	Sumber data dari Dinas Pendidikan
				5	Jumlah Pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	297	Sumber data dari Dinas Pendidikan
				6	Jumlah Pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	85	Sumber data dari Dinas Pendidikan
				7	Jumlah Kepala Sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S-1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	76	Sumber data dari Dinas Pendidikan

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disekolah dasar, 22.972 ----- x 100% Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan, 24.276	94.63%	Pembilang dari Dinas Pendidikan, Penyebut dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil By Name, By Kecamatan	
				1	Jumlah SD Negeri Terakreditasi	Jumlah SD Negeri Terakreditasi	218 A=18 B=142 C=58	Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan. Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah)
				2	Jumlah Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	21,767	Sumber Data Dinas Pendidikan
				3	Jumlah Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	21,767	Sumber Data Dinas Pendidikan
				4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta)	2374	Sumber Data Dinas Pendidikan
				5	Jumlah Pendidik pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah Pendidik pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta)	2347	Sumber Data Dinas Pendidikan
				6	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	678	Sumber Data Dinas Pendidikan
				7	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	260	Sumber Data Dinas Pendidikan
				8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	719	Sumber Data Dinas Pendidikan
				9	Jumlah Kepala Sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah Kepala Sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	86	Sumber Data Dinas Pendidikan
				10	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/Sederajat	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/Sederajat	11	Sumber Data Dinas Pendidikan

39

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disekolah menengah pertama, 9.963 ----- x 100% Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten bersangkutan, 12.695	78.48%	Pembilang dari Dinas Pendidikan, Penyebut dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil By Name, By Kecamatan	
		287		1	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi	69 A=13 B=34 C=14	Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan. Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah)
				2	Jumlah Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	8.320	Sumber Data Dinas Pendidikan
				3	Jumlah Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	8.320	Sumber Data Dinas Pendidikan
				4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta)	1115	Sumber Data Dinas Pendidikan
				5	Jumlah Pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah Pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta)	1002	Sumber Data Dinas Pendidikan
				6	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta)	226	Sumber Data Dinas Pendidikan
				7	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	80	Sumber Data Dinas Pendidikan
				8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	349	Sumber Data Dinas Pendidikan
				9	Jumlah Kepala Sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah Kepala Sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	31	Sumber Data Dinas Pendidikan
				10	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/Sederajat	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/Sederajat	10	Sumber Data Dinas Pendidikan

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan, 1201 ----- x 100% Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan, 51.206	2.345%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Pendidikan By Name, By Kecamatan	
				1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	10 A=0 B=7 C=3	Sumber Data Dinas Pendidikan Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal (Pendidikan Kesetaraan) berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan. Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah)
				2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	0	Sumber Data Dinas Pendidikan
				3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	474	Sumber Data Dinas Pendidikan
				4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	123	Sumber Data Dinas Pendidikan
				5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	75	Sumber Data Dinas Pendidikan
				6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	55	Sumber Data Dinas Pendidikan
				7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah pada jenjang satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	0	Sumber Data Dinas Pendidikan
				8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	7	Sumber Data Dinas Pendidikan
2	KESEHATAN	1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk		Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan, 262 ----- x 1000 Jumlah Penduduk di Kabupaten, 254.945	1.027673	Pembilang dari Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Penyebut dari Dinas Kependudukan dan Capil	
				1	Jumlah Rumah Sakit Rujukan kabupaten yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Jumlah Rumah Sakit Rujukan kabupaten yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	11	Sumber Data dari Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan
		2	Persentase RS Rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi		Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi, 13 ----- x 100% Jumlah RS di Kabupaten, 19	68.42%	Pembilang dan Penyebut dari Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan	
				1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	1	Sumber Data dari Rumah Sakit

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		3	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan, 4.021 ----- x 100% Jumlah ibu hamil di Kabupaten, 4.638	86.70%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan	
				1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8 Jenis	Sumber data dari dinas kesehatan, dibuat dalam bentuk daftar
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	54 Orang	Sumber data dari dinas kesehatan, dibuat dalam bentuk daftar
		4	Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan, 3,247 ----- x 100% Jumlah ibu bersalin di Kabupaten, 4,427	73.35%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan	
				1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Jenis	Sumber data dari dinas kesehatan, dibuat dalam bentuk daftar
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	54 Orang	Sumber data dari dinas kesehatan, dibuat dalam bentuk daftar
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar, 3.241 ----- x 100% Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten, 4.219	76.82%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan	
				1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6 Jenis	Sumber data dari dinas kesehatan, dibuat dalam bentuk daftar
				2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	54 Orang	Sumber data dari dinas kesehatan, dibuat dalam bentuk daftar
		6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar, 17.267 ----- x 100% Jumlah balita di Kabupaten, 17.502	99%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan	
				1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8 Jenis	Sumber data dari dinas kesehatan, dibuat dalam bentuk daftar
				2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	72 Orang	Sumber data dari dinas kesehatan, dibuat dalam bentuk daftar
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar, 30.394 ----- x 100% Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten, 36.971	82%	Pembilang dari Dinas Kesehatan dan Penyebut berasal dari Dinas Kependudukan dan Capil Anak Usia Pendidikan Dasar adalah anak Usia 7-15 Tahun			
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5 Jenis	Sumber data dari dinas kesehatan, dibuat dalam bentuk daftar		
		2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	90 Orang	Sumber data dari dinas kesehatan, dibuat dalam bentuk daftar		
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, 76.269 ----- x 100% Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten, 172.200	44.29%	Pembilang berasal dari Dinas Kesehatan, Penyebut dari Dinas Kependudukan dan Capil			
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Jenis	Sumber data dari dinas kesehatan, dibuat dalam bentuk daftar		
		2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	90 Orang	Sumber data dari dinas kesehatan, dibuat dalam bentuk daftar		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		9	Persentase warga negara 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. 28.871 ----- x 100% Jumlah orang warga negara usia 60 tahun keatas di Kabupaten, 29.304	98.52%	Pembilang berasal dari Dinas Kesehatan, Penyebut dari Dinas Kependudukan dan Capil	
				1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Jenis	Sumber data dari dinas kesehatan, dibuat dalam bentuk daftar
				2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	90 Orang	Sumber data dari dinas kesehatan, dibuat dalam bentuk daftar
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, 43.561 -----x 100% Jumlah penderita hipertensi di kabupaten, 56.085	78%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan	
				1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Jenis	Sumber data dari dinas kesehatan, dibuat dalam bentuk daftar
				2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	72 Orang	Sumber data dari dinas kesehatan, dibuat dalam bentuk daftar
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, 3.121 ----- x 100% Jumlah penderita DM di Kabupaten, 3.422	91.20%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan	
				1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6 Jenis	Sumber data dari dinas kesehatan, dibuat dalam bentuk daftar
				2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	90 Orang	Sumber data dari dinas kesehatan, dibuat dalam bentuk daftar
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		Jumlah penderita ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, 464 ----- x 100% Jumlah penderita ODGJ Berat di Kabupaten, 480	97%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan	
				1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4 Jenis	Sumber data dari dinas kesehatan, dibuat dalam bentuk daftar
				2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	35 Orang	Sumber data dari dinas kesehatan, dibuat dalam bentuk daftar
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, 4.734 ----- x 100% Jumlah penderita TBC di Kabupaten, 4734	100%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan	
				1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7 Jenis	Sumber data dari dinas kesehatan, dibuat dalam bentuk daftar
				2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	88 Orang	Sumber data dari dinas kesehatan, dibuat dalam bentuk daftar

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar, 2.680 ----- x 100% Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten, 2.980	89.93%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
				1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4 Jenis	Sumber data dari dinas kesehatan, dibuat dalam bentuk daftar
				2 Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	87 Orang	Sumber data dari dinas kesehatan, dibuat dalam bentuk daftar
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten		Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten (ha), 825 ----- x 100% Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (ha), 825	100%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Pekerjaan Umum
				1 Luas kawasan pemukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Luas kawasan pemukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	825 Ha	Sumber Data Dinas PU & PR
				2 Panjang sungai dikawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Panjang sungai dikawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	2016 M	Sumber Data Dinas PU & PR
				3 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	9723,78 Ha	Sumber Data Dinas PU & PR
				4 Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (m)	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (m)	1620,63 M	Sumber Data Dinas PU & PR
				5 Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumberdaya air WS kewenangan kabupaten/kota	Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumberdaya air WS kewenangan kabupaten/kota	825 Ha	Sumber Data Dinas PU & PR
				6 Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumberdaya air kewenangan kabupaten/kota	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	825 Ha	Sumber Data Dinas PU & PR
				7 Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	IV. 175 UNIT	Sumber Data Dinas PU & PR Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal bajir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kabupaten		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten (ha), 1620,63 ha ----- x 100% Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan Kabupaten (ha), 9723,78 ha	16.67%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				1 Luas kawasan pemukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Luas kawasan pemukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	3241,26 ha	Sumber Data Dinas PU & PR

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				2	Panjang sungai dikawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Panjang sungai dikawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	2016 M	Sumber Data Dinas PU & PR
				3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	9723,78 ha	Sumber Data Dinas PU & PR
				4	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (m)	97,238 M	Sumber Data Dinas PU & PR
				5	Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumberdaya air WS kewenangan kabupaten/kota	Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumberdaya air WS kewenangan kabupaten/kota	644,50 M	Sumber Data Dinas PU & PR
				6	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumberdaya air kewenangan kabupaten/kota	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumberdaya air WS kewenangan kabupaten/kota	644,50 M	Sumber Data Dinas PU & PR
				7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	IV. 175 UNIT	Sumber Data Dinas PU & PR Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal bajir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha) direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting, $0+23+6.302+62= 6.387$ ----- x 100% Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten, 9.250	69.05%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m), 62.987 ----- X 100% Panjang jaringan irigasi primer (m), 102.819	61.26%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sukender dalam kondisi baik (m), 9.496 ----- X 100% Panjang jaringan irigasi sekunder (m), 11.097	85.57%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m), 65,013 ----- X 100% Panjang jaringan irigasi tersier (m), 251,957	25.80%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten		Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan terlindungi dalam sebuah kabupaten, 43.043 ----- x 100% Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota, 62.773	68.57%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				1	Penetapan dokumen RISPAM Kabupaten/Kota	Penetapan dokumen RISPAM Kabupaten (Ada/Tidak)	Ada	Sumber Data Dinas PU & PR

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2 Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten/Kota	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten/Kota (Ada/Tidak)	Ada	Sumber Data Dinas PU & PR
				3 Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	tidak	Sumber Data Dinas PU & PR
				4 Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0	Sumber Data Dinas PU & PR
				5 Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain	0	Sumber Data Dinas PU & PR
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD, 12.425+0+19.015= 31.440 ----- x 100% Jumlah rumah di kabupaten, 55.479	56.67%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				1 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	2096	Sumber Data Dinas PU & PR
				2 Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	16919	Sumber Data Dinas PU & PR
				3 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	19015	Sumber Data Dinas PU & PR
				4 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0	Sumber Data Dinas PU & PR
				5 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	Sumber Data Dinas PU & PR
				6 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	19015	Sumber Data Dinas PU & PR
				7 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar	\sum rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik, 12.425 ----- X 100% \sum Rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha, 25.673	48.40%	Sumber data dinas PU & PR

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				8 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\sum \text{Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT, 0}}{\sum \text{Rumah diwilayah pengembangan SPALD S dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/ha, 5.978}} \times 100\%$	0%	Sumber data dinas PU & PR
				9 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\sum \text{Rumah yang memiliki sambungan dan air limbahnya diolah di IPALD, 19.015}}{\sum \text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD - T, 19.695}} \times 100\%$	96.55%	Sumber data dinas PU & PR
				10 Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\sum \text{Rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat, 2.096}}{\sum \text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S, 5.978}} \times 100\%$	35.06%	Sumber data dinas PU & PR
				11 Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia, 0}}{\sum \text{Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota, 0}} \times 100\%$	0%	Sumber data dinas PU & PR
				12 Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia, 0}}{\sum \text{Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kabupaten, 0}} \times 100\%$	0%	Sumber data dinas PU & PR
				13 Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\sum \text{Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD, 19.015}}{\sum \text{Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kabupaten, 16.919}} \times 100\%$	112%	Sumber data dinas PU & PR
				14 Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot, 0}}{\sum \text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD - S, 0}} \times 100\%$	0%	Sumber data dinas PU & PR
		6	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota		$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya, 977}}{\text{Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku, 977}} \times 100\%$	100%	Pembilang dari Dinas PUPR dan penyebut dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Ket : Seluruh Jenis IMB Baik Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung
				1 Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{\sum \text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku, 0}}{\sum \text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana), 0}} \times 100\%$	0%	Sumber Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				2 Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam tahun eksisting	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam tahun eksisting	31	Sumber Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				3	Penetapan Peraturan Daerah tentang bangunan/gedung	Penetapan Peraturan Daerah tentang bangunan/gedung (Ada/Tidak)	Ada	Sumber Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				4	Penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada	Sumber Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan	0	Sumber Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk kepentingan strategis daerah kabupaten	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk kepentingan strategis daerah kabupaten	0	Sumber Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				7	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten	918 Unit	Sumber data BKD
				8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten yang dipelihara/dirawat	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten	21 Unit	Sumber Data BKD
		7	Tingkat Kemantapan jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Panjang Jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi mantap, 377,64 KM ----- x 100% Jumlah panjang jalan kabupaten, 682,71 KM	55.31%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten/kota	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten/kota	682,71 KM	Sumber data dinas pu & pr
				2	Panjang jalan yang dibangun	Panjang jalan yang dibangun	0	Sumber data dinas pu & pr
				3	Panjang jembatan yang dibangun	Panjang jembatan yang dibangun	0	Sumber data dinas pu & pr
				4	Panjang jalan yang ditingkatkan	Panjang jalan yang ditingkatkan (Struktur/fungsi)	17,945 KM	Sumber data dinas pu & pr
				5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	Sumber data dinas pu & pr
				6	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	0,273 KM	Sumber data dinas pu & pr
				7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	Sumber data dinas pu & pr
				8	Panjang jalan yang dipelihara	Panjang jalan yang dipelihara	65,030 KM	Sumber data dinas pu & pr
				9	Panjang jembatan yang dipelihara	Panjang jembatan yang dipelihara	0	Sumber data dinas pu & pr

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih diwilayah kabupaten yang dibuktikan dengan setifikat pelatihan operator dan teknis/analis, 54 ----- x 100% Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis diwilayah kabupaten, 462	11.26%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				1	Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi diwilayah kabupaten	Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi diwilayah kabupaten	1 Kegiatan	Sumber data dinas pu & pr
				2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	54 Orang	Sumber data dinas pu & pr
				3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	54 Orang	Sumber data dinas pu & pr
				4	Terselenggaranya sistem informasi pembina jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Terselenggaranya sistem informasi pembina jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir (Ada/Tidak)	Ada	Sumber data dinas pu & pr
				5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota (Ada/Tidak)	Ada	Sumber data dinas pu & pr
				6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN (Ada/Tidak)	Ada	Sumber data dinas pu & pr
				7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya (Ada/Tidak)	Ada	Sumber data dinas pu & pr
				8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya (Ada/Tidak)	Ada	Sumber data dinas pu & pr
				9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada	Sumber data dinas pu & pr
				10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknis/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintahan lainnya.	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknis/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintahan lainnya. (Ada/Tidak)	Ada	Sumber data dinas pu & pr

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				11 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis (Ada/tidak)	Ada	Sumber data dinas pu & pr
				12 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisis/analisis di wilayah kabupaten	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisis/analisis di wilayah kabupaten (Ada/Tidak)	Ada	Sumber data dinas pu & pr
				13 Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan diwilayah kabupaten/kota	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan diwilayah kabupaten/kota (Ada/Tidak)	Ada	Sumber data dinas pu & pr
				14 Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui (Ada/Tidak)	Ada	Sumber data dinas pu & pr
				15 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya (Ada/Tidak)	Ada	Sumber data dinas pu & pr
				16 Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangannya	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangannya (Ada/tidak)	Ada	Sumber data dinas pu & pr
				17 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Sumber data dinas pu & pr
				18 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten	15 Badan Usaha	Sumber data dinas pu & pr
				19 Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten	0	Sumber data dinas pu & pr
				20 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kabupaten/kota	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kabupaten/kota	15 Badan Usaha	Sumber data dinas pu & pr
				21 Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	15 Badan Usaha	Sumber data dinas pu & pr
				22 Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Sumber data dinas pu & pr
				23 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	12	Sumber data dinas pu & pr

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Sumber data dinas pu & pr
				25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	344	Sumber data dinas pu & pr
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi tanpa kecelakaan konstruksi, 344 ----- x 100% Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya, 344	100%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n, 2 ----- x 100% Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n, 2	100%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	431 Unit	Sumber Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	431 Unit	Sumber Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	RT:637 KK:637 JIWA:2179	Sumber Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	Sumber Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Sumber Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	2 Unit	Sumber Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Sumber Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	RT:2 KK:2 JIWA:7	Sumber Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				9	Jumlah luasan dan lokasi pencadangan lahan	Jumlah luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Sumber Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota		Rumah Tangga Penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni, 0 ----- x 100% Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan, 0	0%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Sumber data Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Sumber data Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
				3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Sumber data Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
				4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Sumber data Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
				5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Sumber data Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
				6	Jumlah total luasan (ha) pengadaan tanah	Jumlah total luasan (ha) pengadaan tanah	0	Sumber data Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani		Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha), 71,77 ----- x 100% Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha, 101,01	71.05%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				1	Jumlah luasan (ha) kawasan permukiman kumuh < 10 ha	Jumlah luasan (ha) kawasan permukiman kumuh < 10 ha	101,01 ha	Sumber data Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
				2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	4124 Unit	Sumber data Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
				3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	71,77 ha	Sumber data Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		Jumlah unit rumah tidak layak huni, 1754 ----- x 100% Jumlah total unit rumah kabupaten, 55, 479	3.16%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				1	Jumlah rumah di kabupaten	Jumlah rumah di kabupaten	55.479 Unit	Sumber data Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
				2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	109 Unit	Sumber data Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
				3	Jumlah rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni	1.754 UNIT	Sumber data Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
				4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	Sumber data Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
				5	Rasio rumah dan KK	Jumlah KK, 62.773 ----- X 100% Jumlah total unit rumah kabupaten, 55, 479	113%	Sumber data Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
				6	Jumlah rumah pembangunan baru	Jumlah KK, 0 ----- X 100% Jumlah total unit rumah kabupaten, 55, 479	0%	Sumber data Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		Jumlah unit perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU, 362 ----- x 100% Jumlah unit perumahan kabupaten, 362	100%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				1	Jumlah rumah tidak layak huni	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	3 Perumahan	Sumber data Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
				2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	362 Unit	Sumber data Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
				3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	362 Unit	Sumber data Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
				4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/off site)	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/off site)	362 Unit	Sumber data Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
				5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	Sumber data Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
				6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0	Sumber data Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
				7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	3 Pengembang	Sumber data Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
				8	Jumlah pengembang yang terintegrasi	Jumlah pengembang yang terintegrasi	3 Pengembang	Sumber data Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
				9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Sumber data Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		Jumlah Pengaduan yang ditangani, 8 ----- x 100% Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk, 8	100%	Sumber data dari Satpol PP	
				1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupaten yang ditangani	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupaten yang ditangani	8 Pengaduan	Sumber data dari Satpol PP
				2	Jumlah satuan satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Jumlah satuan satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1010	Sumber data dari Satpol PP
				3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	3	Sumber data dari Satpol PP
				4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1	Sumber data dari Satpol PP
				5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum (Ada/Tidak)	Ada	Sumber data dari Satpol PP
				6	Tersedianya sarana prasarana minimal	Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada	Sumber data dari Satpol PP dibuat dalam bentuk daftar
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		Jumlah Perda/ Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan, 3 ----- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi, 3	100%	Sumber data Satpol PP	
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	181435	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, 200.787 ----- x 100% Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan, 254.945	78.76%	Sumber Data BPBD	
				1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun, 0 ----- x 100% Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan, 0	0%	Sumber data BPBD

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana, 156.737 ----- x 100% Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana, 181.435	86.39%	Sumber data BPBD
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, 206 ----- x 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana, 181.435	0.11%	Sumber Data BPBD	
				1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun, 0 ----- x 100% Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan, 0	0%	Sumber data BPBD
				2	Persentase penyelesaian dokumen renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun, 0 ----- x 100% Jumlah satu dokumen Renkon yang lengkap dan sudah disahkan, 0	0%	Sumber data BPBD Renkon adalah Rencana Kontijensi
				3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut latihan, 175+41 ----- x 100% Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana, 181.435	0.12%	Sumber data BPBD
				4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan, 175 ----- x 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana, 181.435	0.10%	Sumber data BPBD
				5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops, 123.583 ----- x 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana, 181.435	68.11%	Sumber data BPBD
				6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan, 10.163 ----- x 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana, 181.435	5.60%	Sumber data BPBD
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, 1.815 ----- x 100% Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana, 1.815	100%	Sumber Data BPBD	
				1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 Jam untuk setiap penetapan KLB, 0 ----- x 100% Jumlah seluruh penetapan status KLB, 0	0%	Sumber data BPBD
				2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 Jam untuk setiap penetapan darurat bencana, 0 ----- x 100% Jumlah seluruh penetapan status darurat berencana, 0	0%	Sumber data BPBD

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat berencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana, 27 ----- x 100% Jumlah keseluruhan Petugas dalam penanganan darurat bencana, 43	62.79%	Sumber data BPBD
				4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi, 487 ----- x 100% Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana, 487	100%	Sumber data BPBD
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah, 66+5=71 ----- x 100% Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten, 71	100%	Sumber data Satpol PP	
				1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten	2 Jenis	Sumber data Satpol PP
				2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada (3 Pos)	Sumber data Satpol PP
				3	Tersedianya aparatur selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di Kantor Kecamatan	Tersedianya aparatur selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di Kantor Kecamatan	Ada/Tersedia	Sumber data Satpol PP
				4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Ada (3Pos)	Sumber data Satpol PP Dibuat dalam bentuk daftar
				5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Ada (4 Jenis)	Sumber data Satpol PP Dibuat dalam bentuk daftar
				6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	4 Orang	Sumber data Satpol PP
				7	Jumlah relawan kebakaran dibawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Jumlah relawan kebakaran dibawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	1010 Orang	Sumber data Satpol PP
				8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	20 Orang	Sumber data Satpol PP
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	23 Menit	Sumber data Satpol PP	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
6	SOSIAL	1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)		Jumlah korban penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti, 27 ----- x 100% Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis, 27	100%	Sumber data Dinas Sosial	
				1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	22 Layanan	Sumber data Dinas Sosial
				2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data FM dan OTM	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data FM dan OTM	27 data	Sumber data Dinas Sosial
				3	Jumlah Tim Reaksi Cepat	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1 Tim	Sumber data Dinas Sosial
				4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	27 Orang	Sumber data Dinas Sosial
				5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1 Unit	Sumber data Dinas Sosial
				6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	27 Orang	Sumber data Dinas Sosial
				7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	2 Unit	Sumber data Dinas Sosial
				8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	23 Orang	Sumber data Dinas Sosial
				9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	12 Orang	Sumber data Dinas Sosial
				10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	2 Unit	Sumber data Dinas Sosial
				11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	2 Paket	Sumber data Dinas Sosial
				12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	8 ORANG	Sumber data Dinas Sosial
				13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Sumber data Dinas Sosial
				14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	71 Orang	Sumber data Dinas Sosial

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, dinas sosial, rumah singgah/shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, dinas sosial, rumah singgah/shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	27 Orang	Sumber data Dinas Sosial
				16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	27	Sumber data Dinas Sosial
				17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	4	Sumber data Dinas Sosial
				18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	10	Sumber data Dinas Sosial
				19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	22 Orang	Sumber data Dinas Sosial
				20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	24 Orang	Sumber data Dinas Sosial
				21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	3 Orang	Sumber data Dinas Sosial
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten		Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran, 154 ----- x 100% Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten, 154	100%	Sumber data Dinas Sosial	
				1	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	154 Orang	Sumber data Dinas Sosial
				2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	154 Orang	Sumber data Dinas Sosial
				3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	10 Unit	Sumber data Dinas Sosial
				4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	13 Paket	Sumber data Dinas Sosial

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	76 Orang	Sumber data Dinas Sosial
				6	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	71 Orang	Sumber data Dinas Sosial Dibuat dalam bentuk daftar

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR

1	TENAGA KERJA	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD, 1 ----- x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten, 11	9.09%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten	Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	0	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Realisasi Indikator - Target Indikator, 0 ----- X 100% Realisasi, 0	0%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100%
				3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kabupaten	Jumlah seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan	0	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi, 571 ----- x 100% Jumlah tenaga kerja keseluruhan, 3.620	15.77%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun n, 0 ----- X 100% Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n, 0	0%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n, 0 ----- X 100% Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n, 0	0%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun n, 0 ----- X 100% Jumlah peserta pelatihan pada tahun n, 20	0%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				4	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n, 0 ----- X 100% Jumlah seluruh LPK pada tahun n, 0	0%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n, 0 ----- X 100% Jumlah LPK yang terdata pada tahun n, 0	0%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		6	Jumlah penganggur yang dilatih	Jumlah penganggur yang dilatih	20 Orang	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n, 20 ----- X 100% Jumlah orang yang dilatih pada tahun n, 20	100%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				8	Persentase penyerapan lulusan Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n, 0 ----- X 100% Jumlah lulusan pada tahun n, 20	0%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				9	Lulusan bersertifikat kompetensi Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n, 0 ----- X 100% Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n, 20	0%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				10	Jumlah calon pekerja migran indonesia (CPMI) / calon tenaga kerja indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan Σ CPMI dilantik, 20 ----- X 100% Σ CPMI terdaftar, 20	100%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				11	Jumlah pelatihan calon pekerja migran indonesia (CPMI) / Calon tenaga kerja indonesia (CTKI) Jumlah pelatihan calon pekerja migran indonesia (CPMI) / Calon tenaga kerja indonesia (CTKI)	4 Pelatihan	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan), 10.539,42 ----- x 100% Jumlah tenaga kerja, 3.620	291%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n, 0 ----- X 100% Jumlah perusahaan pada tahun n, 137	0%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				2	Data tingkat produktivitas total Pertumbuhan ekonomi (5,18) - (pertumbuhan modal (0) + pertumbuhan tenaga kerja (95,394)), □	-90.214	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).		Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak, 125 ----- x 100% Jumlah Perusahaan, 137	91.24%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				1	Persentase perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan Jumlah perusahaan yang sudah memiliki peraturan perusahaan pada tahun n, 26 ----- X 100% Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih, 26	100.00%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				2	Persentase perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama (PKB) Jumlah perusahaan yang sudah memiliki PKB pada tahun n, 1 ----- X 100% Jumlah perusahaan yang sudah memiliki SP/SB, 3	33.33%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB diperusahaan yang tercatat, SP/SB diluar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	6	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah, 4 ----- X 100% Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB), 6	66.67%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, 125 ----- X 100% Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor, 137	91.24%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih, 4 ----- X 100% Jumlah perusahaan pada tahun n, 137	2.92%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				7	Jumlah mogok kerja	Jumlah mogok kerja	0	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				8	Jumlah penutupan perusahaan	Jumlah penutupan perusahaan	0	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				9	Jumlah perselisihan kepentingan	Jumlah perselisihan kepentingan	0	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				10	Jumlah perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) dalam 1(satu) perusahaan	Jumlah perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) dalam 1(satu) perusahaan	0	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				11	Jumlah perselisihan PHK	Jumlah perselisihan PHK	3	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	3 ORANG	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	1	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				14	Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit yang diberdayakan	Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	0	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator hubungan industrial	Jumlah perjanjian bersama, 0 ----- X 100% Jumlah kasus perselisihan, 4	0%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten		Jumlah pencari (Pencari Kerja) yang ditempatkan, 1.208 ----- x 100% Jumlah pencari yang terdaftar, 1.534	78.75%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia diwilayah kabupaten/kota	Jumlah lowongan kerja yang tersedia diwilayah kabupaten/kota	1,208	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten/kota	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten/kota	1,534	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kabupaten/kota	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kabupaten/kota	1 Bursa Kerja Khusus	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				4	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	5 Orang	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1 Orang	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				6	Jumlah lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten/kota	Jumlah lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten/kota	0	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota	0	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) online (SISNAKER)	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) online (SISNAKER)	0	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				9	Jumlah calon pekerja migran indonesia (CPMI) / calon tenaga kerja indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{\sum \text{CPMI} / \text{CTKI yang mendapatkan sosialisasi, 20}}{\sum \text{CPMI} / \text{CTKI, 20}} \times 100\%$	100%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				10	Jumlah calon pekerja migran indonesia (CPMI) / calon tenaga kerja indonesia (CTKI) yang terdata	Jumlah calon pekerja migran indonesia (CPMI) / calon tenaga kerja indonesia (CTKI) yang terdata	20 Orang	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				11	Jumlah calon pekerja migran indonesia (CPMI) / calon tenaga kerja indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi keperluan	$\frac{\sum \text{Fasilitasi PMI yang dipulangkan, 0}}{\sum \text{PMI yang pulang, 0}} \times 100\%$	0%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				12	Jumlah calon pekerja migran indonesia (CPMI) / calon tenaga kerja indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	$\frac{\sum \text{PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja, 7}}{\sum \text{PMI/TKI, 20}} \times 100\%$	35%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				13	Data pemberdayaan pekerja migran indonesia (PMI) / tenaga kerja indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{\sum \text{PMI/TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan, 0}}{\sum \text{PMI/TKI purna dan keluarganya, 0}} \times 100\%$	0%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				14	Jumlah layanan terpadu satu atap (LTSA) yang dibentuk	$\frac{\sum \text{LTSA yang terbentuk, 0}}{\text{Jumlah daerah kantong PMI/TKI, 7}} \times 100\%$	0%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD, 543.383.149 $\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD, 543.383.149}}{\text{Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD, 950.660.114.548}} \times 100\%$	0.06%	Sumber Data Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Keuangan Daerah	
				1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	2 Lembaga	Sumber Data Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
				2	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	1 Program	Sumber Data Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten		Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi, 8 $\frac{\text{Jumlah Anak (Penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten, 44}}{\text{Jumlah Anak (Penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi, 8}} \times 100\%$	18.18%	Sumber Data Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	
				1	Jumlah media massa (cetak,elektronik) yang bekerjasama dengan pemkab (dinas pppa) yang melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah media massa (cetak,elektronik) yang bekerjasama dengan pemkab (dinas pppa) yang melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	0	Sumber Data Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	0	Sumber Data Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Standar Pelayanan Minimal yang dimaksud seperti apa dan dasar regulasinya)
				3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani, 44 ----- X 100% Jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten, 44	100%	Sumber Data Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
				4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1 Lembaga	Sumber Data Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
				5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitasi oleh pemkab (APBD kabupaten/kota)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitasi oleh pemkab (APBD kabupaten/kota)	1 Lembaga	Sumber Data Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan, 22 ----- x 100.000 Jumlah penduduk perempuan, 122.228	0.02%	Sumber Data Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak/ Disdukcapil	
				1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapat pelatihan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapat pelatihan	2 Lembaga	Sumber Data Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
				2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	16 Orang	Sumber Data Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
				3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	3 Lembaga	Sumber Data Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
				4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1 Lembaga	Sumber Data Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
				5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2 Program	Sumber Data Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
				6	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	0	Sumber Data Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
				7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan, 18 ----- X 100% Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan, 22	81.82%	Sumber Data Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
3	PANGAN	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)		Jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, 111,62 ----- x 100% Jumlah target cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, 108,36	103%	Sumber Data Dinas Ketahanan Pangan	
				1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan (Ada/Tidak)	tidak	Sumber data Dinas Ketahanan Pangan

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2 Tersalurannya pangan pokok dan pangan lainnya	Tersalurannya pangan pokok dan pangan lainnya (Ada/Tidak)	Ada	Sumber data Dinas Ketahanan Pangan
				3 Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal (Ada/Tidak)	Ada	Sumber data Dinas Ketahanan Pangan
				4 Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang (Ada/Tidak)	Ada	Sumber data Dinas Ketahanan Pangan
				5 Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan (Ada/Tidak)	Ada	Sumber data Dinas Ketahanan Pangan
				6 Tertanganinya kerawanan pangan	Tertanganinya kerawanan pangan (Ada/Tidak)	Ada	Sumber data Dinas Ketahanan Pangan
				7 Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan (Ada/Tidak)	Ada	Sumber data Dinas Ketahanan Pangan
				8 Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar (Ada/Tidak)	Ada	Sumber data Dinas Ketahanan Pangan
4	PERTANAHAN	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		Luas tanah sesuai peruntukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KPPR), 1.201.864,06 M ² ----- x 100% Seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KPPR), 1.201.864,06 M ²	100%	Sumber Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				1 SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + Jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya), 24 ----- X 100% Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun, 36	67%	Sumber Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				2 SK Bupati/Walikota tentang penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum / absentee dan daftar subyek	Jumlah penerbitan SK penetapan tanah obyek landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee, 0 ----- X 100% Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform, 0	0%	TIM PENYUSUN LPPD KABUPATEN
				3 SK Bupati/Walikota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee	Jumlah luas tanah yang dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee, 0 ----- X 100% Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek, 0	0%	TIM PENYUSUN LPPD KABUPATEN
				4 Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + Jumlah izin membuka tanah yang ditolak, 0 ----- X 100% Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun, 0	0%	Sumber Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				5 Dokumen perencanaan penggunaan tanah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik, 93 ----- X 100% Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun, 93	100%	Sumber Data Dinas PUPR
		2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, 150,14 ha ----- x 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, 213 ha	70.49%	Sumber Data Dinas PUPR

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal		Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KPPR), 359.791,36 x 100% Luas tanah diatas kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang diterbitkan, 359.791,36	100%	Sumber data dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diretribusi yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha, 0 x 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform, 0	0%	TIM PENYUSUN LPPD KABUPATEN
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat		Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah, 0 x 100% Luas izin membuka tanah yang diterbitkan, 0	0%	Sumber Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani, 2 x 100% Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan, 2	100%	Sumber Data Bagian Hukum
5	LINGKUNGAN HIDUP	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten		Indeks Kualitas Air = 18,8 Indeksi Kualitas Udara = 38,83 Indeks Kualitas Tutupan Lahan= 16,58	74.21	Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup
				1 Hasil perhitungan kabupaten terhadap: a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Tutupah Hutan (ITH)	Indeks Kualitas Air (IKA) $Nilai\ relatif = \frac{CI}{k_{ii}}$ Rumus Metode IP : $IP = \sqrt{\frac{(C_i/k_{ii})^2 + (C_i/k_{ii})^2}{2}}$ $0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow \text{baik (memenuhi baku mutu)}$ $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow \text{cemar ringan}$ $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow \text{cemar sedang}$ $PI_j > 10,0 \rightarrow \text{cemar berat}$ $IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ IKU = 100 - [50/0.9 x (Ieu - 0.1)] dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	a. Indeks Kualitas Air (IKA) = 18,8 b. Indeks Kualitas Udara (IKU) = 38,83 c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan = 16,58	Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup
		2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten		Total volume sampah yang dapat ditangani, 11.266,3 x 100% Total volume timbunan sampah Kabupaten, 45.712,24	24.65%	Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup
				1 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbunan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbunan sampah 3. Tersedianya informasi terkait TPST dibagi jumlah sampah pada masing-masing lingkungan	Ada	Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten		Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten. 29 x 100% Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan, 65	44.62%	Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup
				1 Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten, 1.165 x 100% Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi, 1.165	100%	Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2 Rasio Pejabat Pengawas LH di daerah (PPLHD) di kabupaten terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	Jumlah PPLHD yang ada, 4 x 100% Jumlah kegiatan dan/atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten, 1.165	0.34%	Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup
				3 Penetapan hak Masyarakat Hukum Adat terkait PPLH yang berada di kabupaten	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang diakui, 0 x 100% Jumlah Usulan Masyarakat Hukum Adat, 0	0%	Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup
				4 Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang diberikan pelatihan, 0 x 100% Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang ada, 0	0%	Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup
				5 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga masyarakat yang diberikan diklat, 0 x 100% Target Lembaga Kemasyarakatan yang akan diberikan diklat, 0	0%	Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup
				6 Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten yang ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani, 15 x 100% total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi, 15	100%	Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1	Perekaman KTP elektronik		Jumlah Penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP, 173.419 x 100% Jumlah Penduduk 17 tahun keatas, 190.383	91.09%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				1 Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan, 79.610 x 100% Peristiwa perkawinan yang dilaporkan, 79.610	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				2 Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan, 1.584 x 100% Peristiwa perceraian yang dilaporkan, 1.584	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				3 Penerbitan Akta Kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan, 10.485 x 100% Peristiwa kematian yang dilaporkan, 10.485	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				4 Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun, 254.945 x 100% Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 2 tahun, 507.753 2023 : 254.945 2022 : 252.808	50.21%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA, 30.263 x 100% Jumlah anak usia 0-17 tahun, 63.217	47.87%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		3	Kepemilikan Akta Kelahiran		Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran, 65.316 x 100% Jumlah anak usia 0-18 tahun, 67.886	96.21%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama, 7 x 100% Jumlah OPD, 47	14.89%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bagian Organisasi

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Persentase pengentasan desa tertinggal		Jumlah desa yang tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun, 6 ----- x 100% Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n), 7	85.71%	Sumber Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	0	Sumber Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya	0	Sumber Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat didesa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat didesa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	6 LA 6 LPM	Sumber Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	2 DESA	Sumber Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2	Persentase peningkatan status desa mandiri		Jumlah Desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun 11 ----- x 100% Jumlah Desa berkembang (per awal tahun n), 74	14.86%	Sumber Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	0	Sumber Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya, 0 - 5 = -5	0 DESA	Sumber Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat didesa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat didesa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	11 LA 11 LPM	Sumber Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	4 DESA	Sumber Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	TFR (Angka Kelahiran Total)		$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$	1.902	Sumber Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				1	Tersedianya dokumen grand design pembangunan kependudukan (GDPK) yang diperdakan	Tersedianya dokumen grand design pembangunan kependudukan (GDPK) yang diperdakan (Ada/Tidak)	Ada	Sumber Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				2	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	24.57	Sumber Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				3	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific fertility rate/ASFR 15-19)	$ASFR = \frac{b_i}{p_i} \times f \times k$	54.33652433	Sumber Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan kie)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan kie), 5.807 ----- x 100% Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan kie), 7.553	76.88%	Sumber Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	55	Sumber Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mPCR)			Jumlah peserta KB Aktif Modern, 22.003 ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur, 34.395	63.97%	Sumber Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				1	Persentase fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang melayani KB MKJP, 19 ----- x 100% Jumlah faskes, 19	100%	Sumber Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				2	Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB Aktif, 6,283 ----- x 100% Jumlah PUS, 34.395	18.27%	Sumber Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				3	Pemerintah Kabupaten yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	142	Sumber Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	4	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern, 562 ----- x 100% Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan, 4427	12.69%	Sumber Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani, 5.660 ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur, 34.395	16.46%	Sumber Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				1	Persentase kesertaan KB di kabupaten dan kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah □	45	Sumber Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				2	Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI, 9.601 ----- x 100% Jumlah keluarga penerima PBI, 15.006	63.98%	Sumber Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	PERHUBUNGAN	1	Rasio Konektivitas Kabupaten		<p>Rasio Konektivitas Kabupaten = (IK 1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</p> <p>IK 1 (angkutan jalan) = (jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten x bobot trayek dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut)</p> <p>IK 2 (angkutan sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten tersebut x bobot lintas dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten tersebut)</p> <p>Keterangan :</p> <p>IK 1 (Angkutan Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah trayek yang dilayani adalah Jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu <p>IK 2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintas perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu <p>Bobot Angkutan jalan atau sungai, danau dan penyeberangan :</p> <p>Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)</p> <p>Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 50, bobot angkutan jalan = 50)</p> <p>Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 bobot angkutan jalan = 70)</p> <p>Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi tinggi (> 5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5 	0.645	Dinas Perhubungan
				1	<p>Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe c</p> <p>Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe c yang tersedia, 9</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan, 12</p>	75.00%	Sumber data dinas perhubungan
				2	<p>Terlaksananya pelayanan uji berkala</p> <p>Jumlah kendaraan yang diuji per tahun, 300</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah kendaraan wajib uji, 759</p>	39.53%	Sumber data dinas perhubungan
				3	<p>Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi</p> <p>Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan, 0</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah lintas penyeberangan dalam kabupaten, 0</p>	0%	Sumber data dinas perhubungan

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2	Kinerja Lalulintas Kabupaten/Kota		V/c Ratio di Jalan Kabupaten $IKK = VCR\ ruas1 + VCR\ ruas2 + VCR\ ruas3 + \dots + VCR\ ruas\ n$ $VCR\ ruas\ n = \frac{VCR\ ruas\ n}{C\ Ruas\ n}$ $C\ ruas\ n = CO \times FC \times FC\ spb \times FC\ sf$	0.0001349058	Dinas Perhubungan
				1 Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten, 947 $\dots \times 100\%$ Target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten, 5.092	19.13%	Sumber data dinas perhubungan
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas kominfo, 35 $\dots \times 100\%$ Jumlah Organisasi Perangkat Daerah, 47	74%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Organisasi
				1 Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo, 33 $\dots \times 100\%$ Jumlah Organisasi Perangkat Daerah, 47	70.21%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Organisasi
				2 Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo, 35 $\dots \times 100\%$ Jumlah Perangkat Daerah, 47	74.47%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Organisasi Akses internet berkualitas: - Tingkat Realibilitas (SLA) 97-98% - Tingkat Ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah tersedia) - Besarnya bandwidth yang memadai (min. 2 mbps) □
				3 Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ya	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan integritas		Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi, 20 $\dots \times 100\%$ Jumlah Layanan Publik, 27	74.07%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika
				1 Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	Jumlah kegiatan perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015, 27 $\dots \times 100\%$ Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah, 27	100%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika
				2 Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar, 47 $\dots \times 100\%$ Jumlah perangkat daerah, 47	100%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Organisasi
				3 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, 11 $\dots \times 100\%$ Jumlah perangkat daerah, 47	23.40%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis secara elektronik, 30 ----- x 100% Jumlah layanan yang telah diimplementasikan secara elektronik, 30	100%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika
				5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik, 30 ----- x 100% Jumlah layanan, 30	100%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika
				6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, 29 ----- x 100% Jumlah sistem elektronik, 29	100%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika
				7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintahan	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintahan, 22 ----- x 100% Jumlah layanan publik dan layanan administrasi, 22	100%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika
				8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintahan, 14 ----- x 100% Jumlah perangkat daerah, 47	29.79%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Organisasi
				9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah, 18 ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah, 47	38.30%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Organisasi
				10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data, 47 ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah, 47	100%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Organisasi
				11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai, 6 ----- x 100% Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah, 6	100%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika
				12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi mendukung smart city, 16 ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah, 47	34.04%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Organisasi
				13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan dinas kominfo, 12 ----- x 100% Jumlah ASN pengelola TIK, 12	100%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				14 Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	(Ada atau Tidak ada): 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: • Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran • Penganggaran • Strategi • Peta Jalan • Arah Kebijakan • Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab □	Ada	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika
		3	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten		Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten, 182.986 ----- x 100% Jumlah Penduduk, 254.945	71.77%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika / Dinas Disdukcapil
				1 Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota	∑ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah daerah Kabupaten yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah, 4 ----- x 100% ∑ komunitas masyarakat atau mitra komunikasi pemerintah daerah kabupaten, 6	66.67%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika Komunitas masyarakat/ Mitra Strategis termasuk di antaranya : KIM, FK Metra, JRKI, PWI, Blogger Daerah, Satgas Medsos.
				2 Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (strakom)	∑ konten informasi program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan STRAKOM, 3.360 ----- x 100% ∑ konten informasi program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten, 3,360	100%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika Komunitas masyarakat/ Mitra Strategis termasuk di antaranya : KIM, FK Metra, JRKI, PWI, Blogger Daerah, Satgas Medsos.
				3 Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	∑ diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STARKOM dan SOP, 366 ----- x 100% ∑ diseminasi dan layanan informasi publik, 366	100%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika Komunitas masyarakat/ Mitra Strategis termasuk di antaranya : KIM, FK Metra, JRKI, PWI, Blogger Daerah, Satgas Medsos.
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas		Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume usaha dan asset, 55 ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi, 55	100%	Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM
				1 Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun dilaporkan, 0 ----- x 100% Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum memiliki ijin usaha simpan pinjam, 15	0%	Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM
				2 Persentase fasilitasi penerbitan ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah penerbitan ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam tahun dilaporkan, 0 ----- x 100% Jumlah permohonan ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam tahun dilaporkan, 0	0%	Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi, 55 ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada, 55	100%	Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM
				4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya, 55 ----- x 100% Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi, 55	100%	Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM
				5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, 0 ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada, 0	0.00%	Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM
				6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian, 0 ----- x 100% Jumlah anggota koperasi yang ada, 55	0%	Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM
				7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, 0 ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada, 0	0%	Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM
				8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	0	Tidak perlu diisi
				9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat nomor induk koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang diterbitkan sertifikat NIK, 50 ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada, 55	90.91%	Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM
				10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang diberikan dukungann fasilitasi pembiayaan, 0 ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada, 55	0%	Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM
				11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran, 55 ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada, 55	100%	Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM
				12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan pendampingan kelembagaan dan usaha, 55 ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada, 55	100%	Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM
				13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan, 55 ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada, 55	100%	Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha		Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha, 12.000 ----- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan, 12.579	95.40%	Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM	
				1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru, 11 ----- x 100% Jumlah wirausaha yang ada, 130+11=141	7.80%	Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput dalam ODS, 1.147 ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada, 12.579	9.12%	Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM
				3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra, 12.579 ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada, 12.579	100%	Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM
				4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi, 3 ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk, 12.576	0.02%	Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM
				5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran, 11 ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran, 12.568	0.09%	Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM
				6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan, 10 ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada, 12.579	0.08%	Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM
				7	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha, 2 ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada, 12.579	0.02%	Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM
12	PENANAMAN MODAL	1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten		Jumlah Investasi PMDN dan PMA tahun 2023 - 2022, 12.474.306.139.345 - 11.632.135.042.345 = 842.171.097.000 ----- x 100% Jumlah Investasi PMDN dan PMA tahun 2022 , 11.632.135.042.345	7.24%	Sumber Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP · Yang dimaksud jumlah investasi adalah jumlah proyek investasi di kabupaten/kota baik PMDN dan PMA · Jumlah PMDN dan PMA untuk disebutkan sebagai keterangan · Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dalam satuan Rupiah □	
				1	Perda mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	Jumlah fasilitas/intensif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	66	Sumber Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	1 SOP	Sumber Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Jumlah Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal per tahun	5 Laporan	Sumber Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	3 KEGIATAN	Sumber Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				5	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah Kegiatan pameran penanaman modal	3 KEGIATAN	Sumber Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	15 Kegiatan	Sumber Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	8 Konsultasi	Sumber Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3434 IZIN	Sumber Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
				9	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	842,171,097,000	Sumber Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
				10	Pembinaan aparaturnya penanaman modal tingkat kabupaten	Jumlah aparaturnya penanaman modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	9 ORANG	Sumber Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
				11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	1658 Pelaku Usaha	Sumber Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
				12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	11 Permintaan Data	Sumber Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten, 4726 ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten, 67.541	7%	Sumber Data Disdukcapil / Dinas Pemuda dan Olahraga · Yang dimaksud dengan pemuda yang berwirausaha adalah pemuda (16-30 tahun) yang terdaftar sebagai pelaku usaha di Lembaga Perizinan Usaha		
				1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	Sumber Data Dinas Pemuda dan Olahraga	
				2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Sumber Data Dinas Pemuda dan Olahraga	
		2	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten, 2.970 ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten, 67.541	4.40%	Sumber Data Dinas Pemuda dan Olahraga / Disdukcapil Organisasi kepemudaan seperti organisasi karang taruna, pramuka, LPMD dsb		
				1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda	78 Orang	Sumber Data Dinas Pemuda dan Olahraga	
				2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	2300 Orang	Sumber Data Dinas Pemuda dan Olahraga	
				3	Peningkatan Prestasi Olahraga		Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	211 Medali	Sumber Data Dinas Pemuda dan Olahraga
		1	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan			Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	22 Orang	Sumber Data Dinas Pemuda dan Olahraga	
		14	STATISTIK	1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, 47 ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah, 47	100%	Sumber Data Dinas Kominfo dan Bagian Orqanisasi
						1	Tersedianya buku profil daerah	Tersedianya buku profil daerah (Ada/Tidak)	Ada
2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan					Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	3 Survey	Sumber Data Dinas Kominfo	
3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan					Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	0	Sumber Data Dinas Kominfo	
4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS					Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	1 Survey	Sumber Data Dinas Kominfo	
5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS					Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	Sumber Data Dinas Kominfo	
6	Persentase kelengkapan metadata variabel kegiatan statistik					Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral, 1 ----- X 100% Jumlah kegiatan statistik sektoral, 3	33.33%	Sumber Data Dinas Kominfo	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Jumlah metadata indikator statistik sektoral, 53 ----- X 100% Jumlah indikator statistik sektoral, 75	70.67%	Sumber Data Dinas Kominfo
		2	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah, 47 ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah, 47	100%	Sumber Data Dinas Kominfo, Bagian Organisasi	
15	PERSANDIAN	1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah		Jumlah nilai per area keamanan informasi, 0 ----- x 100% Jumlah area penilaian, 0	0%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah dilihat dari Indeks KAMI. Indeks KAMI menilai 5 area yaitu: 1. Tata Kelola Keamanan Informasi 2. Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi 3. Kerangka Kerja Keamanan Informasi 4. Pengelolaan Aset Informasi 5. Teknologi dan Keamanan Informasi	
				1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan, 2 ----- x 100% Jumlah kegiatan strategis yang ada, 2	100%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah sistem elektronik atau SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian, 12 ----- x 100% Jumlah sistem elektronik yang ada, 22	54.55%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika Yang termasuk dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, e-perizinan, e-procurement, epersuratan, simdadll
				3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah sistem elektronik atau asset informasi yang telah diaudit dengan resiko rendah, 10 ----- x 100% Jumlah sistem elektronik yang ada, 22	45.45%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika
				4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teramankan, 47 ----- x 100% Jumlah titik pada PHKS, 47	100%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika
16	KEBUDAYAAN	1	Terlestarikannya Cagar Budaya		Jumlah cagar budaya yang dilestarikan, 33 ----- x 100% Jumlah cagar budaya yang ditetapkan, 33	100%	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
				1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi)	Jumlah objek Pelestarian Kebudayaan yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	Jumlah 33	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	0	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				3	Jumlah obyek kemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah obyek yang dimanfaatkan	0	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	0	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah Cagar Budaya ditetapkan – Jumlah Cagar Budaya dihapuskan <input type="checkbox"/>	0	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				6	Perlindungan cagar budaya kabupaten (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah Cagar Budaya (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar <input type="checkbox"/>	Jumlah, 33	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				7	Layanan perijinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kabupaten dengan dukungan data	Jumlah Cagar Budaya diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota <input type="checkbox"/>	0	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				8	Pengembangan cagar budaya kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah Cagar Budaya (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi) <input type="checkbox"/>	0	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				9	Pemanfaatan cagar budaya kabupaten (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata)	Jumlah Cagar Budaya dimanfaatkan <input type="checkbox"/>	Jumlah, 33	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	0	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				11	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten	Jumlah pengunjung museum Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum	0	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten		TIDAK PERLU DIISI	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran Cagar Budaya yang dibentuk	0	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				14	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah pembentukan tim ahli Cagar Budaya	0	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				15	Fasilitasi sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli Cagar Budaya yang disertifikasi	0	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				16	Pemetaan SDM Cagar Budaya dan Permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum	0	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman kabupaten	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (Cagar Budaya + Museum)	0	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				18 Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (Cagar Budaya + Museum)	0	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				19 Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17	PERPUSTAKAAN	1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	58.63	Sumber Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Menghitung tingkat kegemaran membaca masyarakat melalui pengukuran indikator sebagai berikut: 1. Indikator Frekuensi Membaca 2. Indikator Durasi Membaca 3. Indikator Jumlah Bahan Bacaan 4. Frekuensi Akses Internet 5. Durasi Akses Internet
				1 Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia diberbagai perpustakaan diwilayahnya (dalam eksemplar), 22.865 ----- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa), 254.945	8.97%	Pembilang dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Penyebut dari Dinas Kependudukan dan Capil
				2 Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite, 6.339 ----- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa), 254.945	2.49%	Pembilang dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Penyebut dari Dinas Kependudukan dan Capil
				3 Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan diberbagai perpustakaan di wilayahnya, 5 ----- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa), 254.945	0.002%	Pembilang dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Penyebut dari Dinas Kependudukan dan Capil
				4 Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan ,1 ----- x 100% Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya,314	0.32%	Sumber Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				5 Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	94 Orang	Sumber Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	41.63%	Sumber Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				1 Jumlah naskah kuno yang diakuisisi / dialih media (digitalisasi) / terdaftar yang ada diwilayahnya	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi / dialih media (digitalisasi) / terdaftar yang ada diwilayahnya	1 Naskah	Sumber Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				2 Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan alih bahasa	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	1 Naskah	Sumber Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				3 Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada diwilayah nya (item)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	62 Judul 79 Eksemplar	Sumber Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	KEARSIPAN	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps.40 dan 39 UU 43/2009)		$T = (a + i + s + j)/4$ T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	60.435	Sumber Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				1 Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, 3.342 ----- x 100% Jumlah seluruh arsip aktif, 4.420	75.05%	Sumber Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				2 Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, 3.905 ----- x 100% Jumlah seluruh arsip in-aktif, 4.477	87.22%	Sumber Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik, 1.450 ----- x 100% Jumlah seluruh arsip in-aktif, 1.854	78.21%	Sumber Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN, 0 ----- x 100% Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan kabupaten, 0	0	Sumber Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dengan NSPK g = tingkat kesesuaian	66.67	Sumber Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
				1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip	96 Berkas	Sumber Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana	47	Sumber Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				3	Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di kabupaten	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah	5	Sumber Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik	0	Sumber Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	220	Sumber Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	32	Sumber Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PILIHAN								
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten / Kota (Sumber data: one data KKP)		Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten, 11.874,25 + 303,49 = 12.177,74 ----- X 100% Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan 12.157 + 500 = 12.657	96.21%	Sumber Data Dinas Perikanan	
				1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	1.362 RT	Sumber Data Dinas Perikanan
				2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah TPI yang operasional, 1 ----- x 100% Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah kabupaten, 1	100%	Sumber Data Dinas Perikanan
				3	Jumlah izin usaha perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0	Sumber Data Dinas Perikanan

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				4 Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan/penyuluhan) dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun □	10 Orang 1 Kelompok	Sumber Data Dinas Perikanan	
				5 Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun Air Tawar = 61.500 + Air Payau = 0	61500	Sumber Data Dinas Perikanan	
2	PARIWISATA	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		Jumlah Wisatawan Mancanegara Tahun 2023-2022, 260-46= 214 ----- x 100% Jumlah Wisatawan Mancanegara Tahun 2022, 46	465.22%	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
				1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	101 Entitas	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	50	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten	53	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	260 Orang	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri Bisa sebagai peserta atau penyelenggara	8 Event	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	0	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata didalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata didalam negeri	6	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				8	Persentase tenaga kerja disektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi, 3 ----- x 100% Jumlah tenaga kerja pariwisata, 22	20.00%	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan, 60 ----- x 100% Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan , 60	100%	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	9	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	Jumlah Wisatawan Nusantara Tahun 2023 - 2022, 253.979-251.165= 2.814 ----- x 100% Jumlah Wisatawan Nusantara Tahun 2022, 251.165	1.12%	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				3	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual , 4.113 ----- x 100% Jumlah kamar yang tersedia, 31.025	13.26%	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku, 4.020.000.000 ----- x 100% Total PDRB Harga Berlaku, 1.053.942.000.000	0.3814%	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		Total Realisasi PAD dari sektor pariwisata, 150.242.500 ----- x 100% Total Realisasi PAD, 69.847.019.829,91	0.215%	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Keuangan Daerah	
3	PERTANIAN	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun		Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun, 362.899,86 ----- x 100% Luas panen, 73.492,47 ha	493.79%	Sumber Data Dinas Pertanian	
				1	Sarana dan Prasarana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan Prasarana pertanian yang diberikan	880 Unit	Sumber Data Dinas Pertanian
				2	Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah Prasarana pertanian yang digunakan	47 Unit	Sumber Data Dinas Pertanian
				3	Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi Penerbitan izin usaha pertanian	3 Izin	Sumber Data Dinas Pertanian
				4	Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan, 47 ----- x 100% Jumlah prasarana yang dibangun, 47	100%	Sumber Data Dinas Pertanian
				5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian dikabupaten	Jumlah usulan yang difasilitasi, 3 ----- x 100% Jumlah usulan usaha pertanian, 3	100%	Sumber Data Dinas Pertanian
		2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1), 0-1=-1 ----- x 100% Jumlah kejadian / kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1), 1	-100%	Sumber Data Dinas Pertanian	
4	ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten/kota		Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin, 1 ----- X 100% Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi, 1	100%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM	
				1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten	1	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM
5	PERDAGANGAN	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan, 626 ----- X 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten, 1.317	47.53%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM	
				1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin: a. Pusat Perbelanjaan	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja ----- X 100% Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	0%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM
					b. Toko Swalayan	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja, 24 ----- X 100% Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar, 24	100%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM
				2	Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG ≤ 5 hari kerja, 2 ----- X 100% Jumlah permohonan penerbitan TDG, 4	50%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM
				3	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG, 2 ----- X 100% Jumlah gudang yang ada di kabupaten, 12	16.67%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk: a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar, 0 ----- X 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri, 0	0%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM
					b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar, 0 ----- X 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri, 0	0%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM
					c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- X 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM
				5	Persentase pemeriksaan fasilitasi penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten, 20 ----- X 100% Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer, 20	100%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM
				6	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤ 1 hari kerja (1 x 24 jam), 0 ----- X 100% Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar, 0	0%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM
				7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a+b) \times 100\%$ K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)	90%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM
				8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	95%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM
		2	Persentase kinerja realisasi pupuk		Realisasi Pupuk, 16.467 ----- X 100% Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), 51.394	32.04%	Sumber Data Dinas Pertanian	
				1	Jumlah Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan	$x = \frac{a}{b \times c} \times 100\%$ x = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Kabupaten sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	28.84%	Sumber Data Dinas Pertanian

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan, 614 ----- X 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten, 4.511	13.61%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM
		1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan		Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan, 1.125 ----- X 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten, 4.511	24.94%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM
		2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku		Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, 41 ----- X 100% Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan, 41	100%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM
7	PERINDUSTRIAN	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten		Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun 2023-2022 2.633 - 2.495 = 138 ----- X 100% Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun 2022, 2.495	5.53%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM
		1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten		Jumlah realisasi izin yang diterbitkan, 1 ----- X 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk, 1	100%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator		Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut dan setiap sasaran memiliki bobot 20%. Dokumen perencanaan pembangunan industri daerah yang terdiri dari: 1. Pertumbuhan PDRB 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Non Migas 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas dari PMA dan PMDN	0%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM
		1	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA		Capaian target tahapan penyelesaian RPIK	0%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan, 458 ----- X 100% Jumlah izin yang dikeluarkan, 458	100%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM
		1	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan		Jumlah realisasi izin yang diterbitkan, 458 ----- X 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk, 458	100%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan, 0 ----- X 100% Jumlah izin yang dikeluarkan, 0	0%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM
		1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Jumlah realisasi izin yang diterbitkan, 0 ----- X 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk, 0	0%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan, 1 ----- X 100% Jumlah izin yang dikeluarkan, 1	100%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		Ketersediaan informasi secara lengkap dan terkini Kelengkapan informasi industri + keterkinian informasi industri (50+25 = 75) + (10+10+10+10+10 = 50) Keterkinian informasi industri: - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) Kelengkapan informasi industri: - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) - Informasi bahan bakar/energi (10%) - Informasi tenaga kerja (10%) - Informasi investasi (10%)	125%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM
				1 Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten di SII Nas, 52 ----- X 100% Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten, 2637	1.97%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM
8	TRANSMIGRASI			1 Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				2 Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				3 Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
1	PERENCANAAN DAN KEUANGAN			1 Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah realisasi belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan, 17.334.874.143 ----- x 100% Jumlah realisasi APBD, 1.099.597.450.263	1.576%	Sumber Data Badan Keuangan Daerah Seluruh komponen belanja pegawai (gaji, tunjangan, honorarium) di luar guru dan tenaga kesehatan
				2 Rasio PAD	Jumlah realisasi PAD, 69.847.019.829,91 ----- x 100% Jumlah realisasi Pendapatan dalam APBD, 1.088.935.653,989,91	6.41%	Sumber Data Badan Keuangan Daerah
				3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Sumber Data Inspektorat Daerah
				4 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Sumber Data Inspektorat Daerah

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				5 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) 641.188.170.315	Jumlah realisasi belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures 641.188.170.315 x 100% Jumlah realisasi belanja APBD, 1.099.597.450.263	62.11%	Sumber Data Badan Keuangan Daerah Yang dimaksud dengan transfer expenditures adalah hibah, bantuan sosial, subsidi, pembayaran bunga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga Yang dimaksud dengan belanja urusan pemerintahan adalah seluruh belanja daerah di luar belanja modal Angka yang diambil adalah angka realisasi <input type="checkbox"/>
				6 Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir	2023 = Belum Rilis 2022= WTP 2021 = WTP 2020 = WTP 2019 = WDP 2018 = TMP 2017 = TMP 2016 = TMP 2015 = WDP 2014 = WDP 2013 = TW	Sumber Data Inspektorat Daerah
2	PENGADAAN			1 Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n, 0 x 100% Jumlah kontrak keseluruhan tahun n, 219	0%	Sumber Data Bagian Layanan Pengadaan Yang dimaksud dengan kontrak infrastruktur adalah kontrak proyek konstruksi infrastruktur Yang dimaksud dengan proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama adalah proyek konstruksi yang ditandatangani pada kuartal pertama (Januari-Maret) akan tetapi sampai dengan akhir tahun pelaporan belum selesai pembangunannya Kontrak konstruksi dengan nilai besar adalah kontrak konstruksi dengan nilai di atas 50 Miliar Rupiah
				2 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif, 1.226 x 100% Jumlah Keseluruhan Pengadaan Baik yang dilakukan dengan metode kompetitif maupun tanpa metode kompetitif, 2.724	45.01%	Sumber Data Bagian Layanan Pengadaan metode kompetitif terdiri atas: a. E-Purchasing b. Pengadaan Langsung c. Penunjukan Langsung d. Tender Cepat e. Tender yang dikecualikan dari proses penyusunan HPS pada metode diatas poin a dan b untuk nilai pagu dibawah 10 juta.
				3 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai realisasi belanja modal dan operasional yang melalui pengadaan, 245.513.251.761 x 100% Total realisasi Belanja modal dan operasional, 874.697.768.453	28.07%	Sumber Data Bagian Layanan Pengadaan Yang dimaksud dengan belanja langsung adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal Cakupan perhitungan adalah seluruh pengadaan dengan metode kompetitif maupun non kompetitif dari seluruh perangkat daerah yang ada
				4 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Realisasi Nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2023 - 2022, 200.191.922.669 - 172.716.411.746 = 27.475.510.923 x 100% Jumlah Realisasi Nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2022, 172.716.411.746	15.91%	Sumber Data Bagian Layanan Pengadaan Cakupan perhitungan adalah seluruh jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi yang bersumber dari aplikasi SIRUP dan LPSE

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	KEPEGAWAIAN			1 Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan perguruan tinggi keatas (diluar guru dan tenaga kesehatan), 986 ----- x 100% Total Seluruh PNS (diluar guru dan tenaga kesehatan), 1.554	63.45%	Sumber Data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan
				2 Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga fungsional)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan), 306 ----- x 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), 1.554	19.69%	Sumber Data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan
				3 Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), 99 ----- x 100% Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), 306	32.35%	Sumber Data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan
4	MANAJEMEN KEUANGAN			1 Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi, 1.099.597.450.263 ----- - 1 x 100% Total Belanja APBD, 1.175.821.783.648	-6.48%	Sumber Data Badan Keuangan Daerah · Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus · Total belanja APBD adalah total anggaran belanja APBD sebelum perubahan
				2 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi, 69.847.019.829,91 ----- - 1 x 100% Total Total PAD, 58.546.186.131	19.30%	Sumber Data Badan Keuangan Daerah · Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus · Total PAD dalam APBD adalah total anggaran PAD dalam APBD sebelum perubahan
				3 Manajemen Asset	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	YA	Sumber Data Badan Keuangan Daerah
				4 Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SILPA, 94.243.020.911,73 ----- x 100% Total belanja anggaran tahun sebelumnya, 1.031.824.125.387	9.13%	Sumber Data Badan Keuangan Daerah
5	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK			1 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Realisasi Belanja Anggaran Untuk Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda, 272.293.401.950 ----- x 100% Anggaran Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda, 274.372.160.189	99.24%	Sumber Data Badan Keuangan Daerah
				2 Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda, 12 ----- x 100% Total jumlah dokumen yang telah dirinci, 12	100%	Sumber Data Badan Keuangan Daerah · Daftar dokumen yang diminta : Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Ringkasan DPA SKPD, Ringkasan DPA PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD Yang Sudah Di Audit, Opini atas LKPD